



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

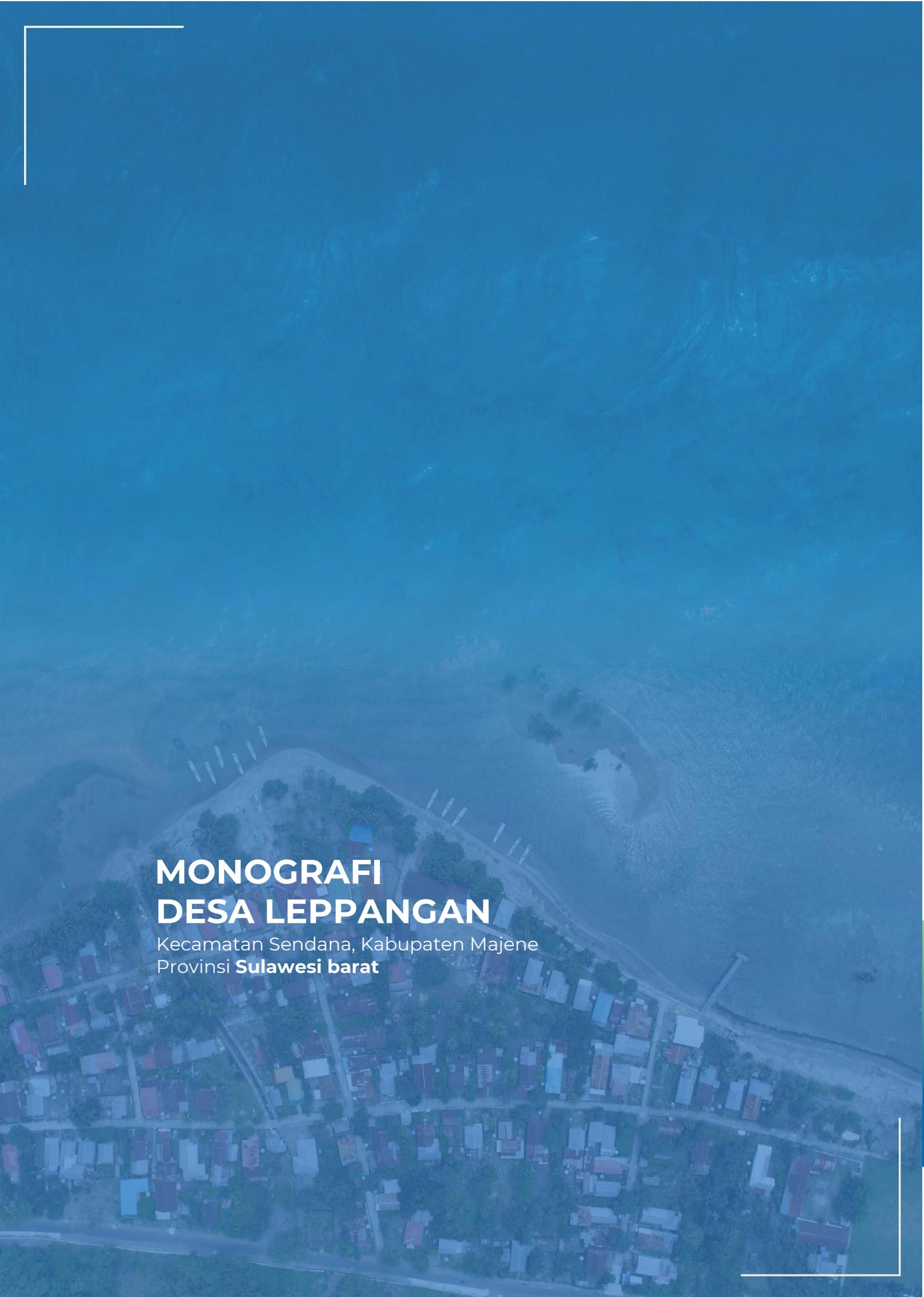


IPB University
Bogor Indonesia

DATA DESA PRESISI

MONOGRAFI DESA LEPPANGAN

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The image shows a cluster of buildings with various colored roofs (red, blue, white) situated along a shoreline. The water is a deep blue, and there are some structures extending into the sea. The overall tone is monochromatic blue.

MONOGRAFI DESA LEPPANGAN

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi **Sulawesi barat**

MONOGRAFI DESA LEPPANGAN

Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

Penulis:

Dr. Sofyan Sjaf
La Elson, M.Si.
Lukman Hakim, M.Si.
Muhammad Rifky Rangkuti, A.Md
Afan Ray Mahardika, M.Si
Andi Riqiq Ridwan Saleh, S.Pi
A. Muhammad Agriawan Suryaali, S.Pt., M. Si
Muhammad Riskhi Anggara Nasution, S.Kel.

Desain Sampul & Penata Letak:

Badar Muhammad, S.I.Kom.
Ayubi Aziz, A.Md.
Poppy Nur Anggraeni, S.Hut

Jumlah Halaman:

101 Hal + 10 Hal Romawi

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - IPB University
© 2022. HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

DATA DESA
PRE S I S I

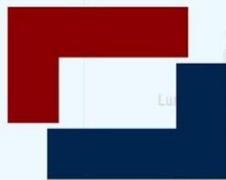
KATA PENGANTAR

Data Desa Presisi (DDP) adalah gagasan Dr. Sofyan Sjaf, dkk. yang dirintis sejak tahun 2014 pasca lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tahun 2014, kami membidani lahirnya inovasi kelembagaan Sekolah *Drone* Desa (SDD) sebagai pendekatan untuk membangun data spasial desa secara partisipatif. Beberapa daerah dan yang telah mengadopsi pendekatan ini adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Lanjut pada tahun 2017, Dr. Sofyan Sjaf, dkk. mulai mengawinkan pendekatan spasial dengan pendekatan sensus dan partisipasi warga, pendekatan yang mengawinkan dimensi spasial, sensus dan partisipatif dinamakan *Drone Participatory Mapping* (DPM). Pendekatan DPM ini diimplementasikan pada tahun 2017 di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hanya saja sensus dilakukan secara manual dengan instrumen kuesioner. Pada tahun 2019, dimulai pengembangan pendekatan DPM dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses sensus keluarga di pedesaan, yaitu MERDESA Aplikasi yang diinisiasi oleh Tim Unit Desa Presisi. Saat ini bersamaan dengan monografi ini terbit jumlah desa yang telah diimplementasikan DDP adalah sebanyak 93 Desa yang tersebar di 11 Provinsi di Indonesia.

Buku Monografi Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ini adalah bukti bahwa dengan partisipasi warga, DDP bisa dibangun dari desa. Kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengetahuan, adalah suatu keniscayaan untuk menghasilkan pembangunan presisi yang dimulai dari desa, sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi warga di pedesaan. DDP yang menyintesis 3 pendekatan (spasial, sensus, dan partisipatif) adalah bukti bahwa kita bisa menghasilkan *big data* desa ke depan.

Terakhir, buku monografi desa ini ditulis berdasarkan enam aspek kesejahteraan rakyat (kesra) sebagai wujud amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Keenam aspek kesra yang dimaksud, yaitu: demografi; sandang pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; sosial, hukum dan HAM; infrastruktur dan lingkungan hidup. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai basis perencanaan dan implementasi pembangunan di Desa Leppangan.

S E L A T M A K A S A R



DATA DESA PRESISI

LPPM IPB University



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
PENDAHULUAN	2
RUMUSAN MASALAH.....	4
TUJUAN PENDATAAN.....	7
METODOLOGI.....	8
Penggunaan Metode DDP	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan	17
DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan	18
GEOGRAFI DESA.....	22
2.1 Sejarah Desa Leppangan	22
2.2 Peta Orthophoto Desa Leppangan	23
2.3 Peta Administrasi Desa Leppangan	24
2.4 Peta Sarana dan Prasarana Desa Leppangan	24
2.5 Peta Penggunaan Lahan Desa Leppangan	26
2.6 Peta Topografi Desa Leppangan	28
DEMOGRAFI DESA.....	30
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	38
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	46
KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM	54
KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL	62
SANDANG, PANGAN DAN PAPAN	74
DATA SOSIAL.....	89
9.1 Kelembagaan Desa Leppangan (Diagram Venn)	89
9.2 Pohon Masalah Desa Leppangan	91
9.2 Kalender Musim Desa Leppangan	92
9.3 Stratifikasi Sosial Desa Leppangan	95
KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan implementasi DDP	10
Gambar 2 Peta orthophoto Desa Leppangan	23
Gambar 3 Peta administrasi Desa Leppangan	24
Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Desa Leppangan.....	25
Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Desa Leppangan	27
Gambar 6 Peta Topografi Desa Leppangan	28
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap dusun di Desa Leppangan	30
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Leppangan	31
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Desa Leppangan	31
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Desa Leppangan.....	32
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun Tammearbe	32
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun Leppangan.....	33
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun Leppangan Timur.....	33
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun Tomarese	34
Gambar 15 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan KTP di Desa Leppangan	34
Gambar 16 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Leppangan	35
Gambar 17 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin di Desa Leppangan	35
Gambar 18 Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Desa Leppangan.....	36
Gambar 19 Peta sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Leppangan	39
Gambar 20 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Leppangan	39
Gambar 21 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Desa Leppangan	40
Gambar 22 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Leppangan.....	41
Gambar 23 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Desa Leppangan	41
Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Leppangan....	42
Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Desa Leppangan	43
Gambar 26 Peta sebaran keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan	47
Gambar 27 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan.....	47
Gambar 28 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan <i>handphone</i> di Desa Leppangan	48
Gambar 29 Jumlah kepemilikan <i>handphone</i> berdasarkan merek yang digunakan di Desa Leppangan	49
Gambar 30 Jumlah penduduk berdasarkan merek <i>provider</i> yang digunakan di Desa Leppangan	49
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Desa Leppangan	50
Gambar 32 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Leppangan	50
Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Leppangan	51

Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Desa Leppangan	52
Gambar 35 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Desa Leppangan	54
Gambar 36 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan di Desa Leppangan	55
Gambar 37 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Desa Leppangan	56
Gambar 38 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Desa Leppangan	56
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki di Desa Leppangan	57
Gambar 40 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi <i>refreshing</i> di Desa Leppangan	58
Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Desa Leppangan	59
Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Desa Leppangan	59
Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Desa Leppangan	60
Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna KB di Desa Leppangan	62
Gambar 45 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Desa Leppangan	63
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Leppangan	64
Gambar 47 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Desa Leppangan	64
Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Desa Leppangan	64
Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah penyakit berat di Desa Leppangan	65
Gambar 50 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Desa Leppangan	65
Gambar 51 Jumlah penduduk berusaha sendiri berdasarkan lokasi usaha di Desa Leppangan	67
Gambar 52 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Leppangan	68
Gambar 53 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan pertanian di Desa Leppangan	68
Gambar 54 Jumlah keluarga berdasarkan pemanfaatan lahan di Desa Leppangan	69
Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Desa Leppangan	69
Gambar 56 Jumlah keluarga berdasarkan lokasi lahan yang dikelola di Desa Leppangan	69
Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Leppangan	70
Gambar 58 Jumlah balita penerima asi eksklusif di Desa Leppangan	71
Gambar 59 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Desa Leppangan	71
Gambar 60 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Desa Leppangan	75
Gambar 61 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Desa Leppangan	75
Gambar 62 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum	76
Gambar 63 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Leppangan	77
Gambar 64 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Desa Leppangan	78
Gambar 65 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok Di Desa Leppangan	79
Gambar 66 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Leppangan	81

Gambar 67 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Leppangan82

Gambar 68 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali Di Desa Leppangan83

Gambar 69 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Leppangan83

Gambar 70 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Desa Leppangan 84

Gambar 71 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Leppangan85

Gambar 72 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Leppangan85

Gambar 73 Diagram *venn* kelembagaan Desa Leppangan..... 89

Gambar 74 Pohon masalah Desa Leppangan.....91

Gambar 75 Stratifikasi sosial Desa Leppangan96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi	5
Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi	13
Tabel 3 Jumlah fasilitas umum setiap pada 4 dusun yang terletak di Desa Leppangan	25
Tabel 4 Titik Koordinat lokasi jalan rusak yang terdapat di Desa Leppangan	26
Tabel 5 Luas Penggunaan Lahan di Desa Leppangan	27
Tabel 6 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Desa Leppangan ...	36
Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Leppangan	40
Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Leppangan.....	41
Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Desa Leppangan	42
Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Desa Leppangan	43
Tabel 11 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan	48
Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Desa Leppangan	48
Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Leppangan	51
Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Leppangan	51
Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Desa Leppangan	52
Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan penerima program bantuan sosial di Desa Leppangan	55
Tabel 17 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Desa Leppangan	57
Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Desa Leppangan	57
Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Desa Leppangan	58
Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Desa Leppangan	63
Tabel 21 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Leppangan.....	66
Tabel 22 Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Desa Leppangan	66
Tabel 23 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Leppangan....	67
Tabel 24 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Leppangan	70
Tabel 25 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Desa Leppangan	70
Tabel 26 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Desa Leppangan	75
Tabel 27 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Desa Leppangan	76
Tabel 28 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Desa Leppangan	77
Tabel 29 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Desa Leppangan.....	77
Tabel 30 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Leppangan	78
Tabel 31 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Desa Leppangan	78
Tabel 32 konsumsi karbohidrat per bulan di Desa Leppangan	79
Tabel 33 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Desa Leppangan	79
Tabel 34 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Desa Leppangan	80
Tabel 35 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Desa Leppangan.....	80
Tabel 36 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Desa Leppangan.....	80
Tabel 37 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Desa Leppangan	81
Tabel 38 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Desa Leppangan.....	81

Tabel 39 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Desa Leppangan.....	81
Tabel 40 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Leppangan.....	82
Tabel 41 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Leppangan.....	82
Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Desa Leppangan.....	83
Tabel 43 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Leppangan.....	84
Tabel 44 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Leppangan.....	85
Tabel 45 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Leppangan.....	86
Tabel 46 Kalender Musim Leppangan.....	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Desa Leppangan secara administratif berada di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Binanga dan Pundau di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Desa Paminggalan, bagian selatan berbatasan dengan Lalatedzong dan Puttada, dan bagian barat berbatasan langsung dengan berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Desa ini terdiri dari 4 dusun. Desa ini terletak di Kecamatan Sendana. Luas Desa Leppangan sebesar 841,815 hektar. Masing-masing dusun memiliki luasan wilayah: Dusun Tammeambe = 70,353 hektar; Dusun Leppangan = 9,69 hektar; Dusun Leppangan Timur = 44,071 hektar; Dusun Tomarese = 717,701 hektar.

Jumlah keluarga di Desa Leppangan adalah 225 keluarga. Dari 225 keluarga yang tinggal terdapat 766 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 373 jiwa dan perempuan sebanyak 393 jiwa. Piramida penduduk Desa Leppangan menggambarkan bahwa terdapat 515 jiwa usia produktif. Sedangkan usia non produktif sebanyak 251 jiwa. Usia non produktif berkisar dari usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun.

Penduduk Desa Leppangan mayoritas makan dengan frekuensi 3 kali sehari, kemudian 2 kali sehari dan frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari relatif sedikit. Terdapat 210 KK dengan frekuensi makan 3 kali sehari, 12 KK dengan frekuensi makan 2 kali sehari kemudian 3 KK dengan frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari. Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Leppangan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D-1/D-2/D-3, D-4/S-1, dan S-2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Leppangan sebanyak 766 jiwa, mayoritas penduduk Desa ini sebanyak 253 jiwa (33.03 persen) tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit hanya sebanyak 14 jiwa (1.83 persen) untuk kategori penduduk memiliki ijazah D-1/D-2/D-3. Sementara itu, untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat di Desa Leppangan terdapat 217 jiwa (28.33 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMA/Sederajat sebanyak 162 jiwa (21.23 persen), ijazah SMP/Sederajat sebanyak 86 jiwa (11.23 persen), ijazah D-4/S-1 sebanyak 34 jiwa (4.53 persen).

Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 638 jiwa yang tidak mengikuti keikutsertaan. 529 jiwa merupakan Penerima Bantuan Iuran yang tersebar proporsional di setiap dusun. Sebanyak 31 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 54 jiwa sebagai PUIK Negara dan 24 jiwa sebagai PUIK Swasta.

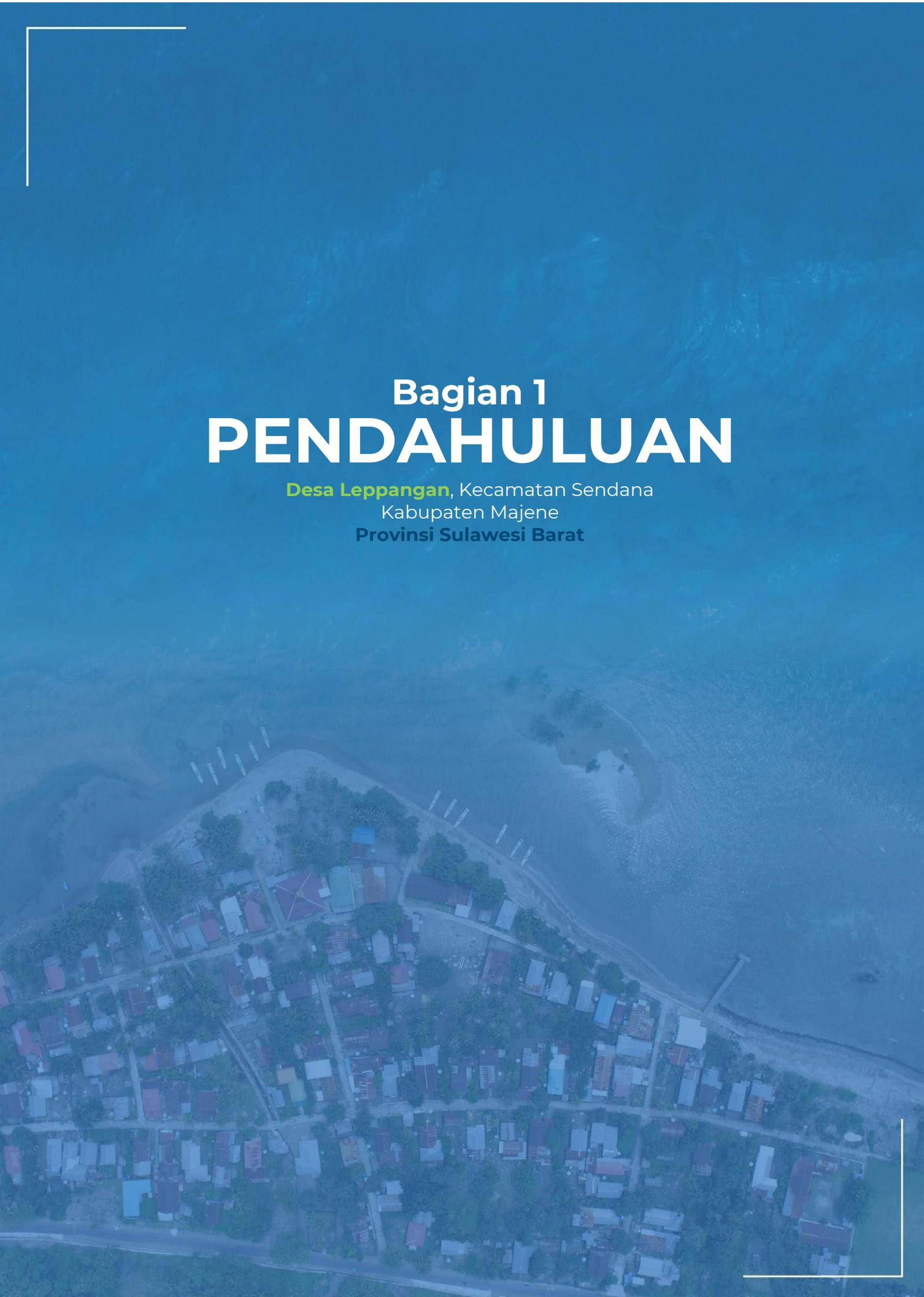
Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Desa Leppangan terbagi dalam 9 kategori keikutsertaan, yakni LSM/ NGO, Kelompok Tani, Kelompok Buruh, ORMAS, Koperasi/ Lembaga ekonomi lokal, kelompok pengajian, karang taruna, kelompok olahraga/hobi, gotong royong, siskamling, musdes/musdus, dan kelompok seni budaya. Berdasarkan dari total jumlah keluarga di Desa Leppangan yakni sebanyak 220 keluarga, di dalamnya terdapat keluarga yang memang mengikuti satu atau lebih organisasi sekaligus. Meskipun begitu, kategori kelompok tani masih menjadi kategori terbanyak di antara kategori keikutsertaan organisasi lainnya. Adapun untuk jumlah keluarga yang termasuk anggota kelompok tani di Desa Leppangan sebanyak 110 keluarga. Pada kategori keikutsertaan kelompok Pengajian yakni sebanyak 33 keluarga. Selanjutnya, pada kategori keikutsertaan Karang Taruna sebanyak 24 keluarga.

keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yakni Sungai, Jurang, Bakar, Kubur, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Terdapat 72 keluarga yang membuang sampah di sungai, 4 keluarga yang membuang sampah di jurang, 138 keluarga yang membakar sampahnya, 2 keluarga yang mengubur sampah, 1 keluarga yang membuang sampahnya di laut dan pantai, dan 8 keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS).

Data Desa Presisi merupakan Ikhtiar penyempurnaan data yang ada, karena ilmu senantiasa selalu terbarukan.

Dr. Sofyan Sjaf



An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The image shows a cluster of buildings with various colored roofs (red, blue, white) situated along a shoreline. The water is visible in the upper right, and the land extends to the bottom left. The text is centered over the image.

Bagian 1 PENDAHULUAN

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan pedesaan, permasalahan umum yang sering kali ditemukan adalah ketiadaan data presisi (Sjaf, 2019). Padahal data presisi sangat dibutuhkan dan penting untuk ketepatan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketidakakuratan dalam mengidentifikasi potensi desa dan kemauan untuk membangun data presisi membuat dokumen penting pembangunan desa, baik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hanya sekedar dokumen pembangunan pedesaan yang tidak memiliki makna bagi kesejatian pembangunan pedesaan. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan pedesaan jauh dari pencapaian target yang diharapkan.

Menjawab persoalan data desa, gagasan Data Desa Presisi dengan metodologi *Drone Participatory Mapping* menjadi alternatif dalam membuka akses bagi desa untuk mampu berdaya membangun data desanya (Sjaf et al., 2020). *Drone Participatory Mapping* merupakan metodologi yang inklusif yang menempatkan pemerintah desa dan pemuda desa sebagai subjek membangun data. Pendekatan yang digunakan adalah sintesis dari pendekatan spasial, sensus, partisipasi dan teknologi digital.

Data Desa Presisi adalah jalan keluar dari kebuntuan desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan tertarget. Serta data desa presisi menjadi ruang bagi desa untuk mampu dan berdaya dalam membangun datanya sendiri yang akurat, aktual dan kontekstual. Data Desa Presisi didedikasikan untuk Desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif antara Perguruan Tinggi, Pemerintahan Desa dan pemudanya, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pihak Swasta maupun NGO.

Data desa presisi merupakan gagasan yang dilahirkembangkan oleh Dr. Sofyan Sjaf dan kawan-kawan sejak tahun 2014 pasca lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan terus disempurnakan hingga saat ini. Dalam proses membangun data desa presisi dilakukan dengan pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa

sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *artificial intelligence* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. Bahkan melalui Data Desa Presisi kebutuhan desa untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) dapat dihasilkan secara presisi berbasis Rukun Warga (RW) dan dapat ditelusuri hingga aras keluarga, *by name*, *by address* dan *by coordinate* (Sjaf et al., 2021).

Dengan pendekatan DPM ini dihasilkan Data Desa Presisi yang diterjemahkan dalam sebuah buku Monografi Desa yang menyuguhkan informasi dan data yang komprehensif yang disajikan ke dalam beberapa bab yaitu: Bab 2. Geografis Desa yang menampilkan peta-peta utama desa (peta orthophoto, peta administrasi, peta *landuse*, peta sarana prasarana dan peta topografi); Bab 3. Demografi yang menampilkan data-data kependudukan termasuk di dalamnya analisis data terkait dengan piramida penduduk, kepadatan penduduk, serta rasio beban tanggungan; Bab 4. Sandang Pangan dan Papan yang menampilkan data terkait dengan aksesibilitas keluarga terhadap pemenuhan sandang, pangan dan papan; Bab 5. Pendidikan dan Kebudayaan yang menampilkan data-data terkait sebaran tingkat pendidikan penduduk desa, partisipasi sekolah serta sebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut dan etnisitasnya; Bab 6. Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial menampilkan data-data tentang sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan, pekerjaan sampingan keterampilan sampai dengan aksesibilitas penduduk terhadap jaminan sosial dan kesehatan; Bab 7. Sosial, Hukum dan HAM menyajikan data-data tentang partisipasi berorganisasi dan aksesibilitas atas kebutuhan akan hiburan (*refreshing*); dan terakhir Bab 8. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyajikan data-data tentang aksesibilitas keluarga pada media informasi, alat telekomunikasi sampai dengan biodiversitas lahan pekarangan.

Dengan demikian data yang terjadi pada buku Monografi Desa ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi, peneliti, pegiat desa, pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa sendiri, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa.

RUMUSAN MASALAH

Sjaf (2020) menyampaikan bahwa terdapat 4 masalah utama yang dihadapi desa terkait dengan pembangunan pedesaan yaitu (1) desa maupun kawasan pedesaan tidak memiliki peta visual yang menggambarkan secara utuh sumberdaya desa. Kondisi ini disebabkan keterbatasan dan minimnya akses desa terhadap data spasial. Alhasil, perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) maupun program-program pembangunan dan bantuan tidak pernah sesuai dengan konteks kebutuhan dan tata ruang desa; (2) belum tuntasnya tapal batas dan akurasi luas desa-desa di Indonesia menyebabkan maraknya konflik vertikal ataupun horizontal; (3) lemahnya instrumen pendeteksian daya dukung desa menyebabkan desa tak mampu menolak dan melawan tekanan kapitalisasi desa; dan (4) tidak ditemukannya instrumen untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Sjaf (2017); Sampean et al. (2019); Sjaf (2019) berpandangan bahwa dengan menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 6/2014, maka dengan serta merta akan menjawab masalah yang dihadapi ketika membangun desa maupun desa membangun. Oleh karena itu, prasyarat penguatan kapasitas aparat dan warga desa merupakan agenda penting untuk menjalankan amanat sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa dan kawasan pedesaan.

Perkembangan teknologi yang pesat kini tentunya menjadi keuntungan bagi masyarakat tergantung bagaimana kita mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Sjaf (2020) menyebutkan dalam rangka menjalankan amanat UU No. 6/2014 dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemangku desa tersebut, maka dibutuhkan suatu inovasi yang mampu mendorong terciptanya perubahan mendasar pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat tujuh isu strategis yang membutuhkan data desa presisi. Berikut ini adalah ketujuh isu strategis desa, yaitu: (1) Penataan desa; (2) Perencanaan desa; (3) Kerja sama desa; (4) Investasi masuk desa; (5) BUMDes/BUMDes Bersama; (6) Kejadian luar biasa dan (7) Aset desa. Ketujuh isu strategis tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika berlandaskan data desa presisi (lihat **Tabel 1**). Berikut adalah peran data desa presisi untuk mewujudkan amanat undang-undang desa.

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi

No	Isu Strategis	Peran Data Desa Presisi
1	Penataan desa	Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas
2	Perencanaan desa	Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan desa
3	Kerja sama desa	Menyajikan potensi desa secara utuh: vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa
4	Investasi masuk desa	Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan perdesaan, dan promosi desa
5	BUMDes/BUMDes Bersama	Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerja sama
6	Kejadian luar biasa	Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/ekologis
7	Aset desa	Menyajikan data posisi dan potensi aset, jumlah luasan serta peta sebaran aset dan pemanfaatannya.

Sumber: (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Inovasi Data Desa Presisi diwujudkan melalui suatu pendekatan *drone participatory mapping*. Pendekatan ini mampu membuka ruang partisipasi seluas bagi pemangku desa dan warganya untuk bersama-sama mewujudkan “desa membangun” maupun “membangun desa” berbasis data yang presisi. *Drone Participatory Mapping* adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial serta data sensus yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* dan *Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes)*. Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa.

Sebagai upaya menyudahi permasalahan utama yang dihadapi desa dalam pembangunan pedesaan dibutuhkan basis data yang akurat dan presisi melalui inovasi Data Desa Presisi. Desa Data Desa Presisi diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas permasalahan dan potensi desa yang

selanjutnya dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah rumusan masalah yang perlu di jawab melalui Data Desa Presisi di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat:

1. Bagaimana kondisi geografis Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana kondisi demografis Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana kondisi pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
4. Bagaimana kondisi pendidikan dan kebudayaan Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
5. Bagaimana kondisi kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
6. Bagaimana kondisi kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
7. Bagaimana kondisi infrastruktur dan lingkungan hidup Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
8. Bagaimana dinamika di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?

TUJUAN PENDATAAN

Pembangunan Data Desa Presisi di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi geografis Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
2. Mengetahui kondisi demografis Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
3. Mengetahui kondisi pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
4. Mengetahui kondisi pendidikan dan kebudayaan Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
5. Mengetahui kondisi kesehatan, pekerjaan dan jaminan Sosial Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
6. Mengetahui kondisi kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
7. Mengetahui kondisi infrastruktur dan lingkungan hidup Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
8. Mengetahui dinamika di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

METODOLOGI

Pengukuran-pengukuran pembangunan diproduksi dan direproduksi pemerintah, seperti: Indeks Gini Rasio/IGR, Indeks Pembangunan Manusia/IPM, Indeks Pembangunan Desa/IPD, Indeks Desa Membangun/IDM, Indeks Pembangunan Pemuda/IPP dan lain-lain (Chambers 1995; Chambers 2006; Chambers 2008; Chambers 2013; Ruslan 2019), bertujuan untuk melihat pencapaian program pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sjaf 2017; Sampean *et al.* 2019; Sjaf 2019; Sampean dan Sjaf 2020; Sjaf *et al.* 2021). Namun demikian, pengukuran pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya, apabila data yang dijadikan sebagai rujukan perhitungan tidak akurat. Alhasil, pseudo pembangunan akan terus berlanjut dan berdampak terhadap kegagalan pembangunan (Chambers 2008).

Ketidakakuratan pengukuran capaian pembangunan disebabkan karena pengumpulan data dasar yang tidak partisipatif dan dikumpulkan berdasarkan pengakuan pemerintah desa (Sjaf 2019). Ketidakakuratan data dasar Pemerintah Indonesia diperlihatkan dari Data Potensi Desa (Podes) tahun 2018 sekitar 10,4% pertanyaan tidak terisi dari 849 pertanyaan dan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Tahun 2020 sekitar 62-65% pertanyaan tidak terisi dari 939 pertanyaan (Pitaloka 2022). Hal senada ditemukan ketidakakuratan data diperoleh dari hasil sensus *National Sample Survey Office* (NSSO) pemerintah India tingkat ketimpangan gender yang tidak merepresentasikan kondisi aktual pedesaan di India (Mehta 2021).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pedesaan memainkan peran penting sebagai representatif kehidupan warga atau subyek pembangunan (Sampean *et al.* 2019; Sampean dan Sjaf 2020). Oleh karena itu, data yang akurat sangat penting dan menentukan masa depan pedesaan, serta perwujudan tujuan pembangunan. Dengan demikian, keakurasian data memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program pembangunan (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2022).

Saat ini, perencanaan dan pengukuran pembangunan pedesaan di Indonesia menggunakan basis data Podes yang bersumber pada BPS merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (UU No. 16/1997), Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendataan Potensi Desa Tahun 2018 (Perka BPS 49/2018), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (Perpres No. 86/2007) dan Prodeskel bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan (Permendagri

No. 12/2007)(Kemendagri 2012; BPS 2021; Pitaloka *et al.* 2022). Selanjutnya kedua sumber data ini, menggunakan pendekatan sensus dengan responden aparat pemerintah desa (kepala desa/sekretaris desa/kepala urusan data desa).

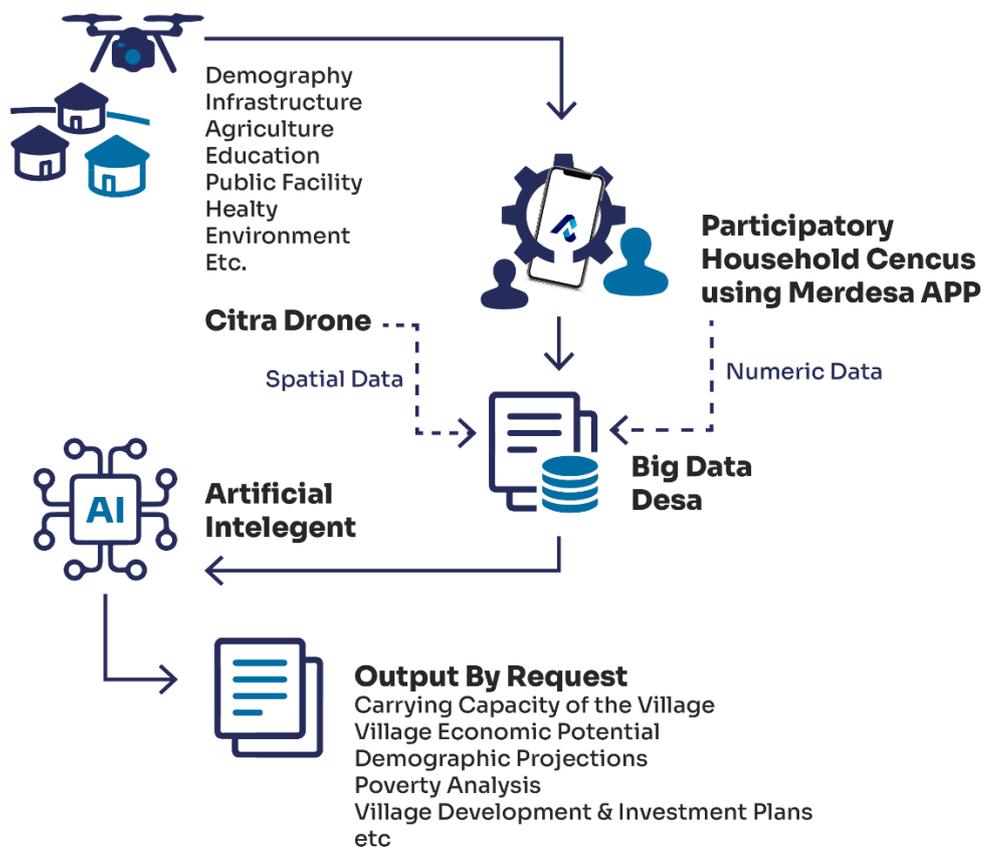
Berbeda dengan pendekatan Podes dan Prodeskel, DDP menggunakan pendekatan sensus berbasis digital yang dikawinkan dengan pendekatan spasial, serta memosisikan warga (pemuda) desa sebagai aktor pengumpul data di desa (enumerator). Selain itu, DDP menempatkan kepala keluarga sebagai responden dalam pengumpulan data.

Penggunaan Metode DDP

Penyusunan Monografi Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat menggunakan Metode DDP(Sjaf *et al.* 2022). Metode ini menitikberatkan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data pedesaan dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Penggunaan metode DDP, untuk menggali beragam parameter yang dikategorikan ke dalam lima aspek kesejahteraan rakyat, meliputi: sandang, pangan dan papan (61 parameter); pendidikan dan kebudayaan (5 parameter); kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial (44 parameter); kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM (22 parameter); serta infrastruktur dan lingkungan hidup (20 parameter). Selain itu, terdapat 24 parameter identitas keluarga yang berfungsi menerangkan informasi responden (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Untuk mengimplementasikan metode DDP, dilakukan melalui lima tahapan: (1) memproduksi citra resolusi tinggi. Instrumen yang digunakan pada tahap ini adalah teknologi *drone* untuk menghasilkan citra resolusi tinggi; (2) melakukan sensus rumah tangga berbasis partisipatif. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda desa sangat penting. Sebelum pengambilan data, dilakukan rekrutmen pemuda desa di setiap Rukun Warga (RW). Mereka yang direkomendasikan pemerintah desa dilatih untuk menggunakan instrumen aplikasi Merdesa Sensus yang kami ciptakan; (3) penyimpanan data (numerik dan spasial). Tahap ini, semua data (numerik dan spasial) disimpan ke dalam server; (4) penyusunan algoritma ukuran pembangunan desa (Sjaf *et al.* 2022). Tahap ini diorientasikan untuk membangun *artificial intelligence* bagi pembangunan desa; dan (5) membangun aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan desa (**Gambar 1**).



Gambar 1 Tahapan implementasi DDP

Selanjutnya dari **5 tahapan** di atas, penggunaan metode DDP dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu: aktivitas pemetaan berbasis *drone* (spasial); aktivitas sensus partisipatif berbasis digital; dan aktivitas penyusunan *artificial intelligence* berbasis kebutuhan desa. Adapun uraian ketiga aktivitas yang dimaksud, sebagai berikut:

1. **Aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit (spasial)**

Aktivitas ini dimulai dari mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit yang dilakukan secara partisipatif, seperti: *review* dokumen laporan, penyediaan alat dan bahan survei lapangan, dan lanskap/satuan lahan (Arham *et al.* 2019). Penyusunan survei dalam riset ini bertujuan memperoleh gambaran wilayah secara keseluruhan melalui pengumpulan informasi dari data dan peta yang tersedia/relevan, sehingga dapat membantu analisis dan pelaksanaan survei di lapangan. Kedua, interpretasi bentang alam/satuan lahan dari data DEM dan citra penginderaan jauh. Satuan wilayah dan ruang yang digunakan sebagai dasar perencanaan lapangan dan penyusunan peta desa sebagai bahan kajian untuk mendukung terbentuknya DDP. Sebelum melakukan survei perlu

dipersiapkan bahan dan peralatan agar dalam pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik. Peralatan dan bahan yang digunakan antara lain:

- Peta lokasi kegiatan (sumber: BIG);
- Citra satelit landsat (sumber: SasPlanet);
- Peta desain rencana penerbangan *drone*;
- Komputer dan Laptop yang dilengkapi oleh *software* pendukung pemetaan spasial seperti *ArcGIS Desktop*, *Global Mapper*, *Google Earth*, dan *AgisoftPhotoscan*;
- *Drone Quad Copter DJI Mavic 2 Pro* dan perlengkapannya;
- *Mobile Phone* yang dilengkapi oleh aplikasi seperti; DJIGO4, Pix4D capture, DJI+Ctrl, Avenza Maps dan Merdesa Maps; dan
- Global Positioning System (GPS) Handle: GPSMap 64s Garmin.

1.1. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei merupakan proses pengumpulan data lapangan yang merupakan rangkaian kegiatan utama pengumpulan data spasial dalam membangun DDP. Tahapan pengumpulan data lapangan meliputi:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perangkat dan masyarakat desa;
- 2) Pelacakan dan penitikan batas desa dan RW bersama masyarakat dan perangkat desa setempat dan perwakilan desa yang bertetangga;
- 3) Pemotretan udara wilayah desa menggunakan *drone*;
- 4) Pelacakan dan penitikan sarana dan prasarana umum di wilayah desa;
- 5) Identifikasi *biodiversity* kategori tanaman pohon, semai dan tanaman bawah;
- 6) FGD verifikasi data spasial desa; dan
- 7) Pembuatan peta kerja berbasis RW.

1.2. Pengolahan dan Analisis Data Spasial

Pengolahan dan analisis data spasial merupakan proses interpretasi data hasil survei lapangan dan data pendukung lainnya untuk menampilkan DDP secara geostatistik. Tahapan proses pengolahan dan analisis data spasial meliputi:

- 1) *Plotting* data tapal batas desa dan RW, identifikasi sarana dan prasarana serta *biodiversity* desa;
- 2) Mosaik foto udara;
- 3) Koreksi hasil citra *drone*;
- 4) Digitasi citra *drone* tegak dan citra satelit tegak; dan
- 5) Pembuatan peta desa.

Analisis data spasial disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa, misalnya analisis kebencanaan, tata ruang desa, potensi sumberdaya alam desa, analisis SDGs, dan lain-lain.

2. Aktivitas sensus partisipatif berbasis digital

Pendekatan sensus dalam membangun DDP adalah tindak lanjut dari pendekatan spasial. Peta kerja yang menjadi *output* pendekatan spasial dijadikan sebagai pedoman dalam pendekatan sensus. Hal ini menjadi upaya meminimalisir individu tahu setiap jiwa di desa yang terlewatkan untuk didata. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pendekatan sensus yaitu: persiapan, pelaksanaan sensus dan validasi data hasil sensus.

2.1 Persiapan Sensus dan Partisipatoris

Pada tahapan awal tim melakukan pelatihan kepada para pemuda desa perwakilan dari lingkup RW. Masing-masing RW akan direkrut 3-5 orang pemuda desa yang akan dilibatkan dalam proses sensus. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan orientasi tentang pentingnya DDP sebagai dasar perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas secara teknis dalam mengaplikasikan MERDESA Apps untuk melakukan sensus, penguatan pemahaman dalam membaca peta kerja di MERDESA Apps, dan peningkatan pemahaman *metadata*/definisi operasional parameter sensus. Pemuda desa ini nantinya akan dilibatkan dalam proses pengambilan data sensus ke setiap rumah tangga berbasis alamat, nama, dan titik koordinat di setiap RW.

Selain mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sensus. Tim peneliti membangun koordinasi kepada pihak desa untuk mempersiapkan pelaksanaan FGD. Tahapan ini, FGD dipersiapkan untuk menggali atau mengumpulkan data kualitatif desa secara partisipatif. Data kualitatif terdiri dari sejarah lokal desa, kalender musim, stratifikasi sosial, potensi ekonomi desa, kelembagaan desa, dan pohon masalah (Barlan *et al.* 2020). Dalam proses pengumpulan data kualitatif melibatkan narasumber dari tokoh-tokoh masyarakat memahami kondisi historis dan aktual kondisi desa. Kepentingan pengumpulan data kualitatif untuk mengeksplorasi ingatan kolektif warga dalam memahami situasinya desanya (Talawanich *et al.* 2019).

2.2 Pelaksanaan Sensus dan Partisipatoris

Tahapan ini dilakukan oleh para pemuda desa (enumerator) perwakilan dari setiap RW untuk mendata setiap jiwa dalam rumah tangga (sensus) yang berada di wilayah masing-masing RW. Dalam proses sensus, enumerator dibekali dengan MERDESA Sensus yang dapat diakses melalui android milik enumerator. Masing-masing enumerator akan mendatangi

setiap rumah tangga dengan menanyakan berbagai pertanyaan tentang status bangunan, identitas responden, data kepemilikan lahan, partisipasi dalam kegiatan desa, etnis, tingkat konsumsi, pekerjaan, pekerjaan sampingan, jumlah anggota rumah tangga, usia anggota rumah tangga, jumlah KK dalam rumah tangga, penyakit yang diderita, aksesibilitas pada asuransi kesehatan, sanitasi, komunikasi, kondisi tempat tinggal, frekuensi makan, menu makan, bahan bakar masak, sumber air mencuci, riwayat komoditas yang diusahakan, pendapatan non pertanian, rata-rata pengeluaran rumah tangga, serat titik koordinat rumah warga yang teridentifikasi secara otomatis dalam MERDESA Sensus. Deskripsi parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi

Sasaran Pertanyaan	Variabel	Jumlah parameter (pertanyaan)	Keterangan
Kepala Keluarga dan Keluarga secara Umum	Identitas Keluarga	22	Terkait identitas kepala keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan, dan biaya pendidikan
	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	9	Kondisi pekarangan rumah, aset ekonomi yang dimiliki, tempat pembuangan sampah, kepemilikan alat komunikasi
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	22	Status tinggal, program bantuan dan jaminan, biaya-biaya bulanan, jumlah aset kendaraan, partisipasi organisasi, hiburan, keagamaan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	36	Pekerjaan, jaminan sosial, penyakit, program kesehatan, akses dan komoditas lahan pertanian, kepemilikan ternak
	Sandang, Pangan, dan Papan	61	Jumlah pangan, tempat tinggal, sandang
	Pertanyaan Khusus Nelayan	19	Tipe nelayan, teknik budidaya dan tangkap, jenis alat tangkap, jenis ikan yang dibudidaya/ditangkap
Terkait Anggota Keluarga	Identitas Anggota Keluarga	8	Terkait identitas anggota keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	17	Pekerjaan dan kesehatan. Titik tekan kepada pemberantasan <i>stunting</i> .
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	1	Partisipasi organisasi

Selama proses sensus berlangsung, tim melakukan pengawasan dan evaluasi data yang ter-*input* dalam server, memastikan data yang ter-*input* sudah valid. Proses pengawasan dan evaluasi data sensus dilakukan oleh supervisi di dalam Aplikasi Merdesa Sensus dan secara berkala dilakukan pertemuan tatap muka dengan para enumerator desa untuk memastikan proses sensus berjalan baik.

3. Metode Validasi Data

Integrasi data spasial dan data numerik dalam metode DDP diawali dari penggunaan peta kerja yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sensus MERDESA (peta kerja digital). Peta kerja digital tersebut berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial dalam melakukan penelusuran setiap rumah dan bangunan yang ada di pedesaan. Peta kerja digital ini merupakan informasi spasial sebaran pemukiman dan bangunan lainnya dalam satuan RW/Dusun/Lingkungan di pedesaan. Data yang ditampilkan pada peta tersebut, meliputi: nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kode desa, kode pemukiman dan bangunan lainnya, dan titik koordinat (*longitude/latitude*).

Teknik penggunaan peta kerja digital berfungsi apabila enumerator sosial berada pada titik koordinat kode rumah dan bangunan lain yang sudah diberi *pin-point*. Informasi spasial dari data ini merupakan hasil digitasi persil bangunan melalui citra *drone* terkoreksi secara geometrik. Basis pemberian kode pada setiap bangunan adalah bentuk atap tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dengan teknik ini, maka jumlah total bangunan teridentifikasi secara keseluruhan berdasarkan kode tersebut. Namun demikian, setiap kode rumah dan bangunan lain yang teridentifikasi tersebut belum dapat dipastikan dengan tepat, apakah basis atap yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah bangunan per unit atau masih gabungan unit. Adapun validasi untuk memastikan hal tersebut, melalui hasil verifikasi dari enumerator sosial yang melakukan sensus untuk memastikan bahwa setiap kode sudah sesuai atau belum. Beberapa kemungkinan hasil verifikasi yang dilakukan, seperti: satu kode bangunan bisa jadi lebih dari satu bangunan. Atau sebaliknya, dua atau lebih kode bangunan yang ada bisa jadi satu kode bangunan.

Selanjutnya hasil verifikasi enumerator sosial terhadap peta kerja awal yang dibuat tim spasial, divalidasi kembali untuk memastikan bahwa setiap kode bangunan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Validasi ini mempertegas identifikasi kode bangunan yang dihuni warga atau tidak dihuni warga. Setelah verifikasi dan validasi dilakukan, informasi hasil sensus disajikan secara geostatistik sesuai kategori tematik yang dibutuhkan. Proses

integrasi data spasial dan numerik ini, tidak lain untuk menghasilkan DDP berbasis keluarga di setiap RW/Dusun/Lingkungan di pedesaan.

Untuk metode validasi data sosial dilakukan melalui: pertama, sensus yang berpedoman peta kerja digital berbasis RW. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peta kerja digital berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial untuk melakukan sensus secara *door to door*. Peta kerja ini juga mampu memverifikasi dan memvalidasi bangunan dan rumah tangga yang tidak terdigitasi; kedua, perekrutan pemuda desa sebagai enumerator sosial berbasis RW. Tujuan rekrutmen enumerator sosial berbasis RW dari pemuda desa adalah pelibatan warga sebagai subyek yang memiliki pemahaman tata ruang desa, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa, serta adanya transformasi pengetahuan dari perguruan tinggi ke warga; dan ketiga, pendampingan intensif oleh supervisor sensus. Pendampingan intensif dimulai dari proses pelatihan kepada enumerator sosial, mengorganisir enumerator sosial, perencanaan strategi penyelesaian sensus, *monitoring*, mengevaluasi, mengonfirmasi data-data yang kurang valid selama proses sensus, sampai dengan penyusunan *output* DDP.

4. Aktivitas Penyusunan Artificial Intelligence

4.1 Pengolahan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pada makalah ini, implementasi DDP mengambil studi kasus di DEsa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Sendana, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun luaran dari pendekatan spasial adalah berupa peta tematik berbasis citra *drone* dan diverifikasi secara partisipatif oleh warga desa. Adapun luaran dari pendekatan Sensus dan partisipatif berupa kumpulan lembar data yang berisikan keterangan bangunan, identitas keluarga dan individu, serta data terkait parameter sensus yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian diolah dan dikumpulkan dalam bentuk monografi sebagai luaran yang dapat disajikan secara info grafik dalam bentuk peta dasar, dan peta tematik. Lembar data yang ada dapat dianalisis lebih lanjut untuk berbagai kepentingan.

Lembar data ini menjadi lebih unggul dibandingkan metode pendataan yang dilakukan BPS karena diambil langsung oleh penduduk, serta adanya prosedur yang membuat enumerator harus benar-benar mengambil data secara satu per satu berdasarkan nama, alamat, dan titik koordinat. Begitu pun peta yang dihasilkan dari pendekatan spasial menjadi lebih unggul dibandingkan luaran data spasial BIG dikarenakan penentuan batas desa, RW, bahkan hingga RT, diverifikasi langsung oleh penduduk desa sebagaimana ketetapan atau aturan yang sudah ada dalam kemasyarakatan mereka. Dua keunggulan ini menjadikan DDP dengan pendekatan yang mengintegrasikan spasial,

kuantitatif, maupun kualitatif dapat diandalkan sebagai *baseline* perencanaan pembangunan desa.

4.2 Integrasi Data Spasial dan Sosial

Pendataan DDP menghasilkan data terintegrasi antara data spasial dan data numerik. Pengintegrasian data tersebut memberikan gambaran kondisi aktual desa. Hasil analisis dan pengimplementasi DDP memberikan potret penggunaan lahan terbangun dan non terbangun dalam satuan analisis Rukun Warga (RW) atau satuan lingkungan masyarakat. Selain itu, integrasi data spasial dan sosial juga digambarkan dari hasil sensus berbasis rukun warga yang tampilkan secara spasial dalam bentuk tematik pada setiap indikator kesejahteraan rakyat. Pada Desa Leppangan disajikan dalam satuan dusun karena dusun menjadi satuan *sodality* dalam masyarakat karena merepresentasikan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan (Tjondronegoro 1984). Dusun adalah sebuah lembaga tradisional di bawah desa yang menjadi ruang bertemunya kepentingan bersama atau ruang mediasi kultural di mana agroekologi budaya dilihat sebagai representasi dari agensi serta tindakan petani, persoalan partisipasi dalam pembangunan pedesaan dapat dilihat secara lebih luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan artikel ini melalui diskursus perkembangan metodologi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara garis besar metodologi riset penelitian dibagi menjadi tiga metode, kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*. Pada dekade tahun 1920-1930-an pendekatan kualitatif menjadi metode paling dominan dalam mengkaji kehidupan kelompok manusia. Pada dekade penggunaan metode kualitatif oleh mazhab Chicago di sosiologi mempengaruhi ilmu sosial lainnya termasuk ilmu komunikasi, pendidikan, dan kerja sosial (Denzin dan Lincoln 2009).

Pada dekade 1970-1980-an metode kualitatif mendapatkan kritikan tajam dari berbagai ilmuwan sosial. Metode ini dikritik karena para ilmuwan sosial terjebak dalam subjektivisme dan relativisme *post-modern*. Metode ini sangat kontras dengan pendekatan kuantitatif yang mengedepankan pada objektivitas yang identik dengan ekonomi dan statistik sosial. Metode kuantitatif menjadi dasar dari demografi sejarah dan sosiologi sejarah. Pasca Perang Dunia Kedua, data numerik semakin dibutuhkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial (Hudson dan Ishizu 2017).

Dekade dikotomi penggunaan metode antara kuantitatif dan kualitatif mengalami kemandekan. Gagasan penggabungan metode keduanya menjadi jalan terbaru dalam menutupi kekurangan masing-masing metode tersebut. Metode campuran (*Mixed-methods*) yang menggabungkan metodologi kuantitatif dan kualitatif memberikan peluang saling melengkapi dan mempertemukan prinsip subjektivitas dan objektivitas dalam satuan penelitian yang utuh (Creswell 2016; Creswell dan Clark 2017). Pendekatan ini menjadi dasar pengembangan metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan dalam *mixed methods* menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi oleh warga desa. Serta, dibantu pihak luar desa (misal Perguruan Tinggi). Membangun dan menghasilkan data yang akurat dan presisi hanya dapat dilakukan dengan *mixed-methods* yang menggabungkan tiga pendekatan yaitu sensus, spasial dan partisipatoris. Gabungan dari ketiga pendekatan tersebut diistilahkan sebagai pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM) (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Pendekatan ini dikembangkan sejak tahun 2014 yang sudah mengalami transformasi signifikan dalam penyempurnaan metode dalam pendataan pedesaan. Pendekatan ini mengintegrasikan antara teknologi mutakhir, *drone* dan satelit dengan kualitas citra beresolusi tinggi untuk menghasilkan data spasial. Selain itu, secara teknis dalam pengumpulan dan analisis menggunakan instrumen teknologi digital. Dari pendekatan DPM, sensus dilakukan berbasis data spasial yang dihasilkan dari instrumen *drone* atau

citra satelit beresolusi tinggi, aplikasi *marking object* (untuk mengumpulkan titik koordinat pemukiman, lokasi usaha warga, sebaran biodiversitas desa, serta data kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)(Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Pendekatan PRA digunakan untuk mengajak *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam menilai dan memutuskan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Chambers 2008; Chambers 2013) Pendekatan PRA menjadikan masyarakat desa sebagai peneliti, perencana dan juga pelaksana program bukan hanya sebagai objek pada proses pelaksanaan pemberdayaan. Pendekatan ini digunakan dalam DDP untuk mengajak masyarakat untuk menilai pembangunan desa, menyusun sejarah desa, menilai kepentingan dan pengaruh kelembagaan desa, dan membuat kalender musim sesuai konteks wilayah masing-masing. Pendekatan PRA digunakan untuk melengkapi data-data kuantitatif (data numerik dan spasial) dalam menghitung IDM dan IPD di pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan merupakan penyempurnaan pendataan yang telah dilakukan pemerintah. Bahkan, metode DDP sebagai pendekatan baru dalam proses datafikasi dalam mengumpulkan data kependudukan. Hal ini juga berbeda dengan sistem *data mining* (penambangan data) di media sosial, data-data personal dikumpulkan melalui pelacakan algoritma pencarian dan identitas pengguna media sosial. Penambangan data di media masih memiliki ketidakakuratan yang tinggi (*volacity*)(Couldry 2004; Couldry dan Powell 2014; Couldry 2020). Oleh karena itu, metode DDP tidak mengandalkan sepenuhnya teknologi digital sebagai instrumen penelitian dalam membangun *big data*. Tapi, metode DDP tetap menggunakan instrumen manusia dalam pengumpulan, validasi, verifikasi, dan konfirmasi data.

DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan

Metode DDP adalah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk mengumpulkan data desa presisi yang meliputi dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022). Metode yang mensintesis tiga pendekatan yaitu teknologi drone yang menghasilkan data spasial, sensus menghasilkan data numerik dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menghasilkan data kualitatif. Sintesis berbagai pendekatan tersebut bertujuan untuk saling menutupi kelemahan pendekatan yang ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell, (2016) bahwa metodologi *mixed-method* dilakukan untuk menghasilkan data yang komprehensif.

DDP sebagai metode dan pendekatan baru dalam pendataan pedesaan menempatkan warga sebagai subjek pendataan, membuka akses warga terhadap data, dan transformasi pengetahuan pendataan dari perguruan tinggi kepada warga desa. Selain itu, DDP mengutamakan pengorganisasian sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital mutakhir. Metode ini

sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik pembangunan pedesaan dan pengembangan sistem pendataan di Indonesia. Atas dasar ini, metode menjadi salah satu praktik dekolonisasi pendataan pedesaan. Sebab, pendekatan berupaya mengangkat permasalahan-permasalahan lokalitas sebagai basis perencanaan pembangunan. Selain itu, DDP menjadi jalan meracik merumuskan pembangunan pedesaan berbasis kebutuhan dan permasalahan dari berbagai instrumen pengukuran pembangunan. Perumusan, pengukuran, dan analisis pembangunan dilakukan di level terbawah di pedesaan sebagai satuan *sodality* masyarakat yakni di level dukuh/kampung/dusun/rukun warga/satuan lingkungan setempat (Kolopaking *et al.* 2020). *Sodality* merupakan sebagai lingkungan pemenuhan kebutuhan hidup dan lingkungan yang tunduk pada kekuasaan.

Satuan *sodality* ini digunakan DDP dalam perencanaan pembangunan berbasis rumah tangga pedesaan. Perencanaan pembangunan tersebut langsung menysasar permasalahan pokok yang dihadapi dalam rumah tangga pedesaan. Permasalahan pokok tersebut meliputi aspek kesejahteraan rakyat yakni (1) sandang, pangan, papan; (1) pendidikan dan kebudayaan; (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial; (4) kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; (5) infrastruktur dan lingkungan hidup. Lima aspek tersebut menjadi skala prioritas dalam intervensi pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan DDP diharapkan menghapus dosa para perencana pembangunan yang selalu bermain dengan angka-angka, mengabaikan kekuatan sumber daya manusia, pertumbuhan tanpa keadilan, dan berorientasi pada implementasi atau realisasi pembangunan dari pada tujuan utamanya (Haq 1976). Dosa-dosa perencana ini hanya bisa dilakukan melalui pendekatan inklusif yang dimulai dari reformasi pendekatan pendataan pedesaan. Pendekatan ini melanjutkan reformasi demokrasi substansial desa melalui DDP (Hakim 2022). Demokrasi substansial dalam pendataan pedesaan artinya membangun sistem pendataan yang inklusif menempatkan warga sebagai subjek pendataan dan pembangunan.

S E L A T M A K A S S A R



**DATA DESA
PRESISI**
LPPM IPB University

An aerial photograph of a coastal village, likely Desa Leppangan, showing numerous houses with colorful roofs (red, blue, green) clustered together. A boat dock with several white boats is visible on the left side of the image. The background shows a large body of water, possibly a bay or a large river mouth. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Bagian 2

GEOGRAFI DESA

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

GEOGRAFI DESA

2.1 Sejarah Desa Leppangan

Desa Leppangan memiliki sejarah panjang, mulai dari awal kedatangan masyarakat sebelum menjadi otonom sendiri hingga mulai berkembang sampai saat ini. Desa Leppangan terbentuk pada tahun 2010 hasil pemekaran Desa Puttada. Nama Desa Leppangan di ambil dari sejarah perkembangan daerah tersebut, Desa Leppangan selain diambil dari nama Dusun Puttada Lama pada saat itu, memiliki Tradisi yang disebut “Sossorang Cakkuriri”. Tradisi Sossorang Cakkuriri dilaksanakan empat hingga lima tahun sekali yang dirayakan oleh masyarakat dari daerah Mosso hingga Tubo yang dilaksanakan di Desa Puttada, Desa Leppangan dijadikan tempat persinggahan (Leppangan) dalam Bahasa suku mandar kala itu. Secara otonom Desa Leppangan adalah satu dusun dari Desa Puttada, Desa Puttada sendiri sudah mengalami dua kali pemekaran yaitu yang pertama di bagi dua antara Desa Puttada dan Desa Pundau dampaknya Desa Leppangan pindah secara Administrasi ke Desa Pundau, pemekaran kedua pada tahun 2010 Desa Puttada dan Desa Pundau masing-masing di bagi tiga dimana Desa Leppangan berdiri sendiri hingga 2011 menjadi Desa Otonom sendiri secara administrasi.

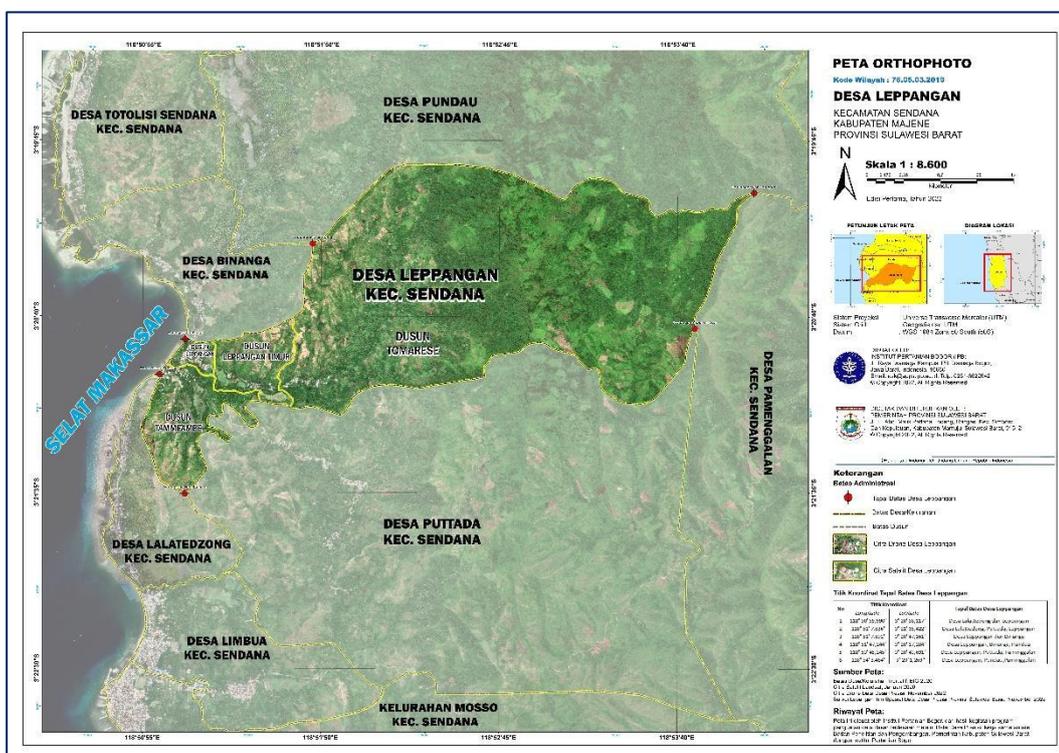
Awal tahun 2010 pengusulan pembentukan Desa Leppangan ke pemerintah Kabupaten Majene pada Bulan November 2010 di tetapkanlah Desa Leppangan Secara deponitif dengan terbitnya Perda tentang Pemekaran Desa dikabupaten Majene, selain itu Pemerintah Kabupaten Majene memilih Pak Rusman sebagai pelaksana Tugas Desa Leppangan yang juga pak Rusman ini adalah Sekretaris Kecamatan Sendana dan menjabat selama satu tahun. Pada Bulan Oktober 2011 berakhirnya masa jabatan pak Rusman sebagai Pelaksana tugas dan pada bulan November 2011 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Leppangan pertama kali, pemilihan Kepala Desa saat itu memiliki antusias tersendiri bagi masyarakat Desa Leppangan di buktikan dengan majunya empat calon Kepala Desa dan pada akhirnya Terpilih pak Albi, S.E sebagai Kepala Desa definitif, pelantikan pak Albi, S.E juga merupakan kado terbaik untuk dirinya dimana tanggal Pelantikan dirinya sebagai Kepala Desa diwaktu yang sama pada tanggal 8 Desember 2011 merupakan hari tanggal lahir bapak Albi, S.E.

Pada tahun 2018 gempa bumi dari Palu juga berdampak di Desa Leppangan. Mengakibatkan warga yang berpenghuni di bagian pesisir mengungsi mencari daratan yang lebih tinggi, Selanjutnya bencana yang pernah terjadi di Desa Leppangan yaitu pada tahun 2022 terjadi banjir, dari peristiwa tersebut

mengakibatkan dua rumah memindahkan rumahnya pasca banjir tersebut, dan terakhir adalah pandemi Covid-19.

2.2 Peta Orthophoto Desa Leppangan

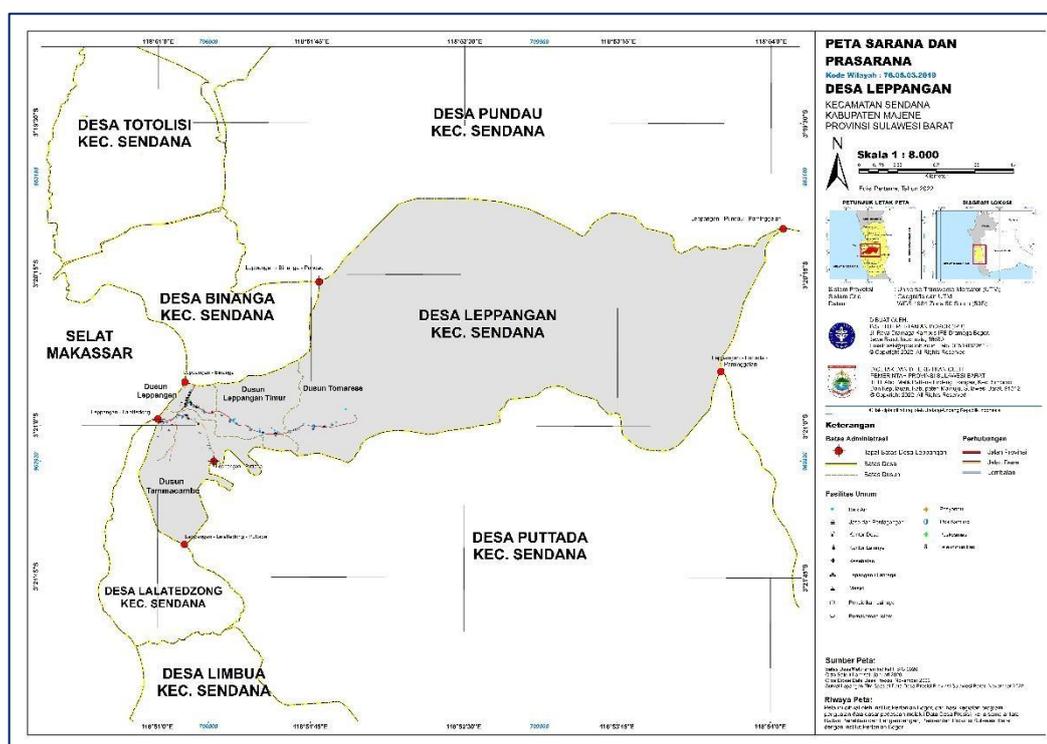
Peta *Orthophoto* Desa Leppangan dihasilkan dari foto udara yang diakuisisi menggunakan *drone* lalu digabungkan dengan citra satelit *Landsat* yang diunduh menggunakan perangkat lunak *SAS Planet* (Gambar 2). Penggabungan citra dan pengolahan peta *orthophoto* dilakukan menggunakan perangkat lunak *ArcGIS 10.8*. Hasil foto udara maupun citra menunjukkan 67,97% wilayah desa Leppangan didominasi oleh kawasan hutan Lindung, lalu 9,18% adalah wilayah perkebunan dan kebun campuran serta 0,3% adalah Pemukiman. Garis berwarna kuning-hitam pada Gambar 2, menunjukkan batas antara desa, dan garis putus abu-abu merupakan batas antara dusun.



Gambar 2 Peta orthophoto Desa Leppangan

Desa Leppangan dibagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Tammeambe, Dusun Leppangan, Dusun Leppangan Timur, dan Dusun Tomarese. Desa Leppangan berbatasan dengan 5 desa lainnya. Adapun tapal batas Desa Leppangan dengan desa lainnya dengan ditandai titik merah (Gambar 2). Wilayah pemukiman Desa Leppangan menyebar mengikuti jalan poros Mejene – Mamuju.

Leppangan. Fasilitas Sumber Air yang tersebar di tiap dusun yang ada di Desa Leppangan. Fasilitas keamanan terdapat di tiap dusun yaitu Pos Keamanan. Fasilitas pendidikan yang berada di Desa Leppangan adalah sanggar seni di dusun Leppangan Timur. Fasilitas Selanjutnya yaitu jasa dan perdagangan di Desa Leppangan yang berjumlah 44 usaha terdiri dari warung makan, bengkel motor, pangkas rambut, kios campuran, serta usaha sarang burung walet. Adapun usaha milik masyarakat Desa Leppangan berlokasi secara menyebar pada keempat dusun yang ada di Desa Leppangan. Rincian ringkas jumlah fasilitas umum setiap dusun dapat dilihat pada Tabel 1, selanjutnya titik lokasi jalan rusak yang dijumpai dalam wilayah Desa Leppangan dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Desa Leppangan

Tabel 3 Jumlah fasilitas umum setiap pada 4 dusun yang terletak di Desa Leppangan

No	Infrastruktur	Dusun				Total
		Tammeambe	Leppangan	Leppangan Timur	Tomarese	
1	Keamanan	2	2	3	2	9
2	Kesehatan	-	3	-	1	4
3	Olahraga	1	-	-	-	1
4	Pendidikan	-	-	1	-	1
5	Pemakaman	2	-	2	2	6
6	Peribadatan	1	1	1	-	3
7	Perkantoran	-	1	1	-	2

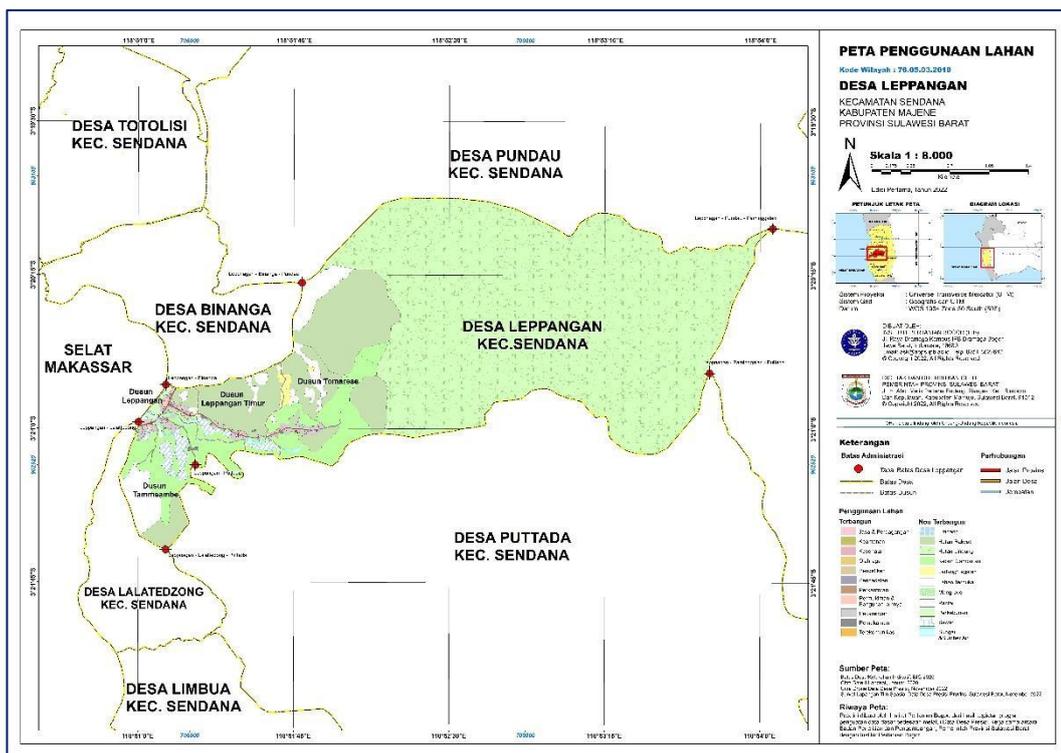
8	Sumber Air	2	3	8	6	19
9	Telekomunikasi	1	-	-		1
10	Unit usaha	15	18	5	6	44
	Total	24	28	21	17	90

Tabel 4 Titik Koordinat lokasi jalan rusak yang terdapat di Desa Leppangan

No.	Titik Awal		Titik Akhir		Panjang (m)
	longitude	latitude	longitude	latitude	
1.	118.8515981860	-3.3490386483	118.8515981860	-3.3490386483	1
2.	118.8518974310	-3.3487276610	118.8518974310	-3.3487276610	1,2
3.	118.8545784220	-3.3488222920	118.8545775000	-3.3486520110	18,8
4.	118.8543747040	-3.3520181399	118.8545186100	-3.3522314036	28,4
5.	118.8662506850	-3.3483698184	118.8661589790	-3.3487976475	48,4

2.5 Peta Penggunaan Lahan Desa Leppangan

Jenis penggunaan lahan di Desa Leppangan dibagi menjadi dua kategori yaitu terbangun dan non-terbangun, kemudian terdiri dari 25 jenis (Gambar 5). Sebanyak 14 jenis lahan terbangun yang terdiri dari olahraga, perkantoran, pekarangan, pemakaman, permukiman, pendidikan, peribadatan, kesehatan, keamanan, jalan utama, jalan lainnya, jembatan, jasa dan perdagangan, dan telekomunikasi dengan luas total 13,934 Ha, sedangkan pada jenis lahan non terbangun terdiri dari mangrove, hutan lindung, hutan rakyat, perkebunan, kebun campuran, ladang, lahan kosong, pantai, sumber air, sawah, dan sungai luasan 827,880 Ha. Luas Penggunaan lahan yang ada di Desa Leppangan dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Desa Leppangan

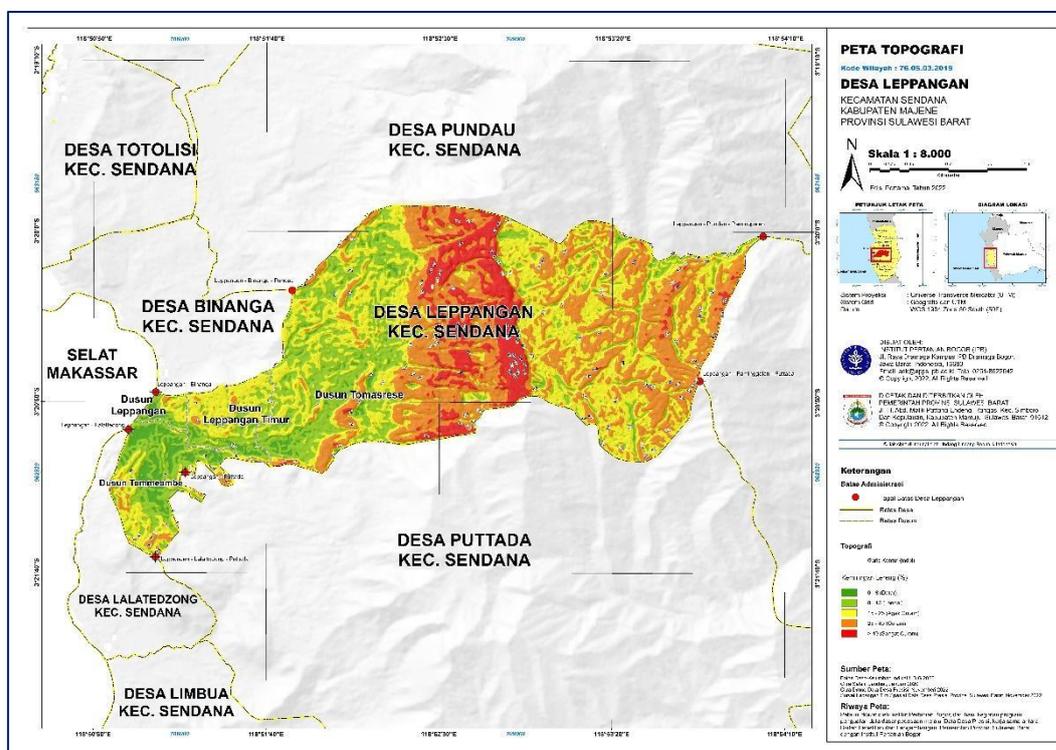
Tabel 5 Luas Penggunaan Lahan di Desa Leppangan

Jenis Penggunaan Lahan	Tammeambe	Leppangan	Leppangan Timur	Tomarese	Total
Hutan Rakyat	9.379	2.902	29.199	84.891	126.371
Jalan	0.108	0.301	0.285	0.266	0.960
Jalan Lainnya	0.385	-	-	-	0.385
Jembatan	0.047	-	-	-	0.047
Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	572.199	572.199
Keamanan	0.003	0.002	0.005	0.002	0.011
Kebun Campuran	33.873	0.688	4.339	36.676	75.576
Kesehatan	-	0.042	-	0.001	0.043
Ladang	-	-	0.835	1.968	2.803
Lahan Kosong	14.009	0.923	2.587	17.623	35.143
Olahraga	0.015	-	-	-	0.015
Pantai	0.231	0.307	-	-	0.537
Pekarangan	2.838	1.832	1.444	2.826	8.941
Pemukaman	0.263	-	0.197	0.072	0.532
Pemukiman	0.635	0.955	0.450	0.548	2.587
Pendidikan	-	-	0.005	-	0.005
Peribadatan	0.042	0.043	0.043	-	0.129
Perkantoran	-	0.013	0.047	-	0.060

Perkebunan	0.171	1.595	-	-	1.766
Sawah	6.602	-	3.606	-	10.208
Sungai	1.683	-	1.015	0.579	3.277
Telekomunikasi	0.006	-	-	-	0.006
Unit Usaha	0.062	0.086	0.014	0.051	0.213
Total	70.353	9.690	44.071	717.701	841.815

2.6 Peta Topografi Desa Leppangan

Peta Topografi Desa Leppangan dibentuk menggunakan data *Digital Elevation Model* (DEM). Data ini diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang biasa dikenal dengan DEM Nasional (DEMNAS). Data DEMNAS memiliki resolusi spasial sebesar 8 meter. Berdasarkan hasil kemiringan yang diperoleh Desa Lalatedzong berada pada kemiringan antara 0 – 840 mdpl. Pada peta topografi terdapat warna hijau yang menunjukkan daerah tersebut memiliki tingkat kemiringan sangat rendah yang tergolong dalam kategori datar, kategori ini berada pada kisaran kemiringan 0 – 8 mdpl. Kategori datar merupakan wilayah pemukiman, sedangkan daerah kategori curam merupakan dataran tinggi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun (Gambar 6). Wilayah Desa Leppangan berdasarkan peta topografi yang di tampilkan merupakan daerah pegunungan yang curam. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan terjadinya erosi sehingga perlu perhatian lebih terhadap pemeliharaan alam sekitarnya.



Gambar 6 Peta Topografi Desa Leppangan

An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The image shows a cluster of buildings with various colored roofs (red, blue, green) situated along a shoreline. The water is visible to the right, and there are some structures that look like a pier or dock extending into the water. The overall tone is a deep blue, giving it a serene and somewhat abstract appearance.

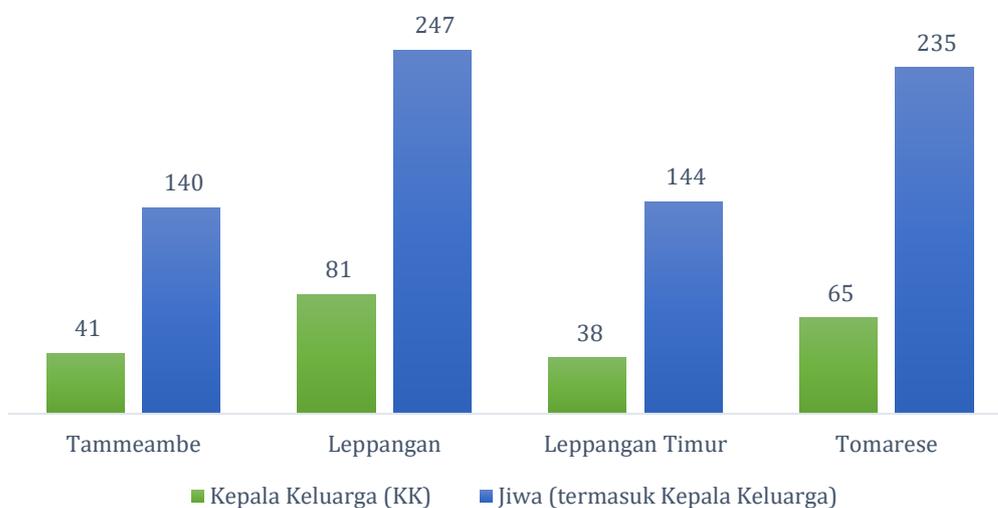
Bagian 3 DEMOGRAFI DESA

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

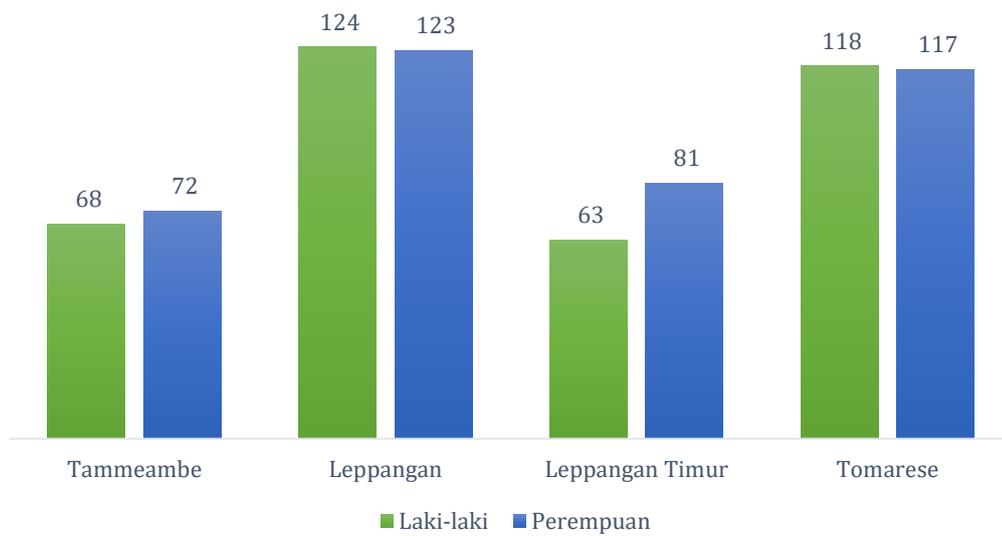
DEMOGRAFI DESA

Hasil sensus DDP tahun 2022 di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene menunjukkan kepala keluarga (KK) sebanyak 225 dengan jumlah penduduk sebesar 766 jiwa. Sebaran jumlah KK dan jumlah penduduk per dusun di daerah tersebut dapat dilihat Gambar 7. Wilayah paling banyak KK dan penduduk di Desa Leppangan terdapat di Dusun Leppangan sendiri dengan jumlah KK sebanyak 81 jiwa dan penduduk sebanyak 247 jiwa. Dan, wilayah paling sedikit terdapat pada Dusun Tammeambe dengan jumlah penduduk sebanyak 140 jiwa.

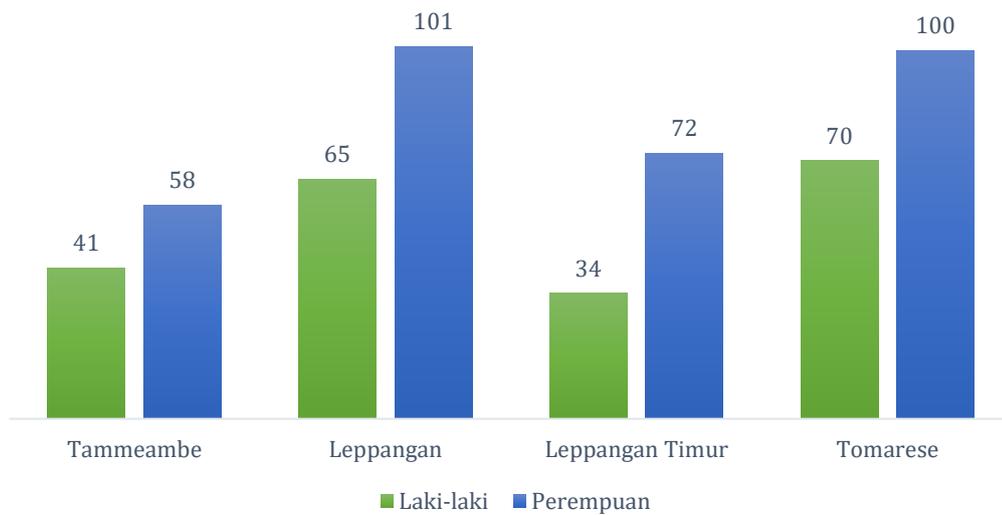
Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Leppangan Jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu 393 Jiwa dan laki-laki sebanyak 373 jiwa. Adapun pada gambar 8 menunjukkan sebaran penduduk laki-laki dan perempuan di desa Leppangan tidak merata. Piramida kependudukan untuk menunjukkan struktur penduduk berdasarkan kategori jenis kelamin dan kategori usia tertentu. Pengelompokan ini juga disajikan dalam DDP pada gambar 10. Pada gambar 10 menunjukkan usia produktif (15-64 tahun) Desa Leppangan sebanyak 515 Jiwa dan usia non produktif (Usia muda dan usia tua) sebanyak 251 jiwa.



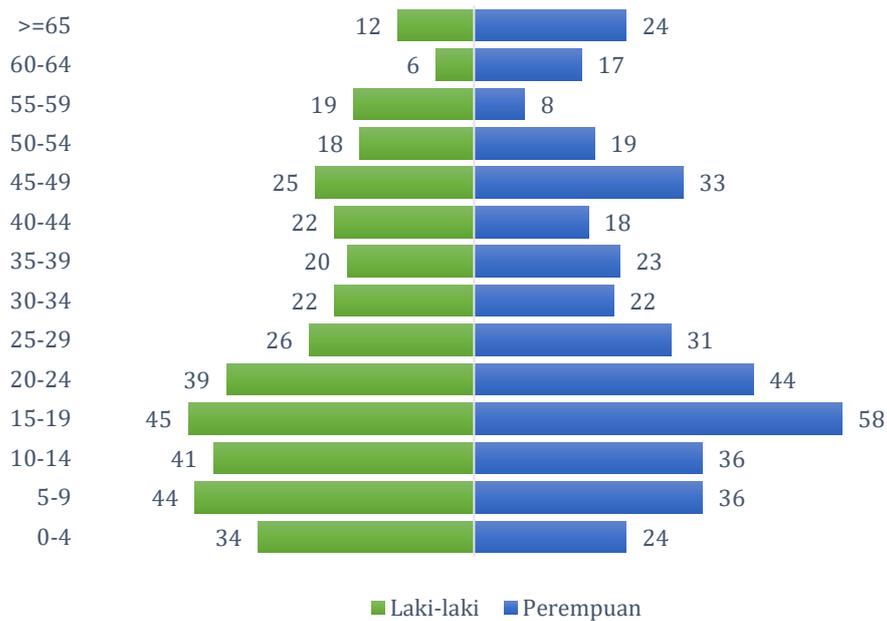
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap dusun di Desa Leppangan



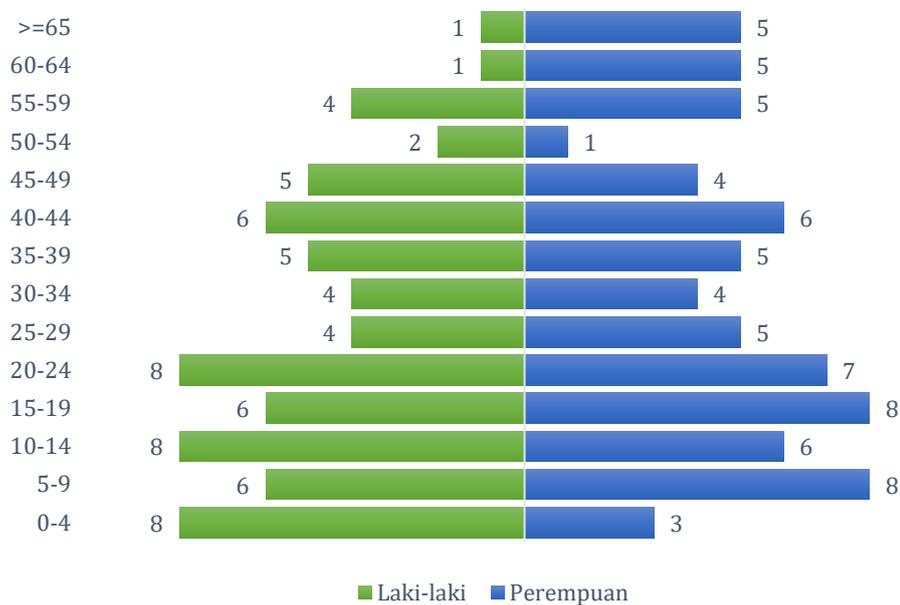
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Leppangan



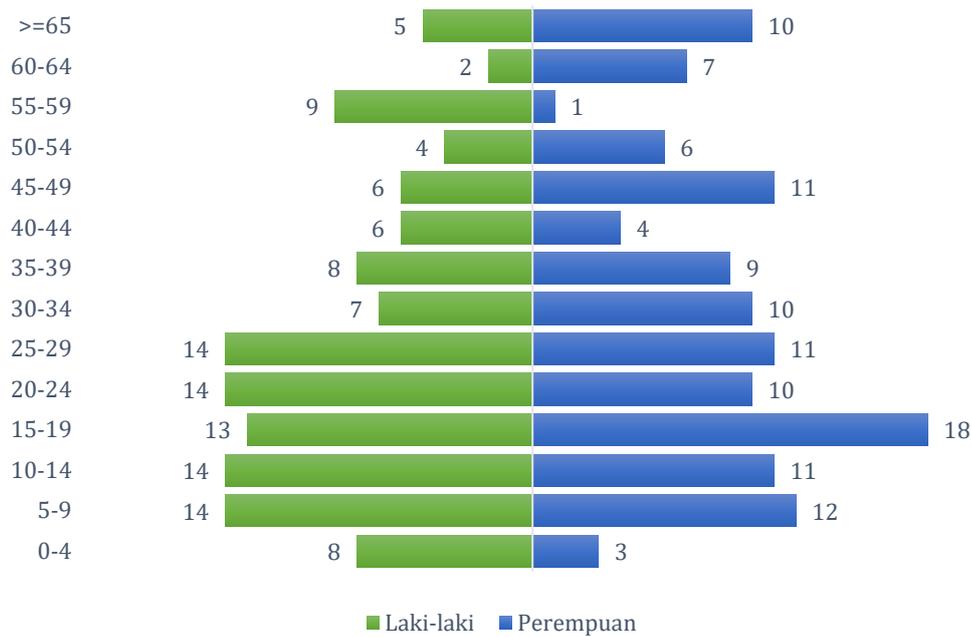
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Desa Leppangan



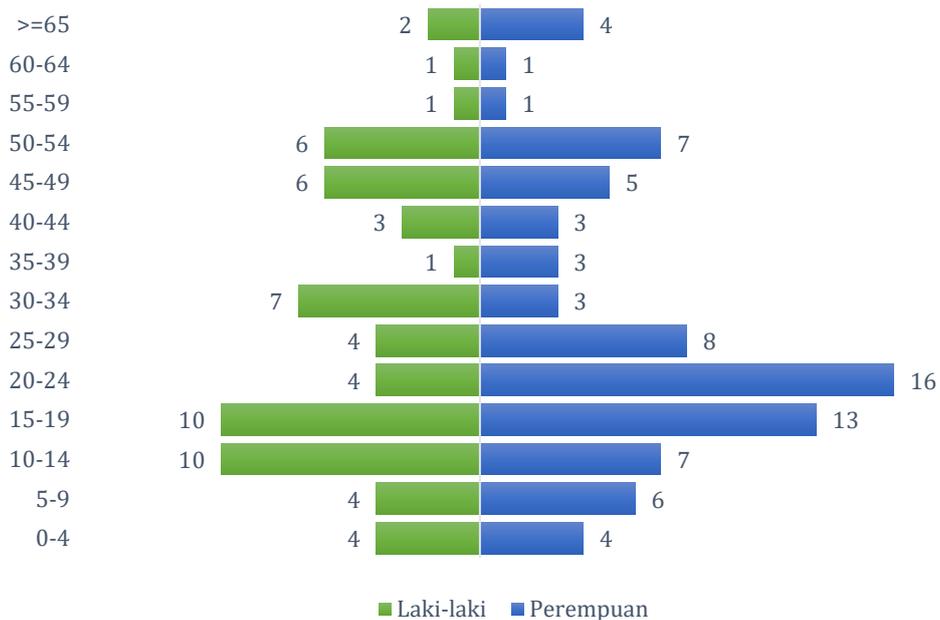
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Desa Leppangan



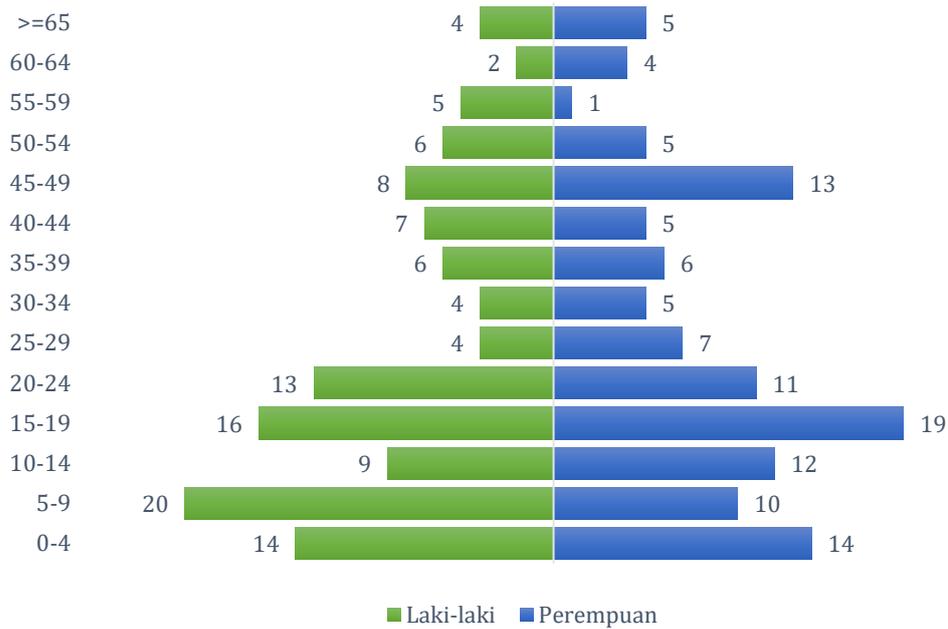
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun Tammeambe



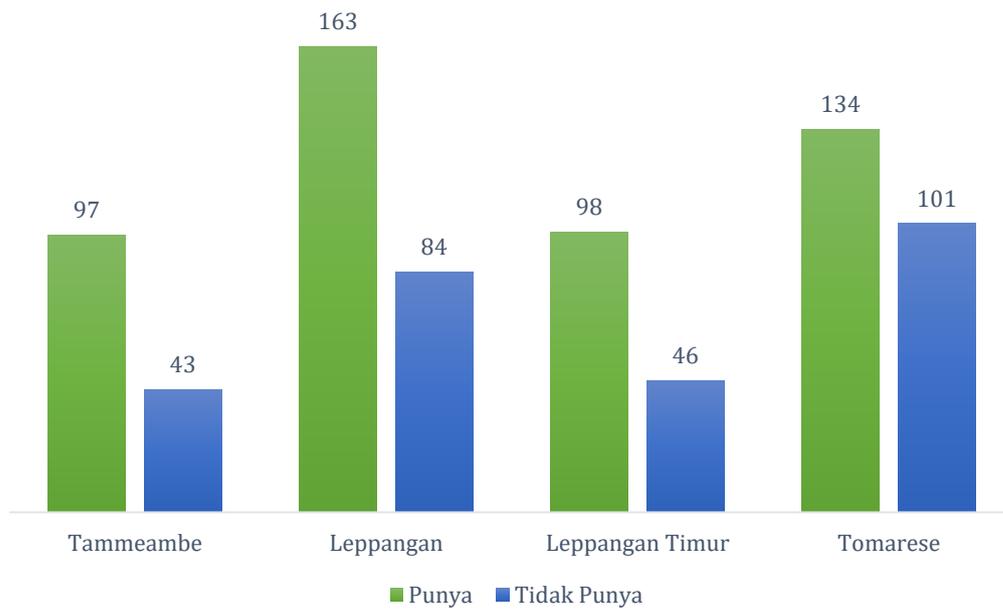
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun Leppangan



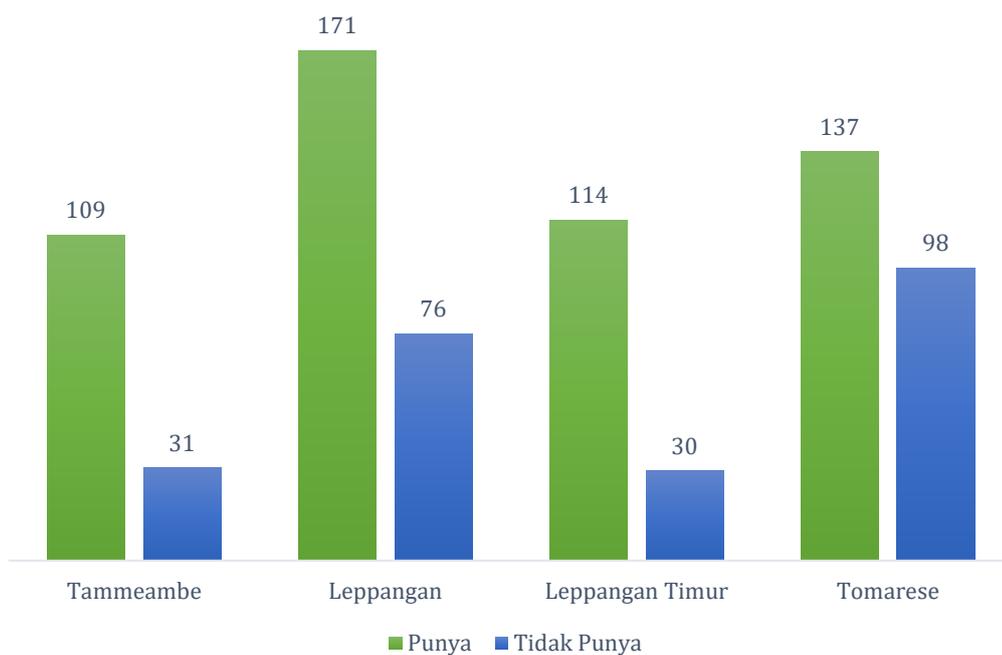
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun Leppangan Timur



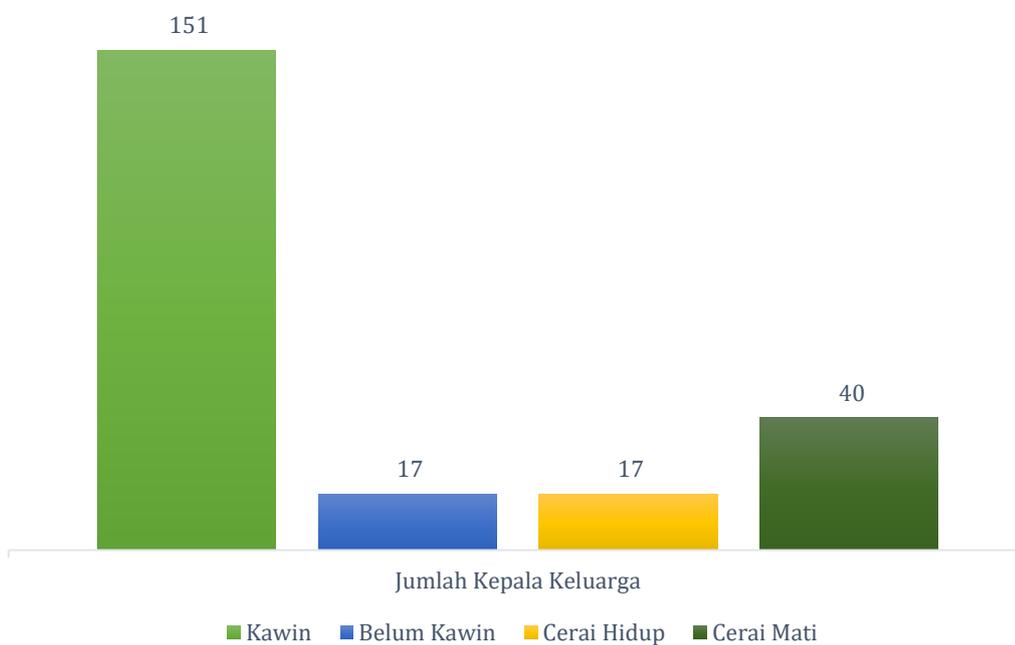
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun Tomarese



Gambar 15 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan KTP di Desa Leppangan



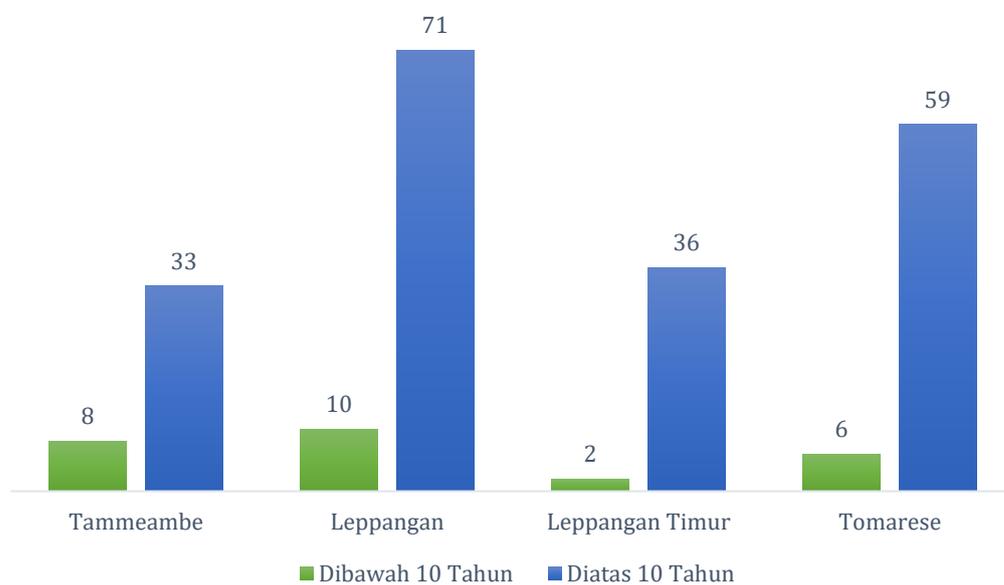
Gambar 16 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Leppangan

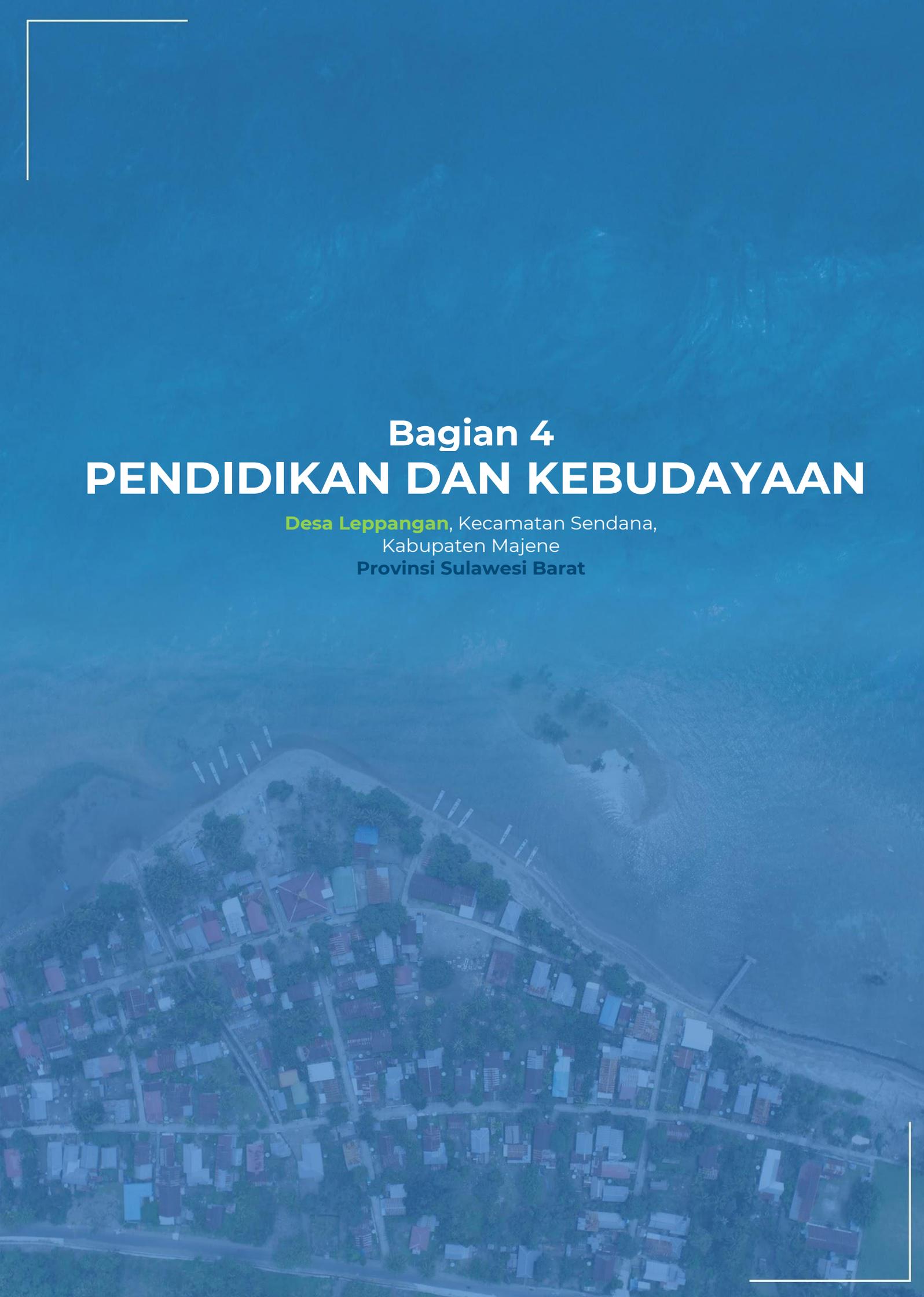


Gambar 17 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin di Desa Leppangan

Tabel 6 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Desa Leppangan

RW	Status Kawin Penduduk				Total
	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Leppangan	56	8	4	13	81
Tammeambe	27	3	5	6	41
Leppangan Timur	26	3	1	8	38
Tomarese	41	3	7	13	65
Total	151	17	17	40	225

**Gambar 18** Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Desa Leppangan

An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The image shows a cluster of buildings with various colored roofs (red, blue, green) situated along a shoreline. The water is a deep blue, and the sky is a lighter blue. The text is overlaid on the upper half of the image.

Bagian 4

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana,
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

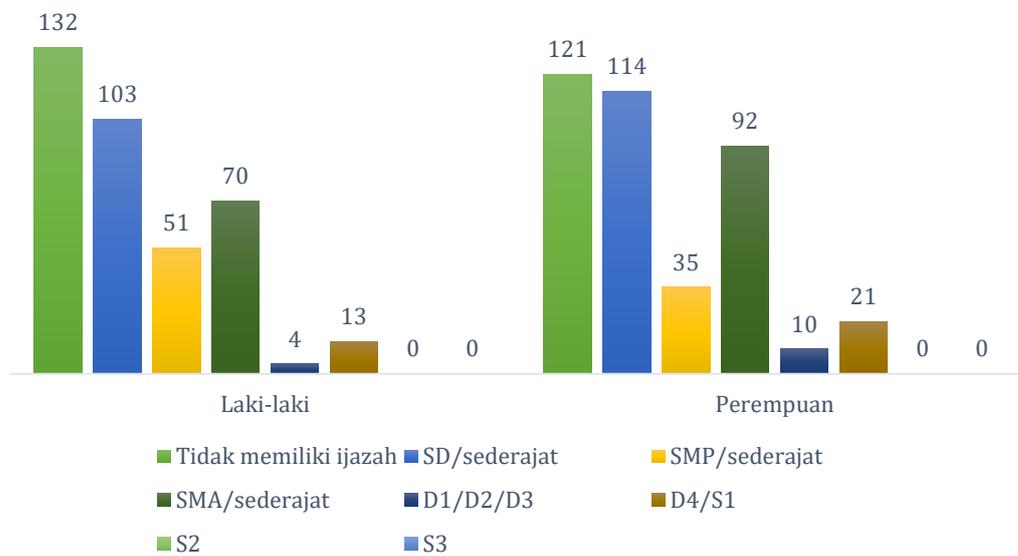
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ijazah sekolah merupakan surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan masa studi atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah negeri maupun swasta. Persebaran jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir pada Desa Leppangan terdiri dari tidak memiliki ijazah, ijazah SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D1/D2/D3, dan D4/S1. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Leppangan sebanyak 766 jiwa, mayoritas penduduk desa ini sebanyak 253 jiwa (33.03 persen) tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit hanya sebanyak 14 jiwa (1.83 persen) untuk kategori penduduk memiliki ijazah D-1/D-2/D-3. Sementara itu, untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat di Desa Leppangan terdapat 217 jiwa (28.33 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMA/Sederajat sebanyak 162 jiwa (21.23 persen), ijazah SMP/Sederajat sebanyak 85 jiwa (11.23 persen), ijazah D-4/S-1 sebanyak 35 jiwa (4.44 persen).

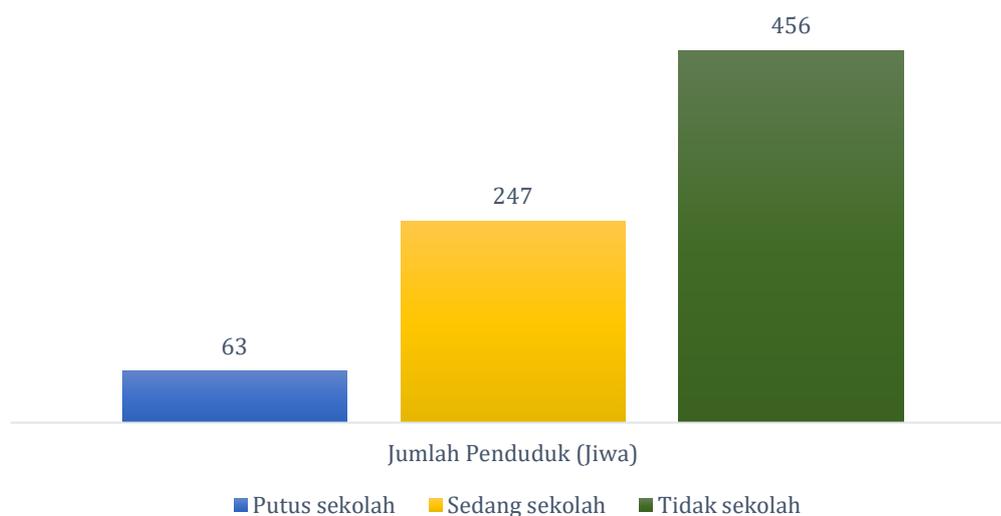
Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Leppangan hanya ada satu agama yakni Agama Islam, berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Leppangan sebanyak 766 jiwa. Sedangkan etnisitas atau suku bangsa merupakan kelompok-kelompok manusia berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Etnisitas di Desa Leppangan mayoritas Suku Mandar, adapun etnisitas terdiri dari tiga suku yaitu Mandar, Bugis, dan Toolaki Kendari. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Leppangan sebanyak 766 jiwa, mayoritas penduduk Desa ini sebanyak 761 jiwa merupakan Etnis Mandar, diikuti oleh Bugis sebanyak 4 jiwa, dan Tolaki Kendari sebanyak 1 jiwa.

Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Leppangan

Dusun	Tidak memiliki ijazah	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	D1/D2/D3	D4/S1	S2	S3
Leppangan	74	61	30	59	9	14	0	0
Tammeambe	36	37	16	35	5	12	0	0
Leppangan Timur	40	33	19	43	0	9	0	0
Tomarese	103	87	20	25	0	0	0	0



Gambar 21 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Desa Leppangan



Gambar 22 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Leppangan

Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Leppangan

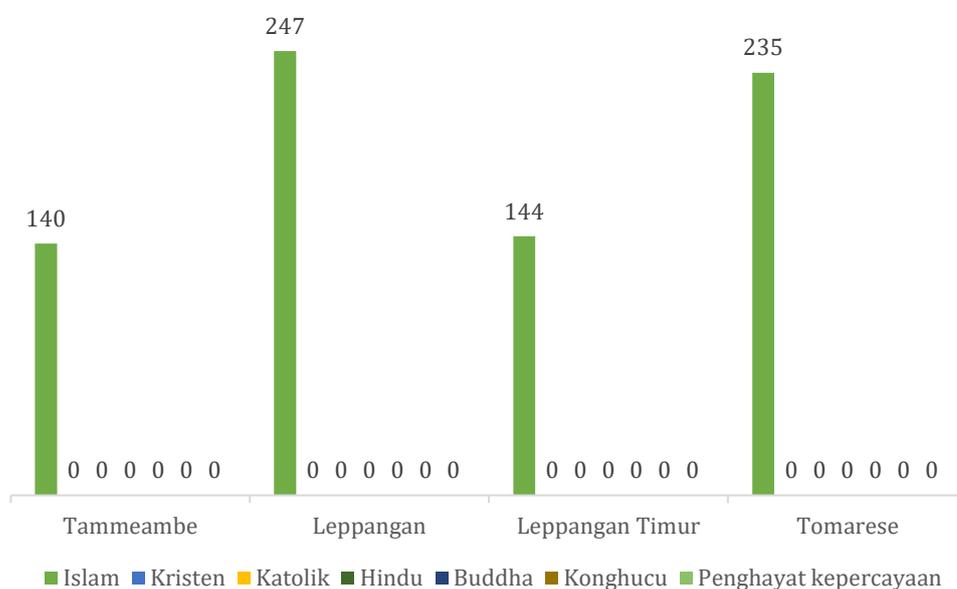
Dusun	Putus sekolah	Sedang sekolah	Tidak sekolah
Leppangan	24	73	150
Tammeambe	4	48	88
Leppangan Timur	14	55	75
Tomarese	21	71	143



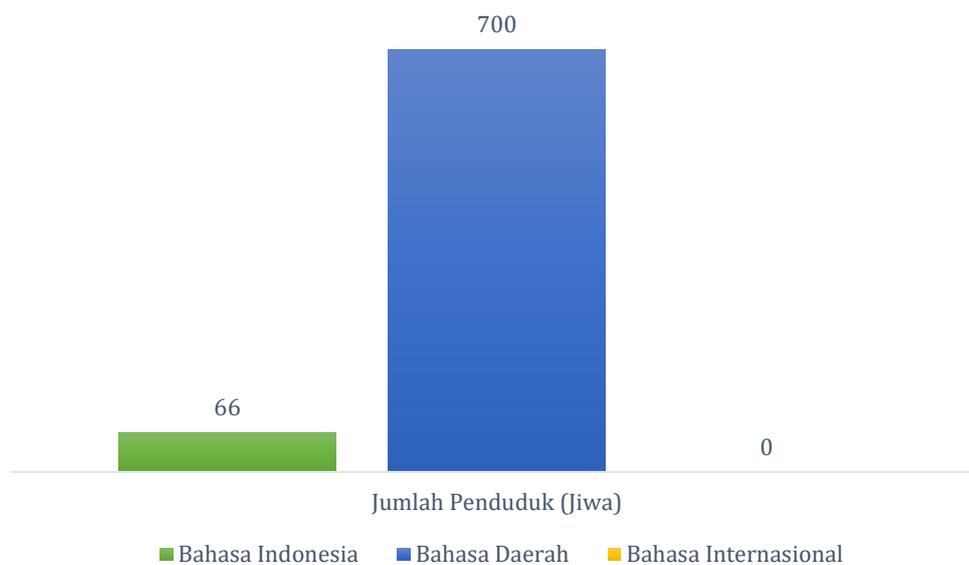
Gambar 23 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Desa Leppangan

Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Desa Leppangan

Dusun	Mandar	Bugis	Tolaki Kendari
Leppangan	244	2	1
Tammeambe	139	1	0
Leppangan Timur	143	1	0
Tomarese	235	0	0
TOTAL	761	4	1



Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Leppangan



Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Desa Leppangan

Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Desa Leppangan

Dusun	Bahasa Indonesia	Bahasa Daerah	Bahasa Internasional
Leppangan	34	213	0
Tammeambe	30	110	0
Leppangan Timur	0	144	0
Tomarese	2	233	0
TOTAL	66	700	0



An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs, surrounded by trees and a sandy beach. The ocean is visible in the background. The text is centered over the image.

Bagian 5

INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tempat membuang sampah merupakan tempat untuk menampung serta membuang sampah. Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yakni Sungai, Jurang, Bakar, Kubur, pantai/laut dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan tersebar di semua Dusun. Berdasarkan Gambar 27, terdapat 1 KK yang membuang sampah di pantai/laut, 2 KK yang membuang sampah di kubur, 4 KK yang di jurang, 8 KK yang membuang sampah ditempat pembuangan sampah (TPS), 72 KK yang membuang sampah di sungai, dan mayoritas membakar sampahnya sebanyak 138 KK.

Jumlah keluarga berdasarkan alat komunikasi yang dimiliki di Desa Leppangan terbagi dalam 2 (dua) kategori, yakni memiliki dan tidak memiliki ponsel. Berdasarkan Gambar 28, sebanyak 375 warga Desa Leppangan tidak memiliki ponsel. Sedangkan 391 keluarga memiliki ponsel.

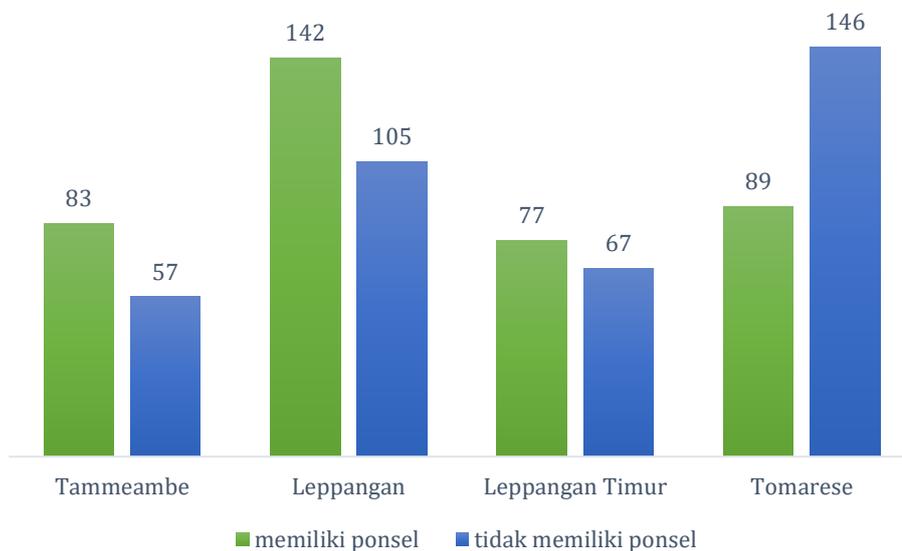
Kategori ragam jenis tanaman di pekarangan pada Desa Leppangan terbagi dalam 9 (sembilan) kategori, yakni buah tanaman, sayur, pati, pakan ternak, bumbu, obat, hias, industri, dan penabung. Berdasarkan Gambar 34, di Desa Leppangan terdapat 29 KK yang memiliki tanaman pekarangan buah, sayur 8 KK, pati 2 KK, pakan ternak 1 KK, bumbu 1 KK, obat 0 KK, hias 40, dan 19 KK dengan tanaman pekarangan penabung.

Tabel 11 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan

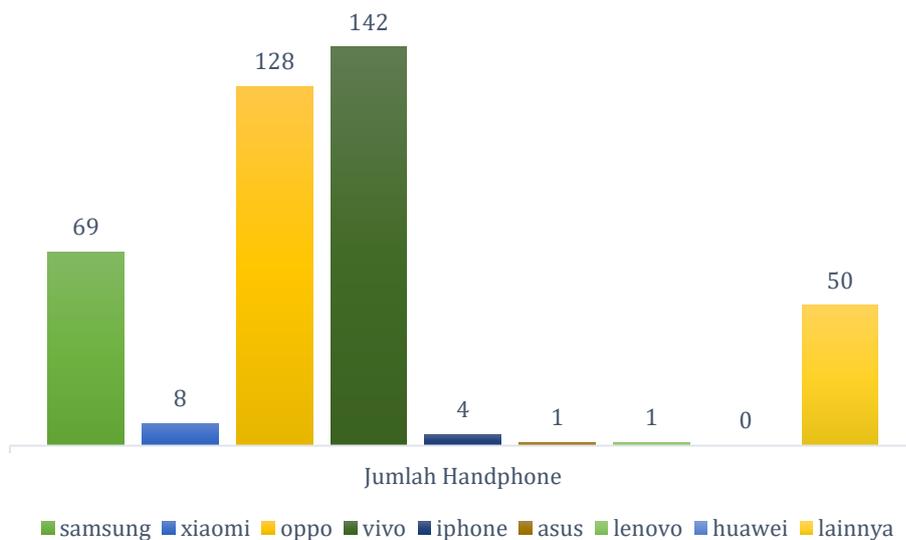
Dusun	Sungai	Jurang	Bakar	Kubur	Laut dan Pantai	Tempat Pembuangan Sampah
Leppangan	25	0	54	1	0	1
Tammeambe	9	0	28	1	1	2
Leppangan Timur	12	0	26	0	0	0
Tomarese	25	4	30	0	0	5
TOTAL	72	4	138	2	1	8

Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Desa Leppangan

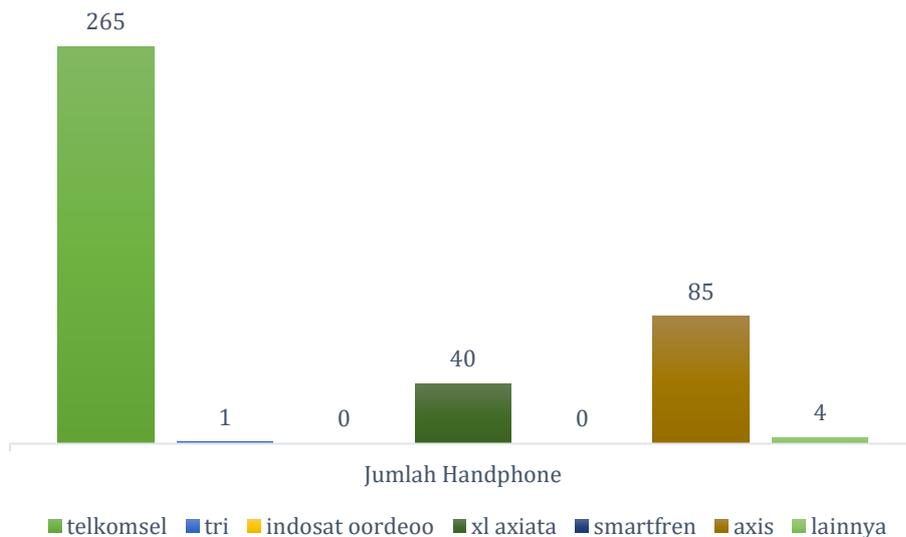
Dusun	Rumah/Kontrakan/Villa (Tidak Ditinggali)	Restoran/Rumah Makan	Ruko/Toko/Warung	Emas/Logam Mulia
Leppangan	52	0	1	3
Tammeambe	23	0	2	4
Leppangan Timur	22	0	1	5
Tomarese	22	0	0	7
TOTAL	119	0	4	19



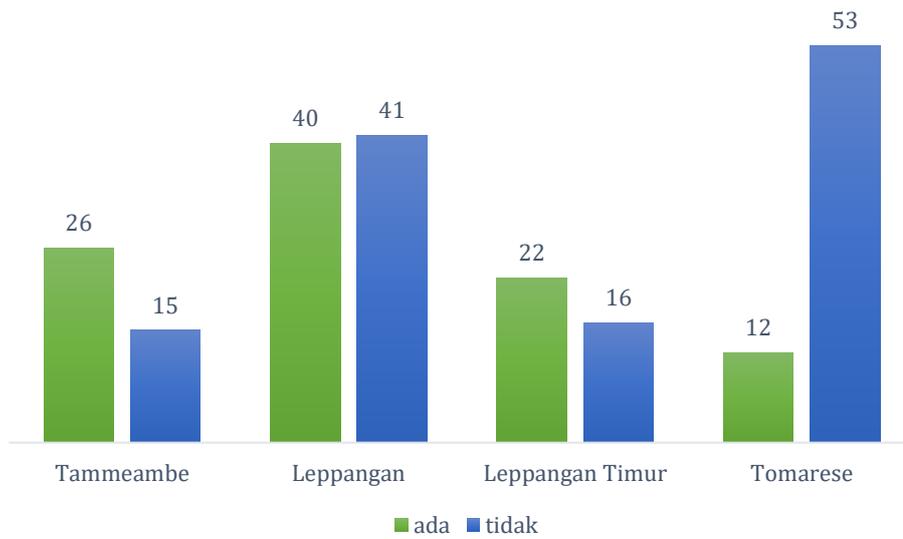
Gambar 28 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan *handphone* di Desa Leppangan



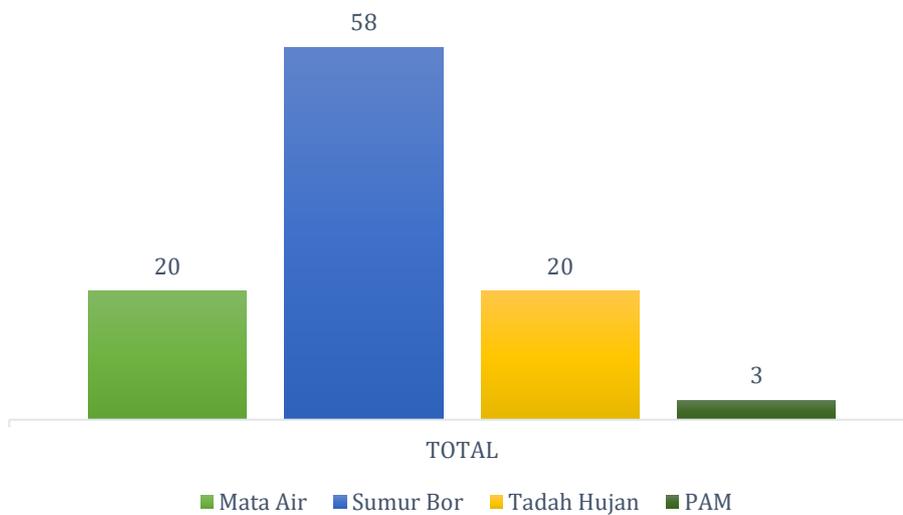
Gambar 29 Jumlah kepemilikan *handphone* berdasarkan merek yang digunakan di Desa Leppangan



Gambar 30 Jumlah penduduk berdasarkan merek *provider* yang digunakan di Desa Leppangan



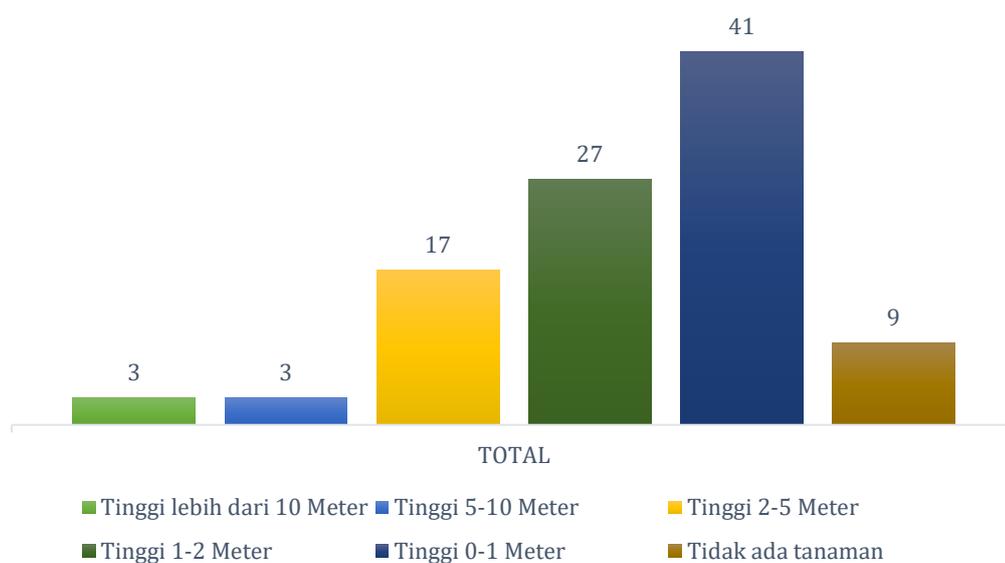
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Desa Leppangan



Gambar 32 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Leppangan

Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Leppangan

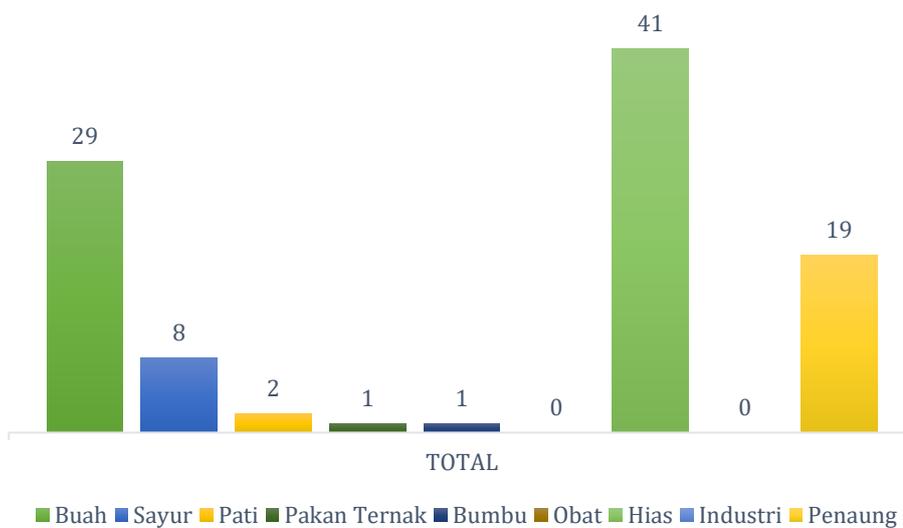
Dusun	Mata Air	Sumur Bor	Tadah Hujan	PAM
Leppangan	4	29	7	0
Tammeambe	1	20	3	2
Leppangan Timur	9	9	5	0
Tomarese	6	0	5	1
TOTAL	20	58	20	3



Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Leppangan

Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Leppangan

Dusun	Tinggi lebih dari 10 Meter	Tinggi 5-10 Meter	Tinggi 2-5 Meter	Tinggi 1-2 Meter	Tinggi 0-1 Meter	Tidak ada tanaman
Leppangan	0	0	5	14	20	1
Tammeambe	2	1	6	5	11	1
Leppangan Timur	1	2	2	5	8	4
Tomarese	0	0	4	3	2	3
TOTAL	3	3	17	27	41	9



Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Desa Leppangan

Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Desa Leppangan

Dusun	Buah	Sayur	Pati	Pakan Ternak	Bumbu	Obat	Hias	Industri	Penaung
Leppangan	6	2	0	0	0	0	28	0	8
Tammeambe	10	3	0	0	0	0	9	0	3
Leppangan Timur	10	2	2	0	0	0	4	0	2
Tomarese	3	1	0	1	1	0	0	0	6
TOTAL	29	8	2	1	1	0	41	0	19





Bagian 6

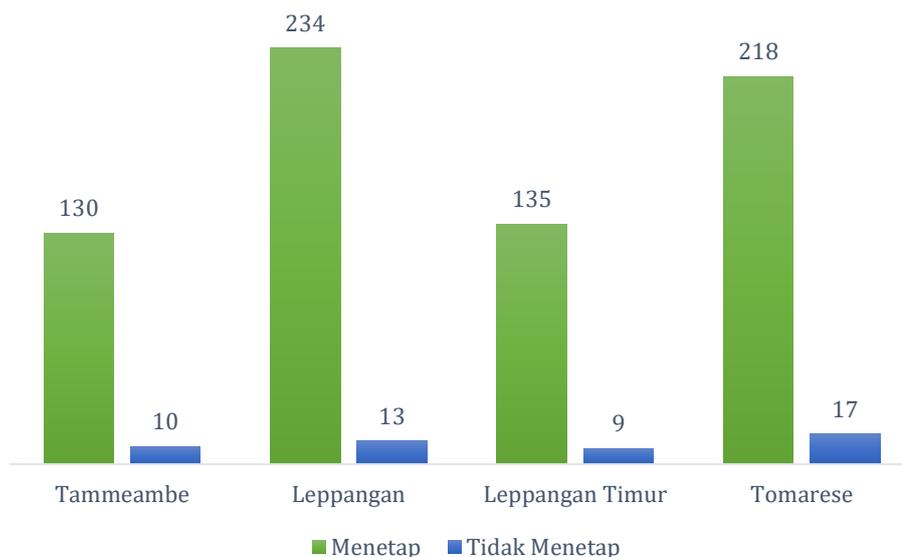
SOSIAL, HUKUM DAN HAM

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

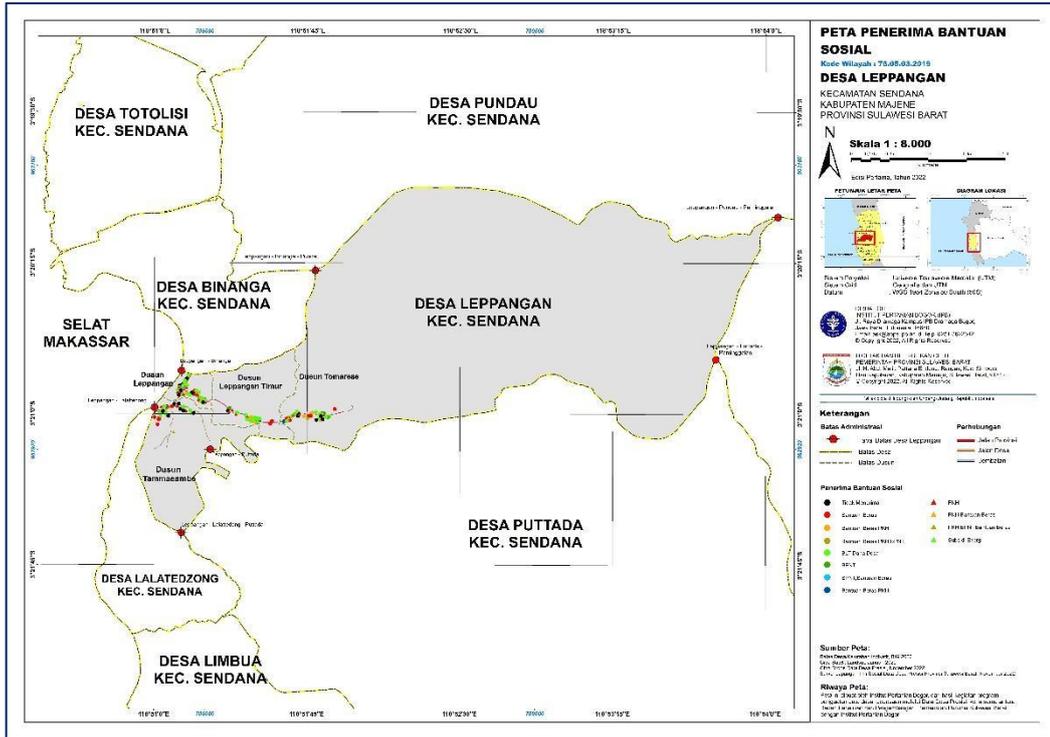
KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM

Status tinggal penduduk terdapat dua kategori yaitu tinggal menetap dan tidak menetap. Status tinggal menetap yaitu orang yang tinggal di desa tersebut dan berniat menetap, sedangkan status tinggal tidak menetap yaitu orang yang beralamat di desa tersebut namun sedang berada di daerah lain. Jika dilihat dari Gambar 35 sangat signifikan perbandingannya di setiap Dusun dimana proporsi penduduk yang tinggal menetap lebih banyak jika dibandingkan dengan proporsi penduduk yang tinggal tidak menetap.

Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Desa Leppangan di dominasi oleh tidak pernah menjadi korban kejahatan. Pada gambar 38 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga tidak pernah menjadi korban kejahatan di Desa Leppangan dengan jumlah penduduk sebanyak 766 jiwa dan yang pernah mengalami korban kejahatan hanya sebanyak 1 orang.



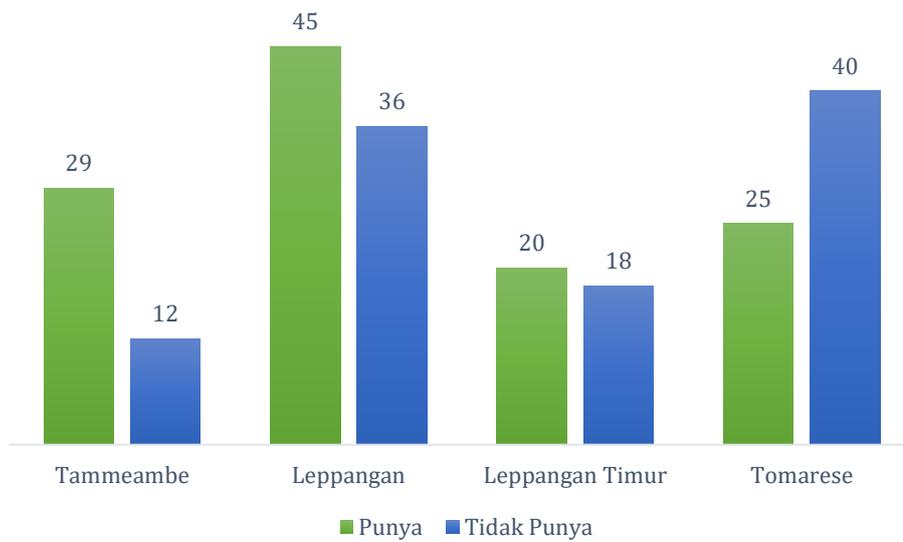
Gambar 35 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Desa Leppangan



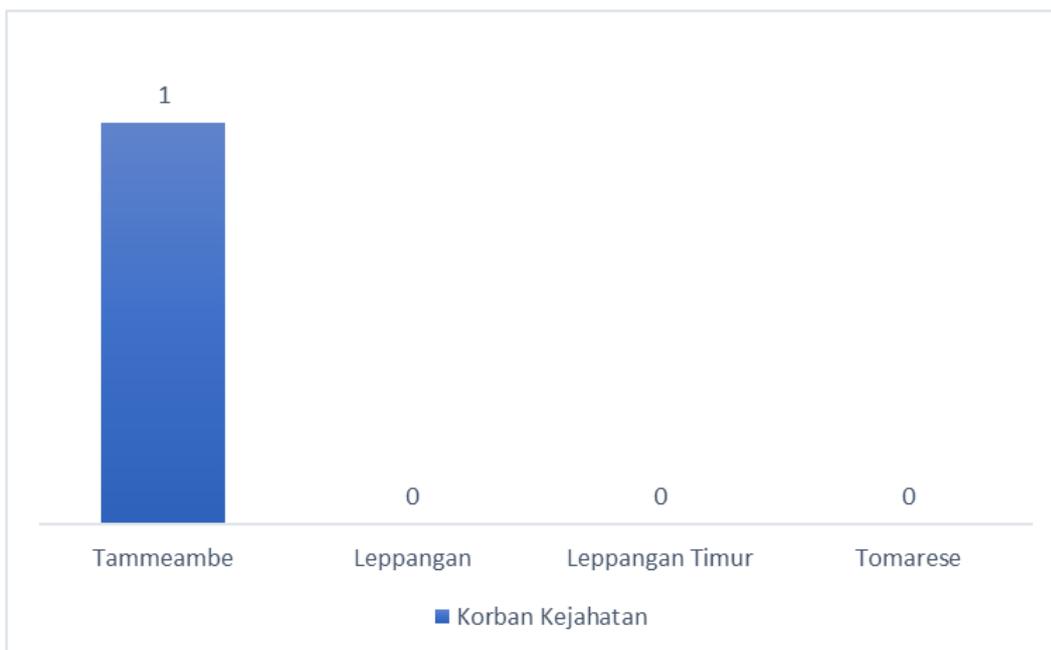
Gambar 36 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan di Desa Leppangan

Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan penerima program bantuan sosial di Desa Leppangan

Dusun	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
BPNT	1	1	3	4	9
Bantuan Beras	12	7	7	21	47
KKS	0	0	0	0	0
PKH	17	10	10	21	58
UPPKS	0	0	0	0	0
PNM Mekaar	0	0	0	0	0
KUR	0	0	0	0	0
Kuota Internet	0	0	0	0	0
Subsidi Energi (gas, listrik, bahan bakar)	0	1	0	0	1
Bantuan Usaha Mikro	0	0	0	0	0
BLT Dana Desa	39	17	20	22	98



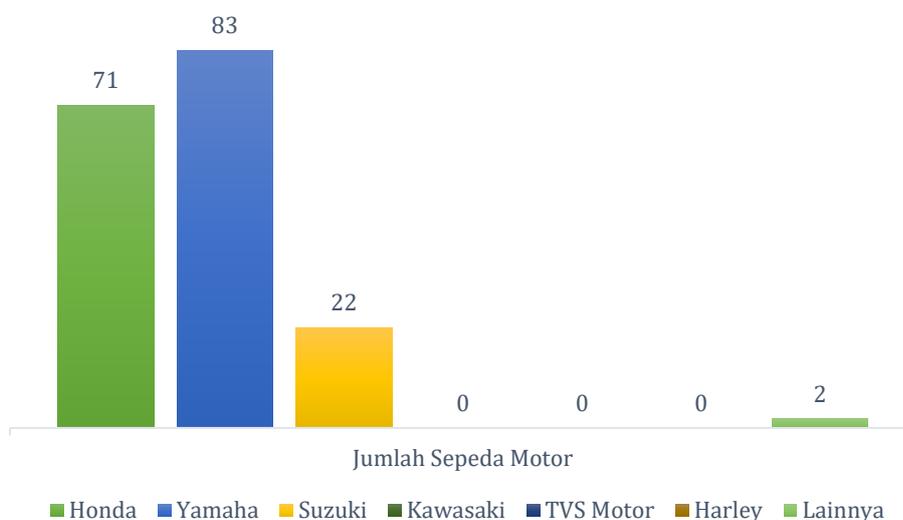
Gambar 37 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Desa Leppangan



Gambar 38 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Desa Leppangan

Tabel 17 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Desa Leppangan

Dusun	Sepeda		Sepeda Motor		Mobil		Perahu		Perahu Motor		Kapal	
	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1
Leppangan	11	1	40	14	3	0	0	1	0	0	0	0
Tammeambe	6	0	21	8	2	0	2	0	2	0	2	0
Leppangan Timur	3	0	16	10	1	1	2	0	0	0	0	0
Tomarese	3	0	27	16	0	0	0	0	1	1	0	0
TOTAL	23	1	104	48	6	1	4	1	3	1	2	0



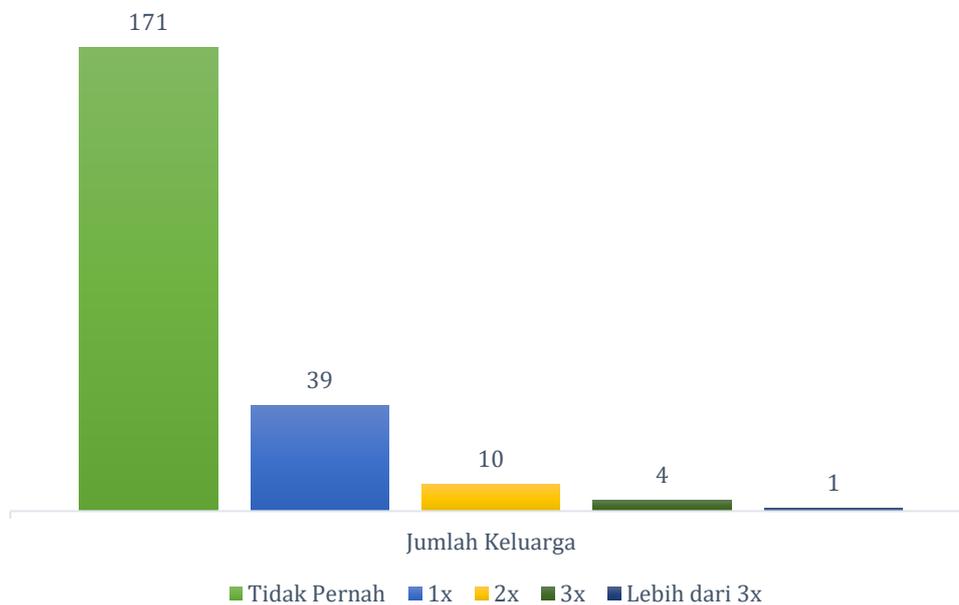
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki di Desa Leppangan

Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Desa Leppangan

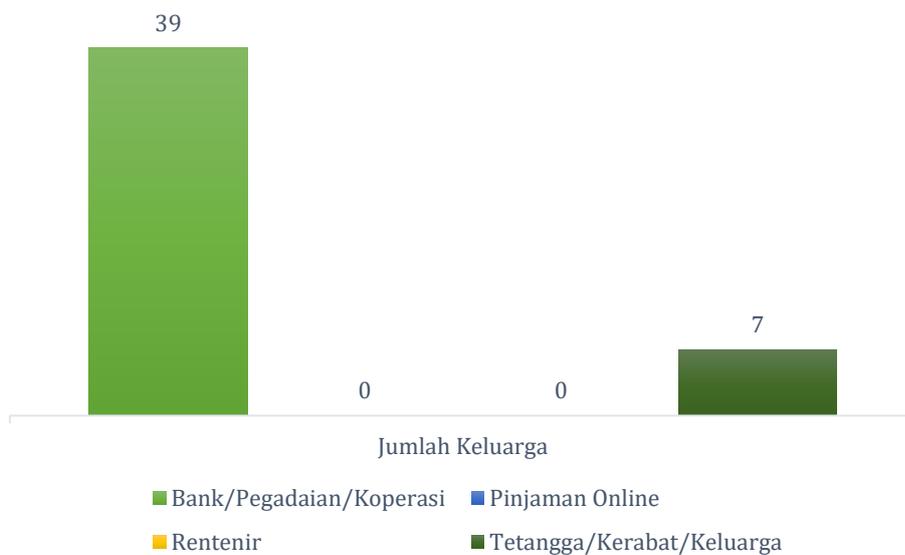
Dusun	Toyot	Hond	Daihats	Suzu	KI	Nissa	Mitsubis	Lainny
	a	a	u	ki	A	n	hi	a
Leppangan	1	0	0	2	0	0	0	1
Tammeambe	1	0	0	0	0	0	0	1
Leppangan Timur	1	0	0	0	0	1	1	0
Tomarese	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	0	0	2	0	1	1	2

Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Desa Leppangan

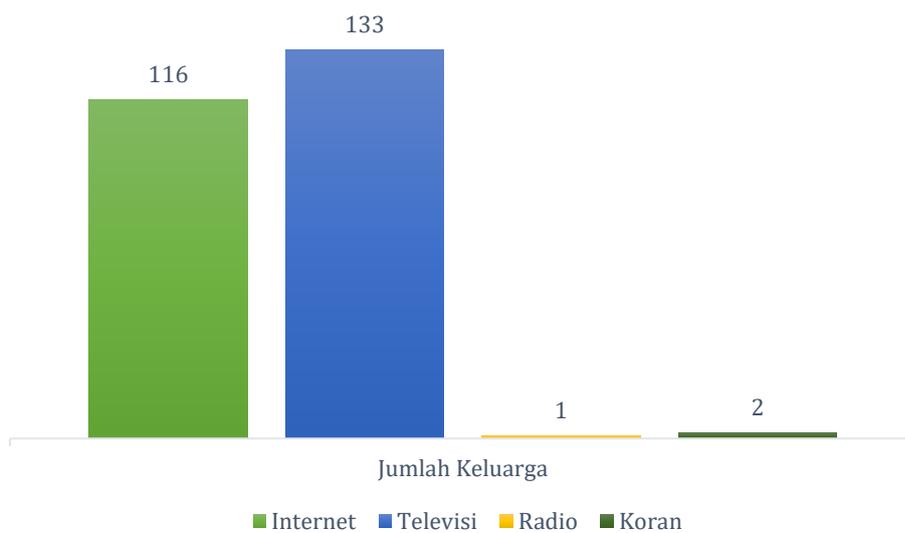
Dusun	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
LSM/NGO	0	0	0	0	0
Kelompok Tani	21	25	28	36	110
Kelompok Nelayan/Budidaya	0	0	0	0	0
Kelompok Buruh	0	0	0	0	0
Ormas/Ormas Keagamaan	0	1	0	0	1
Koperasi/BUMDES	0	0	0	0	0
Kelompok Pengajian	15	14	4	0	33
Partai Politik	0	0	0	0	0
Karang Taruna	8	7	8	0	23
Kelompok Olahraga/Hobi	0	1	0	0	1
Kegiatan Gotong Royong	4	2	1	0	7
Siskamling	1	0	0	0	1
Musdes/Musdus	1	0	0	0	1
Kelompok Seni/Budaya	1	0	0	0	1



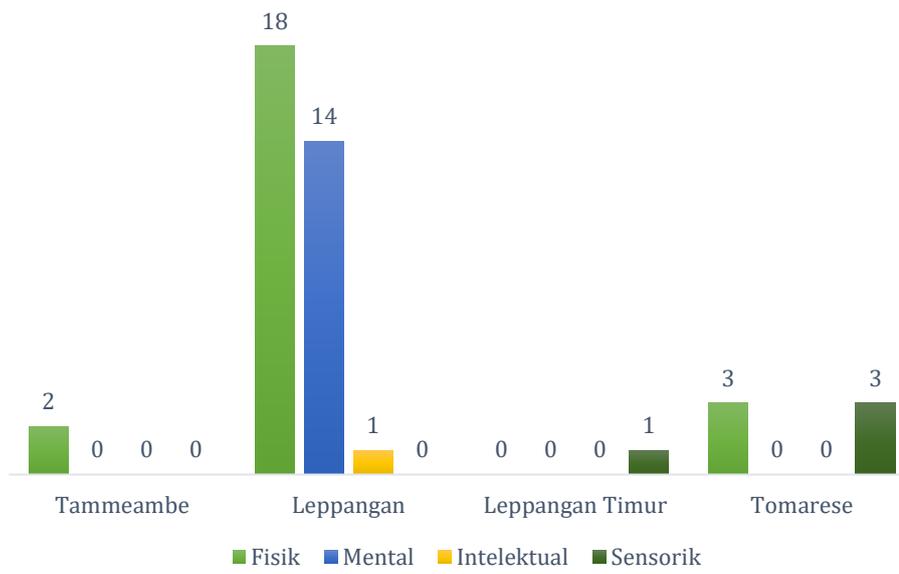
Gambar 40 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi *refreshing* di Desa Leppangan



Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Desa Leppangan

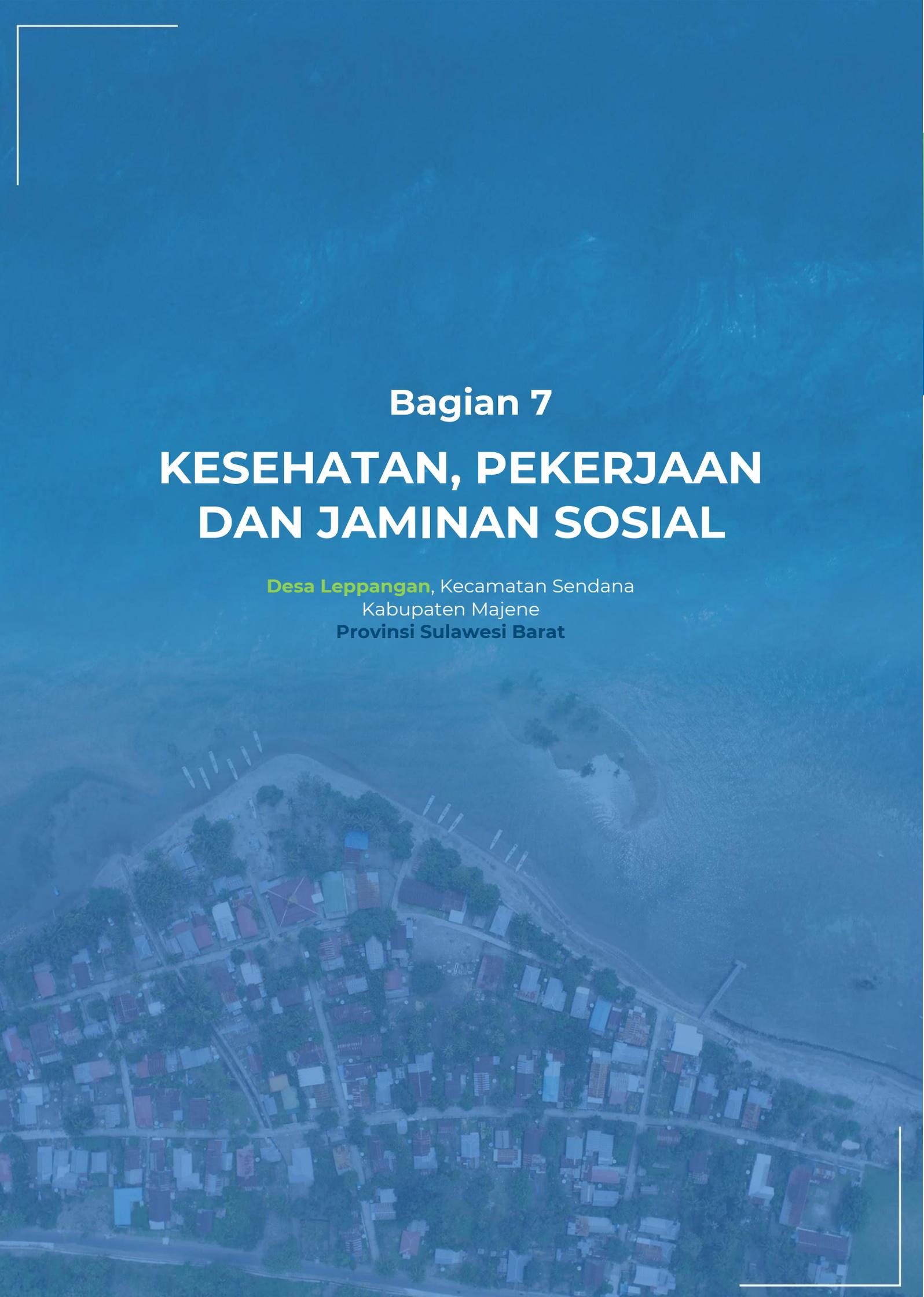


Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Desa Leppangan



Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Desa Leppangan



An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs, surrounded by greenery and a sandy beach. The background shows the ocean with some waves. The text is centered over the image.

Bagian 7

KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

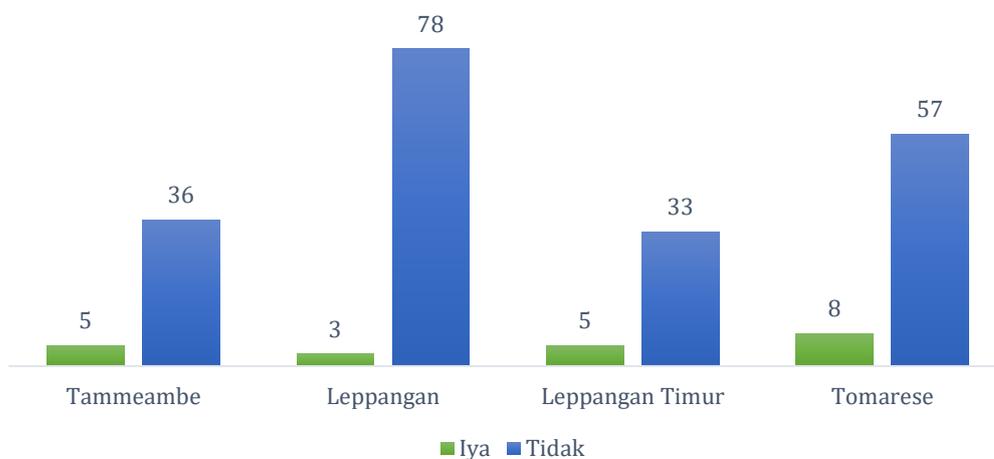
Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

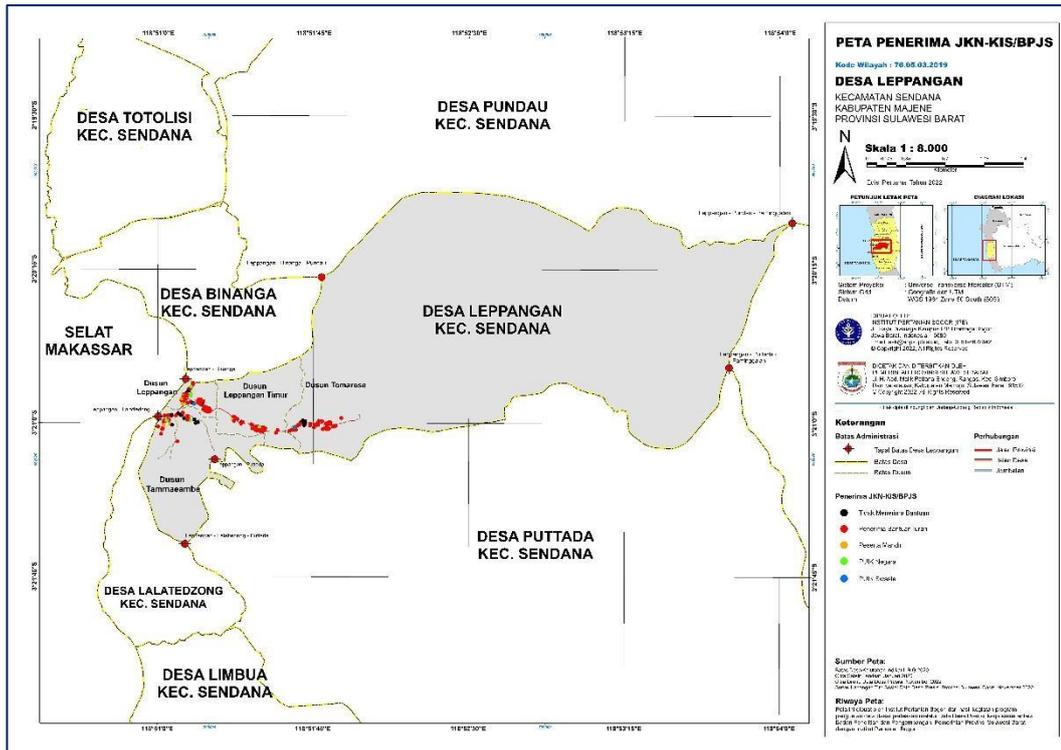
Pada gambar 44 menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam program KB dimasing-masing Dusun didominasi oleh keluarga yang tidak menggunakan KB. Diketahui bahwa terdapat 21 keluarga yang sudah menggunakan KB. Jumlah keluarga dengan persentase tinggi dalam menggunakan KB berada di Dusun Tomarese sebanyak 8 keluarga dan dusun yang memiliki persentase terendah adalah Dusun Leppangan sebanyak 3 keluarga. Sedangkan untuk kategori yang tidak menggunakan KB terdapat sebanyak 204 keluarga, khususnya Dusun Leppangan menjadi Dusun dengan persentase tertinggi sebanyak 81 keluarga dan Dusun Leppangan Timur menjadi Dusun dengan persentase paling rendah yaitu sebanyak 38 keluarga.

Pekerjaan merupakan kegiatan sosial untuk memperoleh suatu imbalan berupa gaji. Pekerjaan-pekerjaan penduduk di Desa Leppangan terdiri dari art, buruh pabrik, bidan, guru, pekerja serabutan, Ojek, montir, petani/peternak, pedagang, pengemudi, karyawan swasta, pegawai lembaga negara, perawat. Namun mayoritas penduduk di Desa Leppangan pada kondisi belum/tidak bekerja. Sebaran keluarga berdasarkan penerima JKN-KIS/BPJS di Desa Leppangan didominasi oleh penerima bantuan iuran, kemudian diikuti oleh PUIK Negara, kemudian Peserta Mandiri, dan terakhir PUIK swasta.

Pada Gambar 48 tercatat bahwa jumlah keluarga di Desa Leppangan lebih dominan tidak memiliki penyakit berat, di Dusun Leppangan adalah angka paling tinggi terdapat 26 keluarga, di Dusun Tameambe dan Dusun Tomarese masing-masing terdapat 8 dan 7 keluarga, sedangkan di Dusun Leppangan Timur terdapat 3 keluarga memiliki penyakit berat.



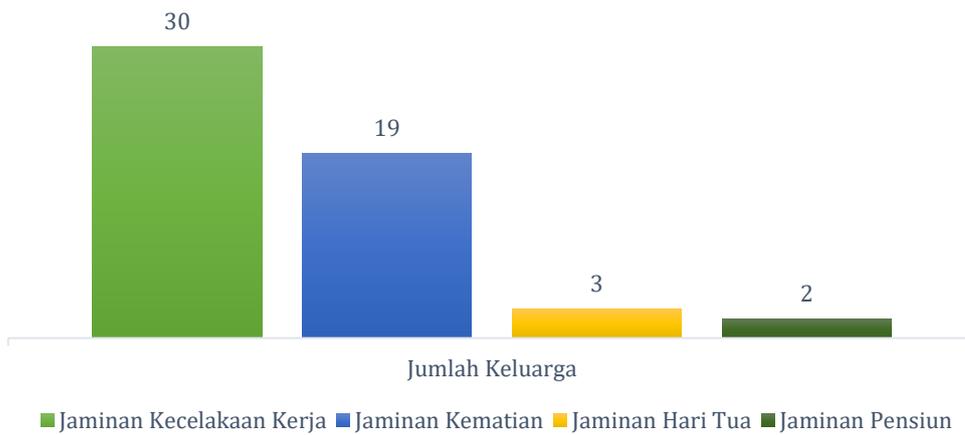
Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna KB di Desa Leppangan



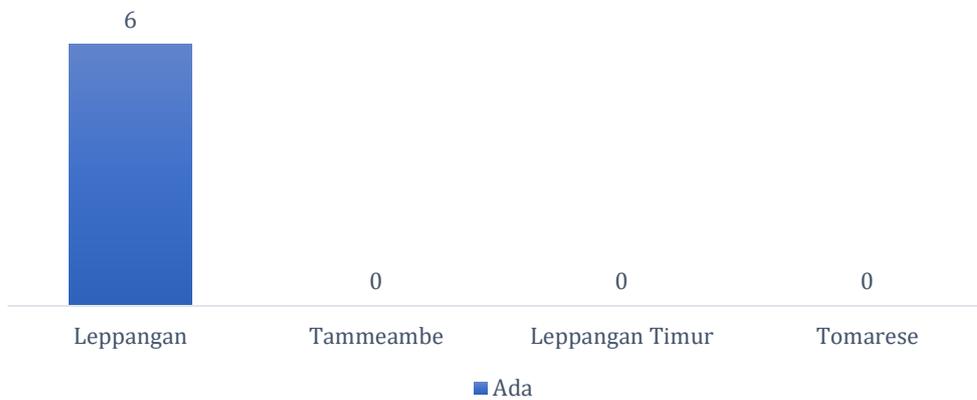
Gambar 45 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Desa Leppangan

Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Desa Leppangan

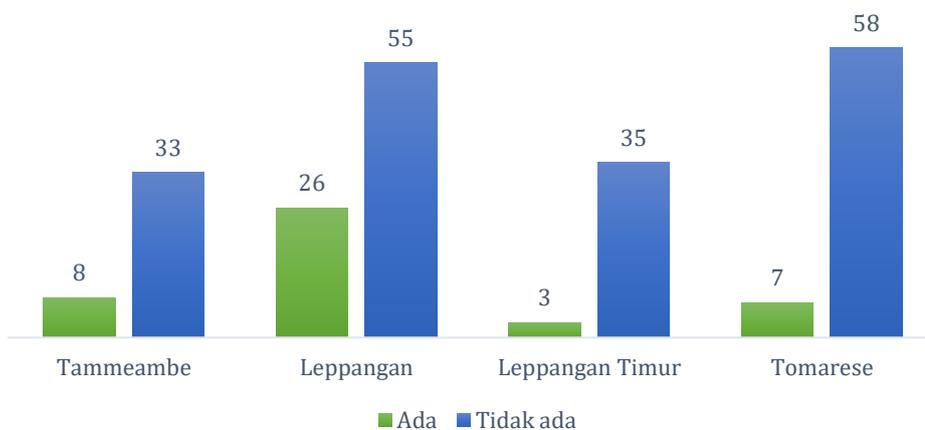
Dusun	Penerima Bantuan Iuran	Peserta Mandiri	PUIK Negara	PUIK Swasta
Leppangan	163	14	23	11
Tammeambe	88	15	9	0
Leppangan Timur	117	2	14	5
Tomarese	161	0	8	8
TOTAL	529	31	54	24



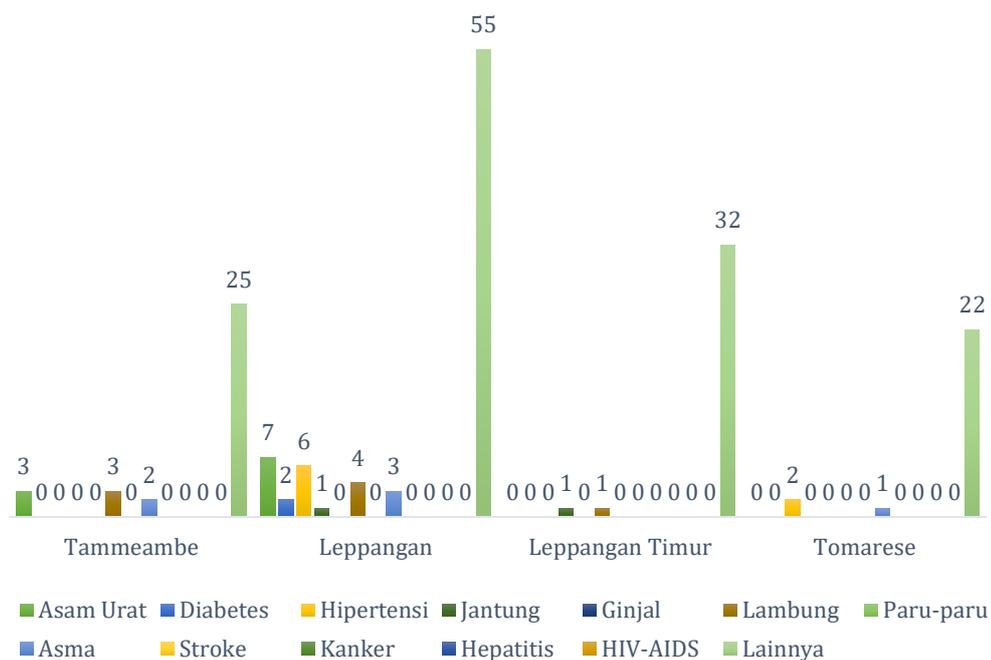
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Leppangan



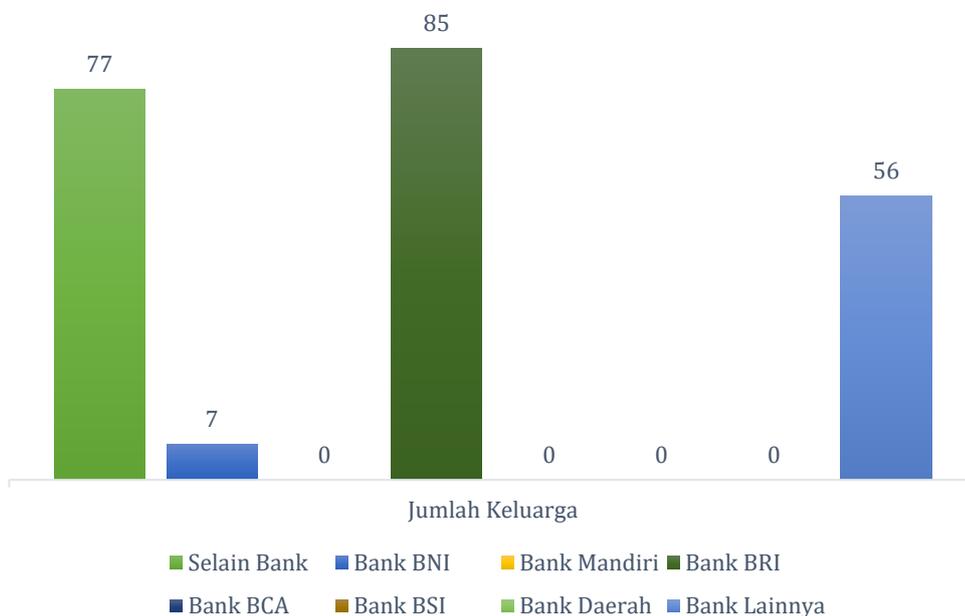
Gambar 47 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Desa Leppangan



Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Desa Leppangan



Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah penyakit berat di Desa Leppangan



Gambar 50 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Desa Leppangan

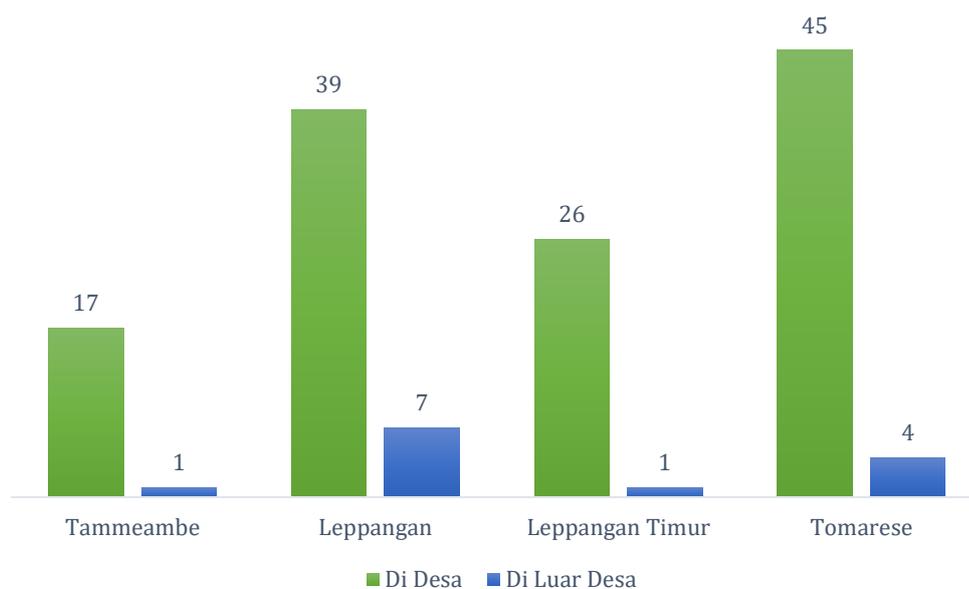
Tabel 21 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Leppangan

Dusun	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Belum/Tidak Bekerja	154	85	99	155	493
Asisten Rumah Tangga	26	14	11	27	78
Buruh Pabrik				1	1
Bidan	1				1
Guru/Pendidik	4	3	1		8
Pekerja Serabutan	3	3	1	1	8
Nelayan/Petambak	1	1			2
Petani/Peternak	43	23	28	49	143
Pedagang	1			1	2
Pengemudi	1				1
Pekerja/Karyawan Swasta	11	10	2	1	24
Pegawai Lembaga Negara	1	1	2		4
Pelaut	1				1
Total	247	140	144	235	766

Tabel 22 Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Desa Leppangan

Dusun	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Tidak Bekerja	100	51	60	104	315
Pelajar/Mahasiswa	30	23	28	39	120
Mengurus Rumah Tangga	21	11	12	12	56
Pensiun	1	1			2
Pegawai Tetap Lembaga Swasta/BUMN/BUMS		3			3
Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan dan Waktu Tertentu	4	5	2		11
outsourcing di swasta/bumn/bums		1			1
Pekerja Harian Lepas	41	24	14	31	110
Berusaha Sendiri	46	18	27	49	140
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	2	1		4
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1	1			2
Pegawai Lembaga Negara Tanpa		1			1

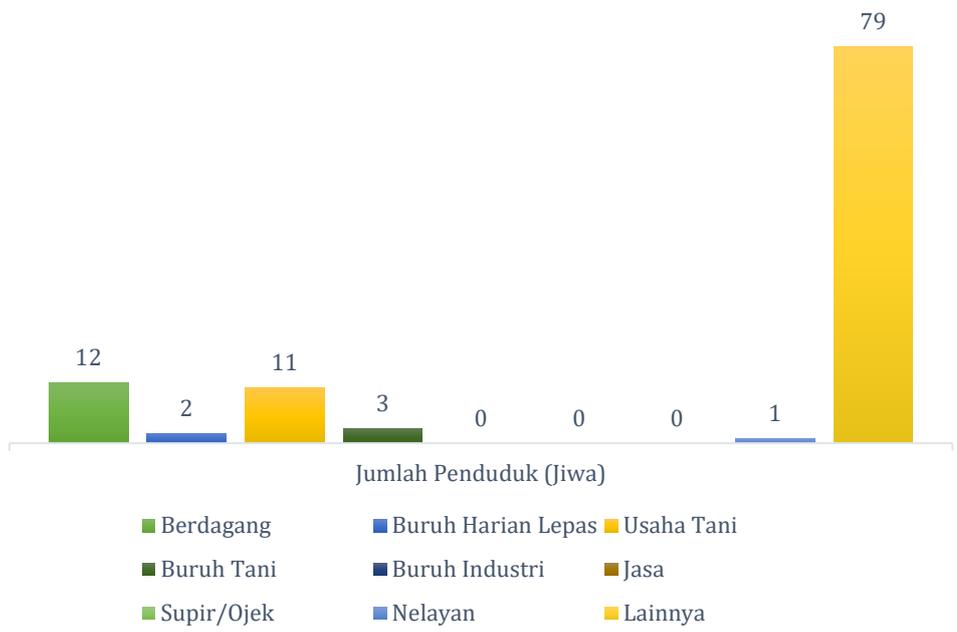
Perjanjian Kerja/Honorer			
Pegawai Lembaga Swasta/BUMN/BUMS Tanpa Perjanjian Kerja/Honorer	1		1



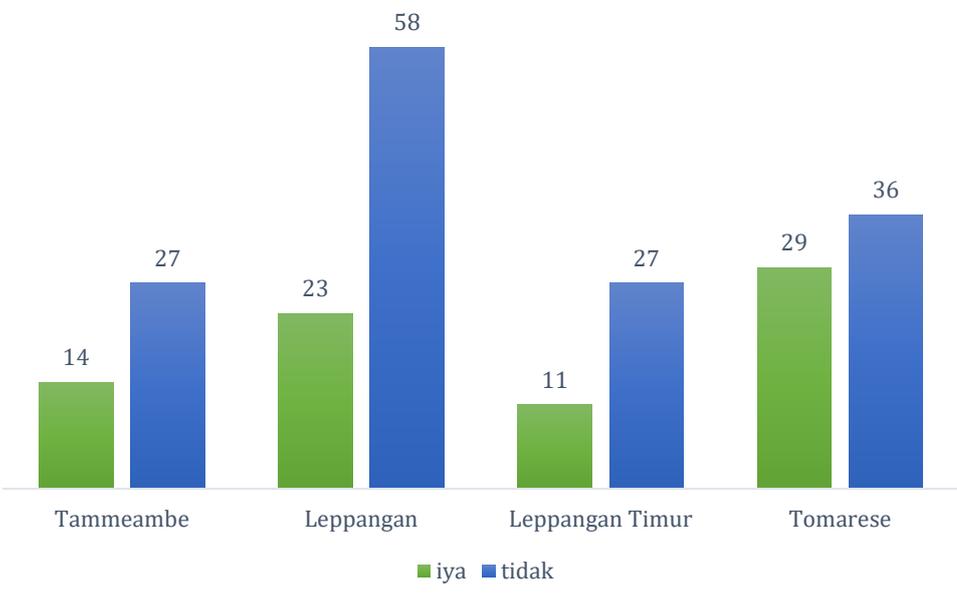
Gambar 51 Jumlah penduduk berusaha sendiri berdasarkan lokasi usaha di Desa Leppangan

Tabel 23 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Leppangan

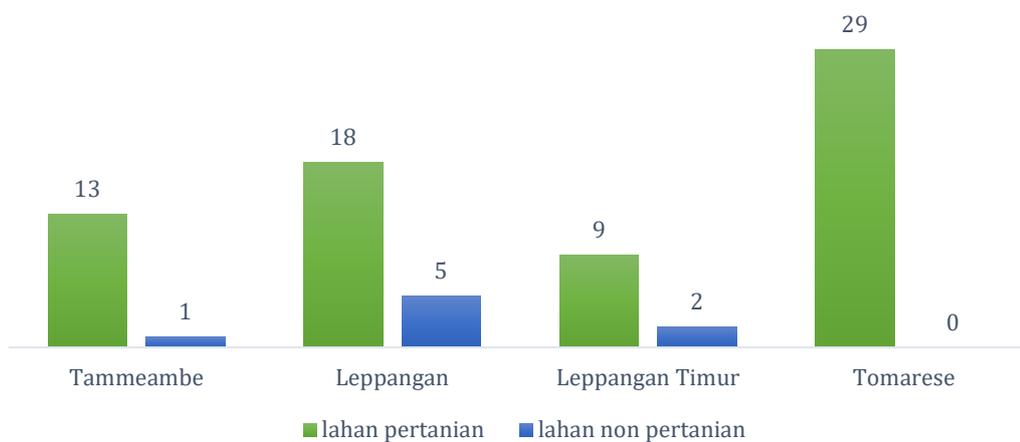
Dusun	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese
Tidak Ada	204	120	140	194
Berdagang	8	2	0	2
Buruh Harian Lepas	0	1	0	1
Usaha Tani	2	5	0	4
Buruh Tani	1	1	0	1
Buruh Industri	0	0	0	0
Jasa	0	0	0	0
Supir/Ojek	0	0	0	0
Nelayan	1	0	0	0
Lainnya	31	11	4	33
Total	247	141	144	235



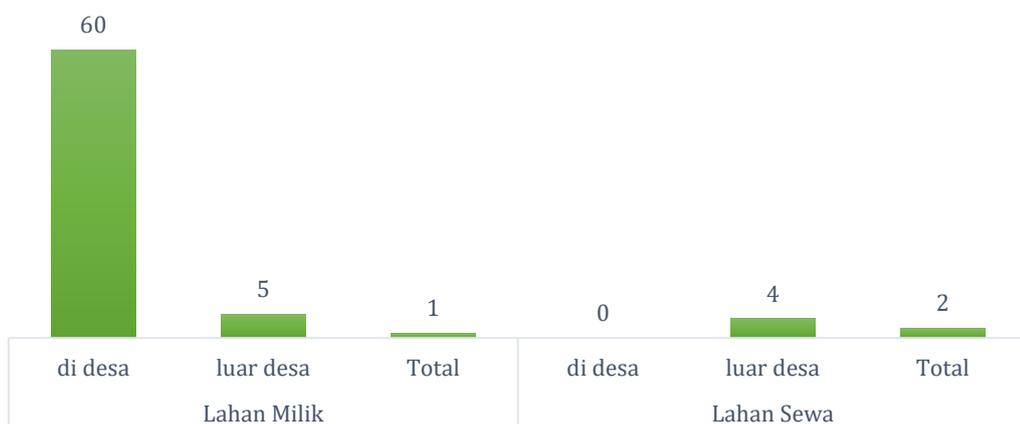
Gambar 52 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Leppangan



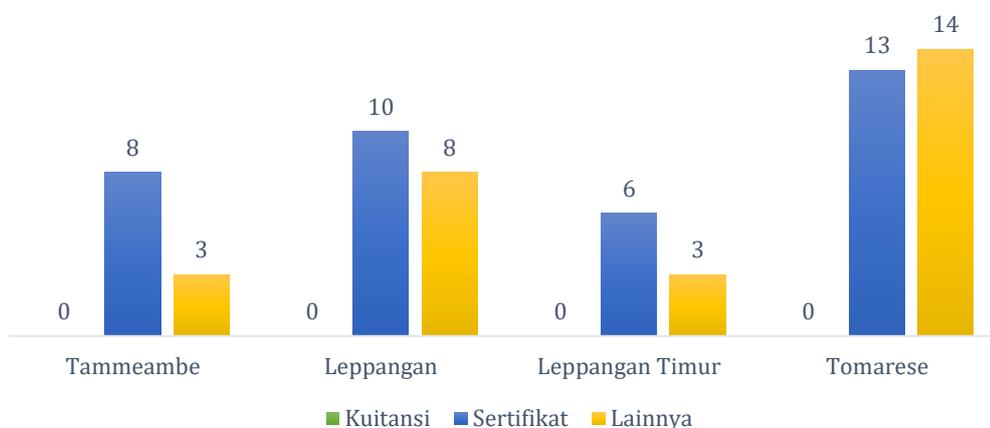
Gambar 53 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan pertanian di Desa Leppangan



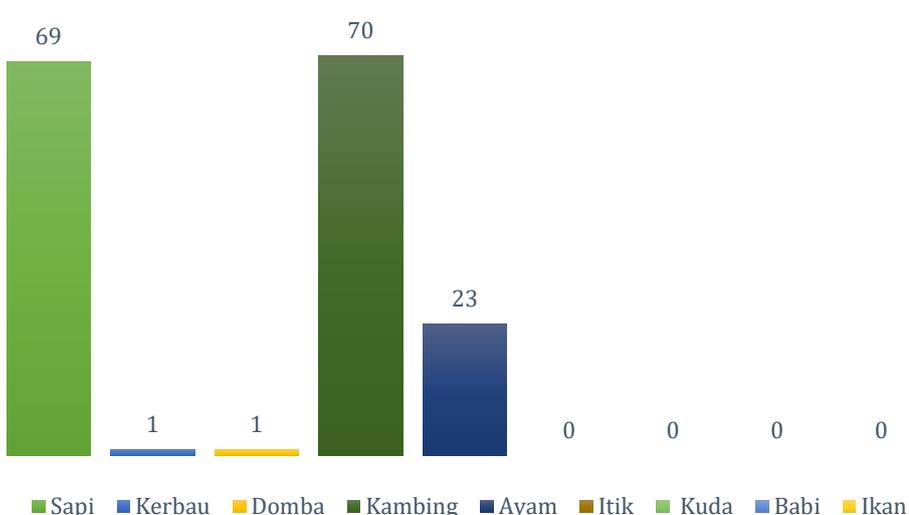
Gambar 54 Jumlah keluarga berdasarkan pemanfaatan lahan di Desa Leppangan



Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Desa Leppangan



Gambar 56 Jumlah keluarga berdasarkan lokasi lahan yang dikelola di Desa Leppangan



Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Leppangan

Tabel 24 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Leppangan

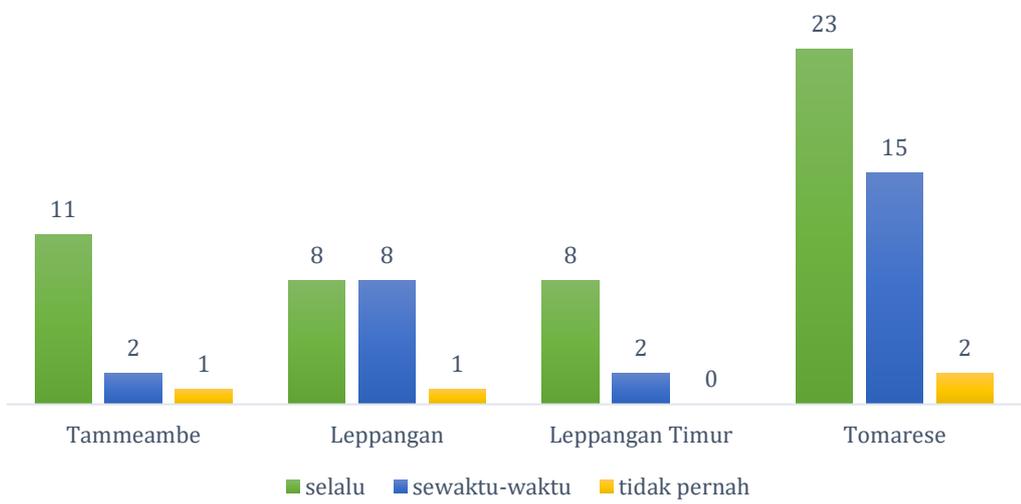
Dusun	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing	Ayam
Leppangan	17	1	1	22	3
Tammeambe	10	0	0	17	5
Leppangan Timur	12	0	0	14	9
Tomarese	30	0	0	17	6
TOTAL	69	1	1	70	23

Tabel 25 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Desa Leppangan

Dusun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Domba (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)
Leppangan	42	3	2	66	15
Tammeambe	23	0	0	51	33
Leppangan Timur	36	0	0	44	39
Tomarese	82	0	0	37	37
TOTAL	185	3	2	198	124



Gambar 58 Jumlah balita penerima asi eksklusif di Desa Leppangan



Gambar 59 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Desa Leppangan



An aerial photograph of a coastal village, likely Leppangan, with a blue overlay. The village features numerous small buildings with colorful roofs (red, blue, white) and is situated along a shoreline. The water is visible in the upper right, and the sky is a deep blue. The text is centered over the image.

Bagian 8

SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

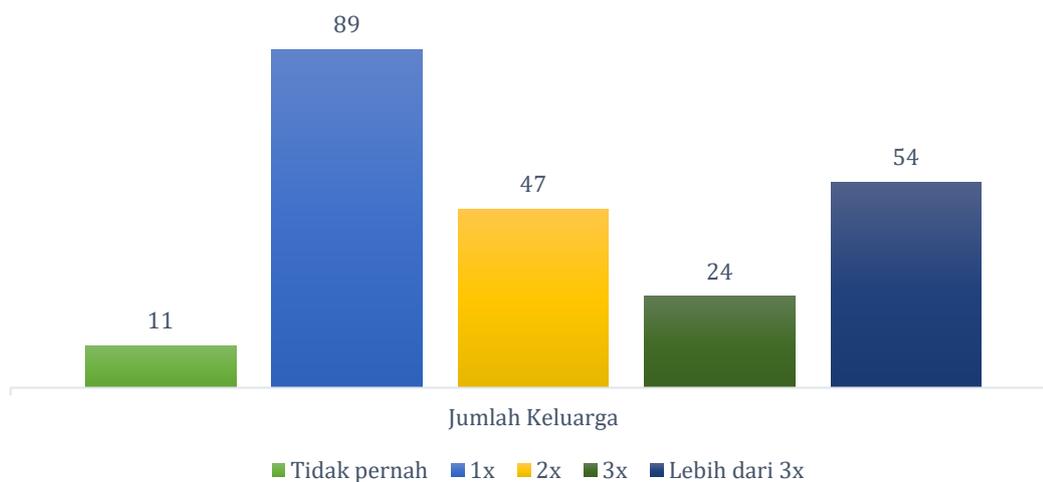
Frekuensi beli pakaian adalah jumlah pakaian yang dibeli dalam waktu satu tahun. Jumlah Frekuensi beli pakaian pertahun di Desa Leppangan belanja pakaian <3x tahun sekali sebanyak 147 keluarga, 3-5 kali setahun sebanyak 78 keluarga, dan yang tidak pernah berbelanja dalam setahun terakhir sebanyak 11 keluarga.

Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Persebaran penggunaan sumber air di Desa Leppangan didominasi oleh keluarga yang menggunakan sumber air dari Sumur. Bahan bakar masak adalah bahan bakar habis pakai yang digunakan untuk dan dalam memasak. Penggunaan bahan bakar masak di Desa Leppangan didominasi oleh penggunaan bahan bakar gas 3 Kg sebanyak 189 KK, Kayu Bakar sebanyak 30 KK, Gas >3 sebanyak 5 KK, dan tidak memasak di rumah sebanyak 1 KK.

Kelengkapan menu makanan Pedoman Gizi Seimbang (PGS), yang dihitung berdasarkan isi piring warga terdiri mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, kategori kelengkapan menu makan terdiri dari, kategori lengkap: Menu makan yang memiliki lebih dari 3 jenis asupan gizi makanan, yaitu karbohidrat, protein, vitamin dan mineral; Kategori semi lengkap: Menu makan yang memiliki tiga jenis asupan gizi makanan, yaitu karbohidrat, protein, vitamin/mineral atau karbohidrat, vitamin, protein/mineral atau karbohidrat, mineral, vitamin/protein. Kategori tidak lengkap: Menu makan yang memiliki kurang dari tiga jenis asupan gizi makanan. Karbohidrat dan protein atau karbohidrat dan vitamin atau karbohidrat dan mineral. Kelengkapan menu makanan masyarakat di Desa Leppangan yaitu menu lengkap sebanyak 17 KK, semi lengkap sebanyak 160 KK, dan tidak lengkap sebanyak 48 KK.

Penggunaan Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit/rangkaian yang digunakan dalam per satu bulan lamanya. Adapun penggunaan daya listrik PLN di Desa Leppangan untuk daya sebesar 450 VA sebanyak 89 KK, 900 VA sebanyak 124 KK, 1300 VA sebanyak 7 KK, dan 2200 VA Sebanyak 1 KK.

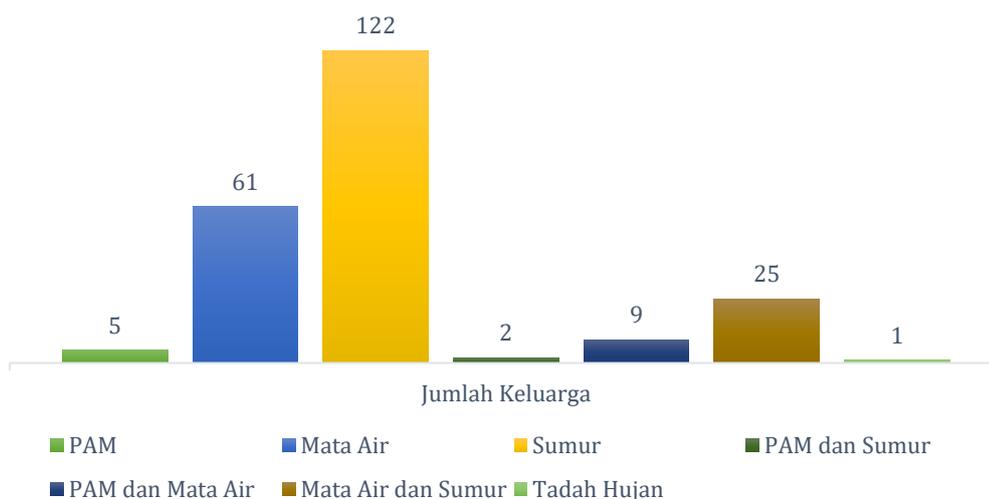
Jamban merupakan perlengkapan rumah dengan fungsi utama sebagai tempat pembuangan kotoran urin dan feses. Kepemilikan jamban pada Desa Leppangan yaitu didominasi memiliki jamban sendiri sebanyak 216 keluarga dan tidak memiliki jamban sebanyak 9 keluarga.



Gambar 60 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Desa Leppangan

Tabel 26 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Desa Leppangan

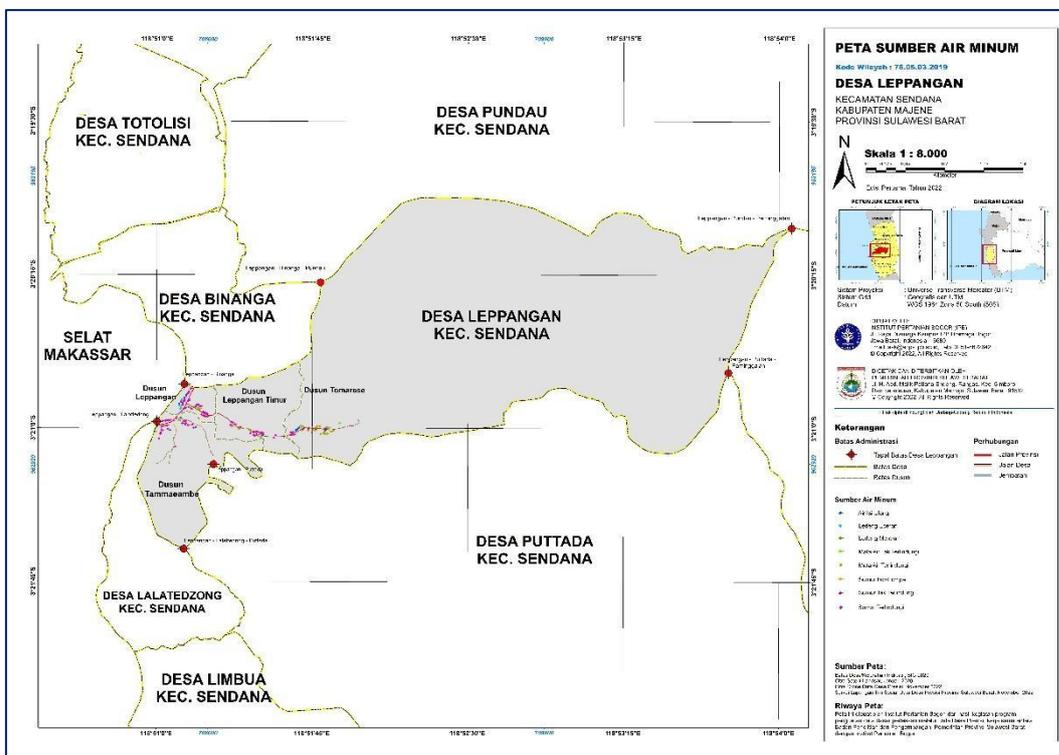
Dusun	beli baju pertahun				
	Tidak pernah	1x	2x	3x	Lebih dari 3x
Leppangan	5	28	18	13	17
Tammeambe	0	16	13	3	9
Leppangan Timur	1	22	4	3	8
Tomarese	5	23	11	5	20
TOTAL	11	89	47	24	54



Gambar 61 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Desa Leppangan

Tabel 27 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Desa Leppangan

Dusun	Sumber Air Keluarga						
	PA M	Mat a Air	Sumu r	PAM dan Sumur	PAM dan Mata Air	Mata Air dan Sumur	Tadah Hujan
Leppangan	0	6	63	1	1	10	0
Tammeambe	2	6	31	1	0	1	0
Leppangan Timur	0	8	22	0	1	6	1
Tomarese	3	41	6	0	7	8	0
TOTAL	5	61	122	2	9	25	1



Gambar 62 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum

Gambar 62 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Desa Leppangan menggunakan sumber air dari mata air terlindungi dan sumur terlindungi. Rinciannya yaitu 121 KK yang menggunakan sumber air dari sumur terlindungi, 68 KK menggunakan mata air terlindungi, 19 KK menggunakan air isi ulang, kemudian selebihnya tersebar dengan jumlah sedikit, seperti terdapat pada **Tabel 25**.

Tabel 28 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Desa Leppangan

Dusun	Mata air tak terlindungi	Mata air terlindungi	Sumur tak terlindungi	Sumur terlindungi	Sumur Bor/Pompa	Ledeng eceran	Ledeng meteran	Air isi ulang
Leppangan	0	8	2	50	5	7	1	8
Tammeambe	0	7	0	30	0	0	0	4
Leppangan Timur	0	9	0	28	0	0	0	1
Tomarese	2	44	0	13	0	0	0	6
TOTAL	2	68	2	121	5	7	1	19

Tabel 29 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Desa Leppangan

Dusun	Bahan Bakar Masak							
	tidak memasak di rumah	kayu bakar	arang	briket	minyak tanah	gas kota/biogas	gas 3 kg	gas lebih dari 3 kg
Leppangan	0	6	0	0	0	0	73	2
Tammeambe	0	0	0	0	0	0	39	2
Leppangan Timur	0	7	0	0	0	0	31	0
Tomarese	1	17	0	0	0	0	46	1
TOTAL	1	30	0	0	0	0	184	5

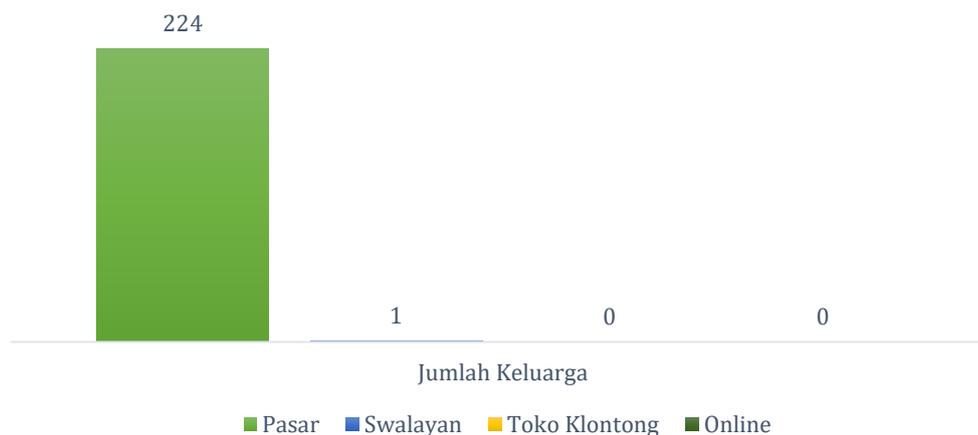
**Gambar 63** Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Leppangan

Tabel 30 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Leppangan

Dusun	Frekuensi Makan (Kali)			
	> 3x makan	3x makan	2x makan	1x makan
Leppangan	1	75	5	0
Tammeambe	2	36	3	0
Leppangan Timur	0	37	1	0
Tomarese	0	62	3	0
TOTAL	3	210	12	0

**Gambar 64** Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Desa Leppangan**Tabel 31** Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Desa Leppangan

Dusun	Menu Makan		
	Semi Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
Leppangan	58	9	14
Tammeambe	28	7	6
Leppangan Timur	35	0	3
Tomarese	39	1	25
TOTAL	160	17	48



Gambar 65 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok Di Desa Leppangan

Tabel 32 konsumsi karbohidrat per bulan di Desa Leppangan

Sumber Karbohidrat	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Beras (liter)	2218	1120	1482	2158	6978
Biskuit (kg)	51.2	13.8	3.1	51	119
Jagung (kg)	80	38	5	112	235
Kentang (kg)	22	15	0	17	58
Mie (bks)	749	287	369	780	2185
Roti Tawar (bks)	67	19	3	13	102
Singkong (kg)	55	70	18	59	202
Sukun (kg)	35	8	0	31	74
beras ketan (kg)	41	12	0	31	84

Tabel 33 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Desa Leppangan

Lauk Hewani	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Daging Sapi (kg)	3	51	1	0	55
Daging Ayam (kg)	16	9	54	6	85
Daging Babi (kg)	0	0	0	0	0
Ikan Segar (kg)	589	600	602	629	2420
Ikan Kering Asin (kg)	193	131	22	99	445
Telur Ayam (kg)	202	230	71	277	780

Tabel 34 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Desa Leppangan

Lauk Nabati	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Kacang Hijau (kg)	32	8	0	35	75
Kacang Kedelai (kg)	22	4	0	10	36
Kacang Merah (kg)	11	3	0	8	22
Kacang Mete (kg)	16	3	0	16	35
Tahu (bks)	359	155	151	288	955
Tempe (bks)	387	187	144	275	993

Tabel 35 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Desa Leppangan

Sayuran	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Bayam (ikat)	128	56	39	118	341
Kangkung (ikat)	145	77	20	111	353
Sawi (ikat)	72	28	5	117	222
Terong (kg)	150	115	17	183	465
Oyong (kg)	15	5	0	9	29
Daun Singkong (ikat)	23	22	0	19	64
Daun Ubi (ikat)	74	13	0	17	104

Tabel 36 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Desa Leppangan

Buah-buahan	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Jeruk (kg)	118	32	5	145	300
Mangga (kg)	75	68	6	53	202
Pepaya (kg)	78	52	27	73	230
Pisang (kg)	166	142	88	228	624
Alpukat (kg)	18	7	0	8	33
Semangka (kg)	59	30	3	34	126
Melon (kg)	25	7	0	9	41

Tabel 37 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Desa Leppangan

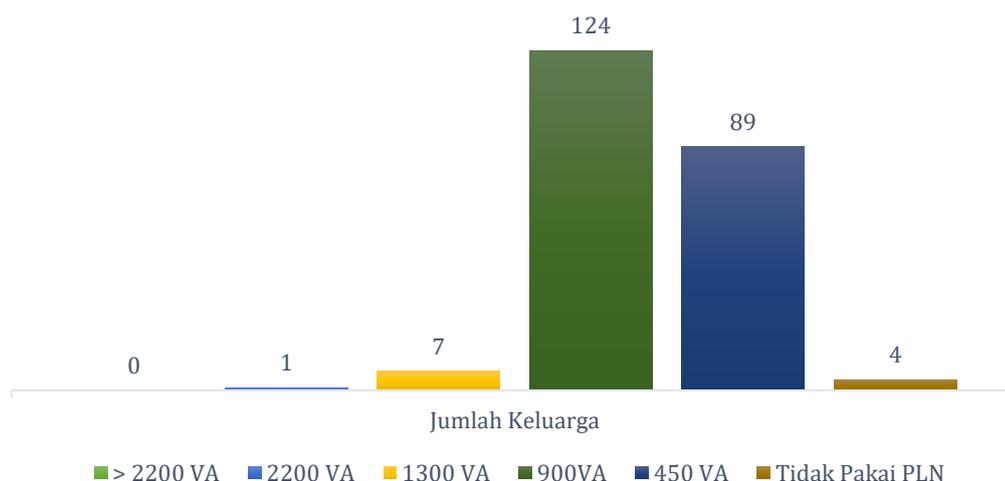
Bumbu	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Cabai (kg)	821	225	611	417	2074
Bawang Merah (kg)	1066	374	759	582	2781
Bawang Putih (kg)	1102	499	720	805	3126

Tabel 38 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Desa Leppangan

Bahan Masak	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Minyak Goreng (liter)	271	141	102	275	789
Gas (kg)	426	254	215	1171	2066
Garam (Kg)	67.5	20.2	16	38.5	142.401
Gula (kg)	424	217	370	318	1329

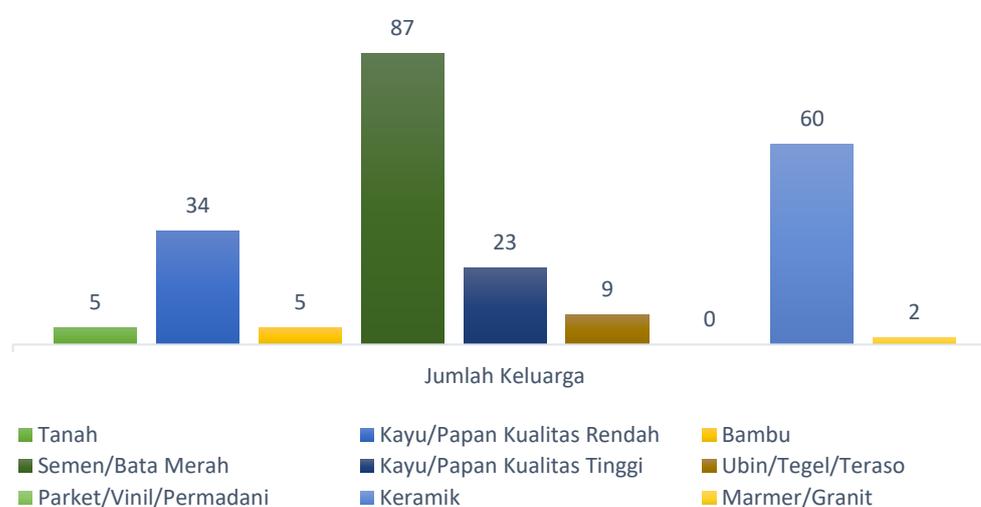
Tabel 39 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Desa Leppangan

Pelengkap	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Susu (gelas)	502	97	46	89	734
Teh (gelas)	779	424	653	470	2326
Kopi (gelas)	1006	561	757	1417	3741
Rokok (bks)	844	322	230	498	1894

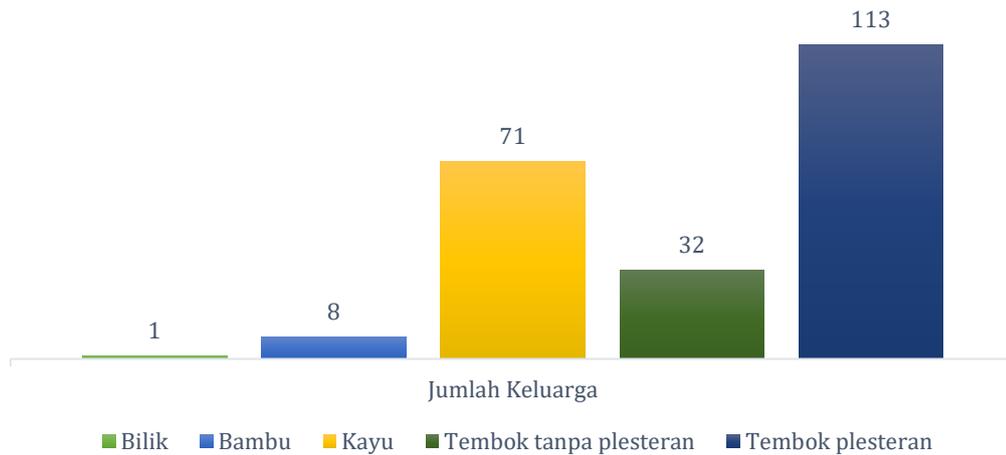
**Gambar 66** Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Leppangan

Tabel 40 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Leppangan

Dusun	Daya Listrik					
	> 2200 VA	2200 VA	1300 VA	900VA	450 VA	Tidak Pakai PLN
Leppangan	0	0	2	42	35	2
Tammeambe	0	1	4	24	11	1
Leppangan Timur	0	0	0	22	15	1
Tomarese	0	0	1	36	28	0
TOTAL	0	1	7	124	89	4

**Gambar 67** Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Leppangan**Tabel 41** Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

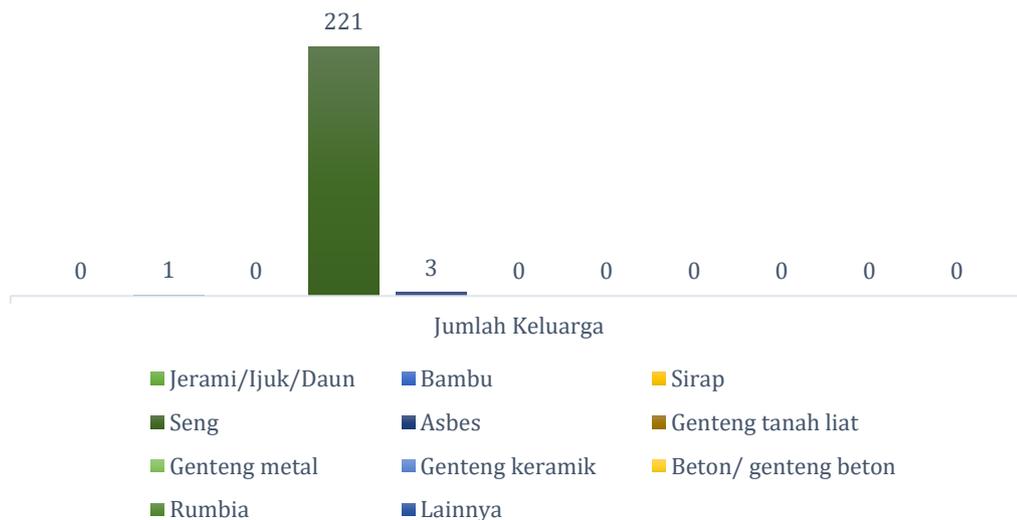
Jenis Lantai	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Tanah	0	1	0	4	5
Kayu/Papan Kualitas Rendah	9	5	6	14	34
Bambu	0	0	2	3	5
Semen/Bata Merah	32	18	13	24	87
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	6	5	4	8	23
Ubin/Tegel/Teraso	2	4	0	3	9
Parket/Vinil/Permadani	0	0	0	0	0
Keramik	31	7	13	9	60
Marmer/Granit	1	1	0	0	2



Gambar 68 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali Di Desa Leppangan

Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

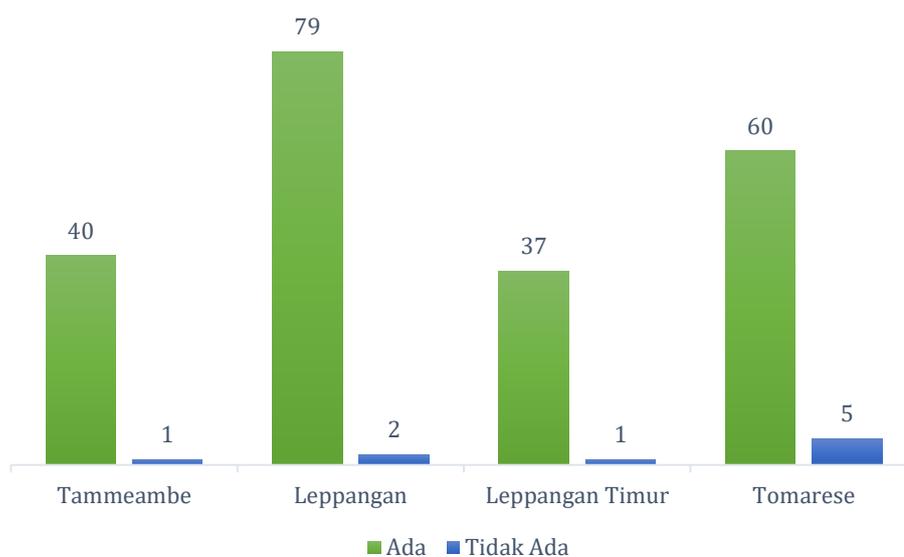
Jenis Dinding	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Bilik	1	0	0	0	1
Bambu	3	2	1	2	8
Kayu	16	10	10	35	71
Tembok tanpa plesteran	9	8	8	7	32
Tembok plesteran	52	21	19	21	113

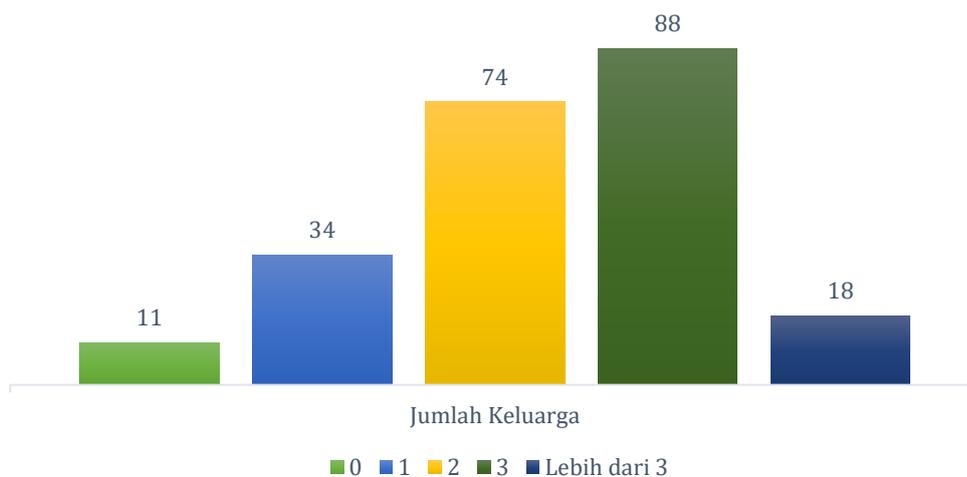


Gambar 69 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

Tabel 43 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

Jenis Atap	Leppangan	Tammeambe	Leppangan Timur	Tomarese	TOTAL
Jerami/Ijuk/Daun	0	0	0	0	0
Bambu	0	1	0	0	1
Sirap	0	0	0	0	0
Seng	79	40	37	65	221
Asbes	2	0	1	0	3
Genteng tanah liat	0	0	0	0	0
Genteng metal	0	0	0	0	0
Genteng keramik	0	0	0	0	0
Beton/ genteng beton	0	0	0	0	0
Rumbia	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0

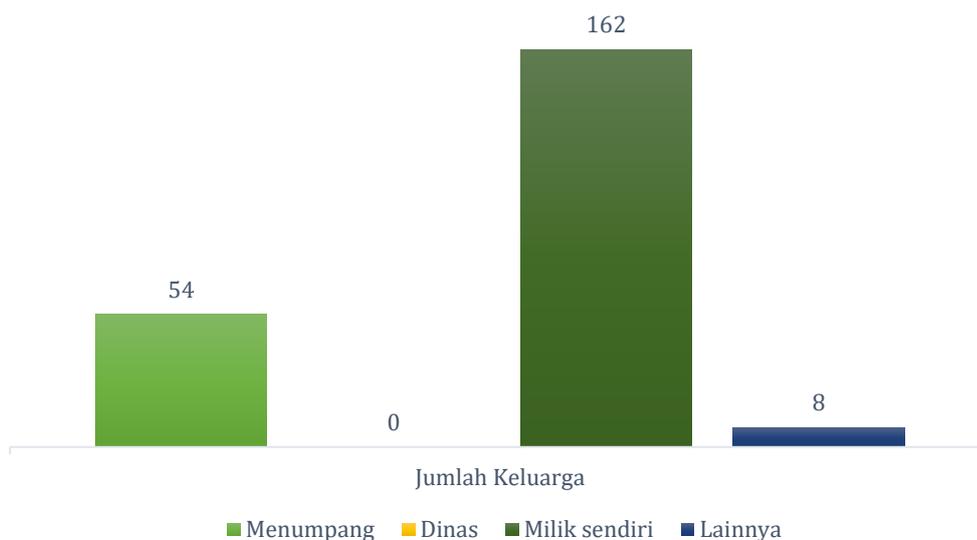
**Gambar 70** Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Desa Leppangan



Gambar 71 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Leppangan

Tabel 44 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Leppangan

Dusun	Jumlah Kamar Tidur di Rumah				
	Tidak ada	1	2	3	Lebih dari 3
Leppangan	0	9	36	27	9
Tammeambe	0	8	7	24	2
Leppangan Timur	2	5	10	18	3
Tomarese	9	12	21	19	4
TOTAL	11	34	74	88	18



Gambar 72 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

Tabel 45 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Leppangan

Dusun	Status Kepemilikan Rumah yang Ditinggali				
	Menumpang	Kontrak/sewa	Dinas	Milik sendiri	Lainnya
Leppangan	19	1	0	57	4
Tammeambe	5	0	0	36	0
Leppangan Timur	13	0	0	25	0
Tomarese	17	0	0	44	4
TOTAL	54	1	0	162	8



S E L A T M A K A S S A R



DATA DESA PRESISI

LPPM IPB University

An aerial photograph of a coastal village, likely in Indonesia, showing numerous small houses with colorful roofs (red, blue, green) clustered together. The village is situated on a peninsula or near a large body of water. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the top-left and bottom-right corners, there are white L-shaped corner brackets.

Bagian 9 DATA SOSIAL

Desa Leppangan, Kecamatan Sendana
Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat

DATA SOSIAL

9.1 Kelembagaan Desa Leppangan (Diagram Venn)

Diagram Venn menggambarkan hubungan antara kelembagaan yang ada dan masyarakat Desa Leppangan. Semakin besar ukuran dan semakin dekat jarak lembaga tersebut dengan masyarakat Desa Leppangan, maka lembaga tersebut dianggap sangat berpengaruh dan penting bagi masyarakat Desa Leppangan.



Gambar 73 Diagram venn kelembagaan Desa Leppangan

Berdasarkan Gambar 73 yang merupakan hasil FGD, dapat diketahui bahwa terdapat 10 lembaga lokal yang terdapat di Desa Leppangan. Secara kelembagaan pemerintahan Desa Leppangan, PKK dan kelompok tani berpengaruh sangat besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kesiapsiagaan pemerintah desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Adapun PKK dan kelompok tani di Desa Leppangan memiliki pengaruh yang besar karena banyak membuat kegiatan dan seringnya gotong royong, namun memiliki hubungan yang kurang dekat dengan masyarakat dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya mengikuti kelompok tersebut. PKK memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat dan cukup memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat desa dengan berbagai program yang dijalankan.

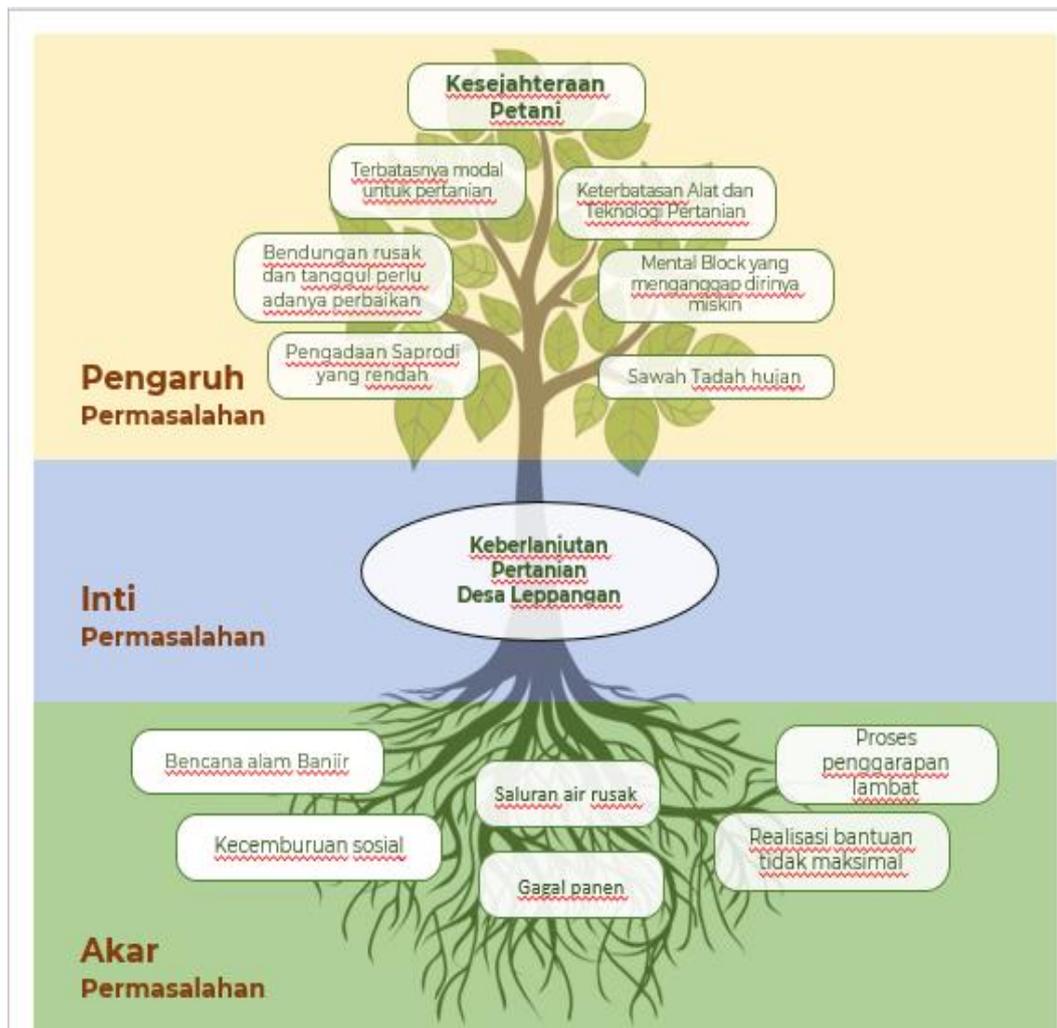
Majelis Ta'lim juga sangat dekat dan berpengaruh besar di masyarakat terutama dalam bidang keagamaan di Desa Leppangan dengan berbagai kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat.

Kelembagaan KWT (Kelompok Wanita Tani) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pertanian memberikan pengaruh besar dan dekat dengan masyarakat terutama golongan perempuan Desa Leppangan Hal tersebut disebabkan karena kegiatan sumber penghasilan utama masyarakat di Desa Leppangan. Remaja masjid yang tersebar di masjid-masjid di Desa Leppangan memiliki pengaruh besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Bersama program yang menyisir segala kalangan, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan di Desa Leppangan. Adapun majelis Ta'lim memiliki pengaruh yang cukup besar, namun kurang dekat dengan masyarakat karena sebaran yang tidak merata.

Lembaga BPD memiliki pengaruh yang cukup besar namun kurang dekat dengan masyarakat disebabkan kegiatan BPD dalam pengawasan masih kurang. Karang taruna yang mewadahi kegiatan kepemudaan di Desa Leppangan juga memiliki pengaruh yang besar dan sangat dekat dengan masyarakat. Adapun PLD (Pendamping Lokal Desa) memiliki pengaruh cukup kecil dan kurang dekat dengan masyarakat. Terkait dengan BUMDES yang memiliki pengaruh kecil dan tidak dekat dengan masyarakat, sebab sampai saat ini BUMDES masih melakukan restrukturisasi kelembagaan. Hal tersebut berdampak pada masih rendahnya hasil kinerja BUMDES yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya PPL (Penyuluh Pertanian) yang memiliki pengaruh kecil, namun sangat dekat dengan masyarakat disebabkan karena Desa Leppangan memiliki cukup banyak kelompok tani.

9.2 Pohon Masalah Desa Leppangan

Analisis pohon masalah merupakan langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat yang terjadi di Desa Leppangan. Adapun pohon masalah Desa Leppangan tersaji pada **Gambar 74**.



Gambar 74 Pohon masalah Desa Leppangan

Berdasarkan **Gambar 74** yang merupakan hasil FGD dapat diketahui bahwa masalah utama yang terjadi di Desa Leppangan adalah masalah keberlanjutan pertanian. Masalah keberlanjutan pertanian tersebut disebabkan oleh akar masalah yang terjadi di Desa Leppangan. Akar masalah pertama yaitu Bencana alam banjir sehingga menyebabkan gagal panen, bendungan rusak, irigasi dan mengakibatkan sawah memproduksi dengan metode sawah tadah hujan. Kedua, realisasi bantuan belum maksimal. Kurangnya kegiatan pembinaan inovasi pertanian seperti pelatihan pakan ternak alternatif, teknis pertanian yang baik, dan lainnya belum dilakukan. Ketiga, hama pertanian seperti babi hutan, tikus dan ulat yang belum dapat ditangani secara maksimal. Hal

tersebut menyebabkan petani sulit mendapatkan hasil panen yang maksimal; keempat, kecemburuan sosial yang kemudian mengakibatkan “*mental block*” bagi Sebagian warga yaitu kecenderungan menganggap dirinya miskin untuk juga mendapatkan bantuan; kelima, dan belum sempat tersampaikan pada saat FGD adalah minimnya sarana dan prasarana (Saprodi) pertanian yang tersedia sehingga menjadikan petani harus menunggu giliran saat akan menggunakan alat dan mesin pertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa Alat dan Mesin (Alsintan) yang minim menjadikan tambahan biaya bagi petani saat menyewa Alsintan dari pihak kedua. Selain itu, mahalannya sarana produksi pertanian menjadikan kurangnya akses petani terhadap sarana produksi yang dibutuhkan bagi kegiatan pertanian. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi petani yang kurang memiliki modal. Kendala lain mengenai sarana produksi terkait pengadaan saprodi bersubsidi.

Kelima, anjloknya harga komoditas pertanian yang diusahakan oleh masyarakat mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan menjadikan pendapatan petani rendah. Berdasarkan akar masalah tersebut maka memiliki dampak berupa tingkat produktivitas tanaman rendah. Selain itu, manajemen kelompok tani juga tidak mumpuni dan dana desa yang makin tahun makin berkurang. Daya beli yang rendah juga terjadi sebagai akibat dari akar masalah yang terjadi. Semua permasalahan yang dihadapi petani sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat petani yang rendah.

9.2 Kalender Musim Desa Leppangan

Dari aspek pertanian, kalender musim Desa Leppangan berpatokan pada komoditas pertanian yang di usahakan oleh masyarakat. Komoditas padi menjadi komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Berdasarkan waktu, kegiatan usaha tani padi dalam satu tahun dilaksanakan menjadi satu periode. Adapun pelaksanaan pertama dari kegiatan usaha tani padi dilakukan di bulan Maret dan April dengan bentuk pengolahan lahan serta penyiapan sarana produksi. Kegiatan panen padi dilakukan pada bulan Juli dan Agustus. Adapun untuk tanaman cabe dan jagung memiliki musim yang berbeda dengan tanaman padi yang dimana cabe ditanam pada saat padi tak ditanam.

Selain tanaman semusim, Desa Leppangan juga menghasilkan komoditas tanaman perkebunan. Tanaman kelapa dan kemiri menjadi salah satu komoditas perkebunan utama di Desa Leppangan yang memiliki masa panen sepanjang tahun. Tanaman kelapa memiliki masa panen selama kurang lebih 2 bulan selama bulan Desember hingga Januari ditahun berikutnya. Tanaman kemiri memiliki masa panen selama bulan Januari.

Selain musim tanam masyarakat kecenderungan melihat musim hujan dan musim kemarau untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan memulai menanam tanaman. Sedangkan untuk musim hujan di Desa Leppangan biasa terjadi pada bulan September dan untuk musim kemarau biasa terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus.

Pada Aspek sosial-budaya, kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu dilaksanakan setiap satu tahun sekali di bulan Rabiul awal atau pada tahun Masehi saat ini bertepatan dengan bulan Oktober dengan jumlah pengeluaran rata-rata per rumah tangga Rp. 500.000. Selain itu, kegiatan peringatan 10 muharram juga rutin dilaksanakan oleh masyarakat bulan Agustus dengan jumlah pengeluaran rata-rata per rumah tangga sebesar Rp. 200.000. Kegiatan pernikahan juga selalu dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat pada bulan tertentu yaitu Oktober dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 30.000.000 – 50.000.000.



9.3 Stratifikasi Sosial Desa Leppangan

Stratifikasi berasal dari kata *stratum* yang artinya adalah lapisan sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi menurut asal katanya stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Secara umum stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Gejala penggolongan masyarakat yang bersifat hierarki vertikal berakibat timbulnya kelas-kelas sosial sehingga muncullah istilah kelas sosial atas (*upper class*), kelas sosial menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Stratifikasi sosial terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Setiap masyarakat akan selalu mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu itu, akan menempatkan individu yang memilikinya pada kedudukan yang lebih tinggi juga. Apabila suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan maka mereka yang lebih banyak memiliki kekayaan materil akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu gejala tersebutlah yang menimbulkan adanya lapisan sosial dalam masyarakat, yang merupakan perbedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.

Berdasarkan **Gambar 75** yang merupakan hasil FGD FGD dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial di Desa Leppangan adalah pada kategori menengah atas (kaya) terdiri dari memiliki rumah bagus, haji, memiliki mobil, kepemilikan lahan luas, ternak sapi, dan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Untuk kategori menengah adalah ASN/Honorar/PTT, memiliki motor, pedagang/pengusaha, peternak kambing. Sedangkan pada kategori menengah bawah (miskin) di Desa Leppangan yaitu tidak memiliki kendaraan, penerima bansos, penerima beasiswa dan tidak memiliki rumah. Pada proses beralihnya status sosial tersebut dipengaruhi oleh usia dan pekerjaan.



Gambar 75 Stratifikasi sosial Desa Leppangan



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendataan dan kajian DDP di Desa Leppangan, dihasilkan beberapa kesimpulan:

- Kondisi Geografis Desa Leppangan secara luasan mencapai 841,815 hektar yang terdiri dari 4 dusun. Wilayah kebun campuran, hutan, dan kebun kelapa merupakan area yang paling banyak dan luas, yaitu sekitar 75,576 hektar untuk kebun campuran, 572,199 hektar hutan, dan 10,208 hektar sawah.
- Secara demografi di Desa Leppangan terdiri dari 225 keluarga dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 373 jiwa dan perempuan sebanyak 393 jiwa. Piramida penduduk Desa Leppangan menggambarkan bahwa terdapat 515 jiwa usia produktif. Sedangkan usia non produktif sebanyak 251 jiwa.
- Kondisi sandang, pangan dan papan Desa Leppangan bisa menunjukkan mayoritas frekuensi makan masyarakatnya yang sudah tiga kali sehari.
- Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Leppangan terbagi dalam 7 (tujuh) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D-1/D-2/D-3, D-4/S-1, dan S-2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Leppangan sebanyak 766 jiwa, mayoritas penduduk Desa ini tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit untuk kategori penduduk memiliki ijazah D-1/D-2/D-3.
- Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 638 jiwa telah ikut serta dan mayoritas penerima bantuan iuran yang tersebar pada setiap dusun.
- Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Desa Leppangan terbagi dalam 9 kategori keikutsertaan, yakni LSM/ NGO, Kelompok Tani, Kelompok Buruh, ORMAS, Koperasi/ Lembaga ekonomi lokal, kelompok pengajian, karang taruna, kelompok olahraga/hobi, gotong royong, siskamling, musdes/musdus, dan kelompok seni budaya. Berdasarkan dari total jumlah keluarga di Desa Leppangan yakni sebanyak 225 keluarga, di dalamnya terdapat keluarga yang memang mengikuti satu atau lebih organisasi sekaligus. Meskipun begitu, kategori kelompok tani masih menjadi kategori terbanyak di antara kategori keikutsertaan organisasi lainnya.
- Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Leppangan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yakni Sungai, Jurang, Bakar, Kubur, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Hasil pendataan menunjukkan mayoritas membuang sampah dengan cara dibakar,

kemudian disusul dengan keluarga yang membuang sampah di sungai. Masih sangat minim yang membuang di tempat sampah umum.

- Dari hasil pendataan kualitatif, sejak Desa Leppangan terbentuk di tahun 2011 diketahui bagaimana Desa Leppangan mengalami dinamika pembangunan yang mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan infrastrukturnya. Dari sisi kelembagaan menunjukkan bahwa untuk Pemerintah Desa, PKK, Majelis Taklim, kelompok Tani dan Remaja Masjid memiliki dampak dan kedekatan yang tinggi dengan masyarakat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Leppangan adalah soal keberlanjutan pertanian dan infrastruktur. Pola aktivitas masyarakat Desa Leppangan selama setahun juga sarat basis aktivitas pertanian, hal ini berkenaan dengan pekerjaan utama yang dominan dimasyarakat adalah petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham I, Sjaf S, Darusman D. 2019. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone . *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17(2):245–255.
- Barlan ZA, Hakim L, Sjaf S. 2020. *Instrumen Memahami Desa*. Bogor: IPB Press.
- BPS. 2021b. Village Potential Statistics of Indonesia 2021. Jakarta.
- Chambers R. 1995. Poverty and livelihoods: whose reality counts? Volume ke-7.
- Chambers R. 2006. Whats is Poverty? Who asks? Who Answers. Di dalam: Ehrenpreis D, editor. *What is Poverty? Concepts and Measures*. Brasilia: United Nations Development Programme. www.undp-povertycentre.org.
- Chambers R. 2008. *Revolutions in development inquiry*. London: Earthscan Dunstan House.
- Chambers R. 2013. Participation, Pluralism and Perceptions of Poverty. Di dalam: Kakwani N, Silber J, editor. *Many Dimensions of Poverty*. London: Palgrave Macmillan. hlm 140–164.
- Couldry N. 2004. Theorising media as practice. *Social Semiotics*. 14(2):115–132. doi:10.1080/1035033042000238295.
- Couldry N. 2020. Recovering critique in an age of datafication. *New Media Soc*. 22(7):1135–1151. doi:10.1177/1461444820912536.
- Couldry N, Powell A. 2014. Big Data from the bottom up. *Big Data Soc*. 1(2):1–5. doi:10.1177/2053951714539277.
- Creswell JW. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell JW, Clark VLP. 2017. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. London: Sage publications.
- Denzin NK, Lincoln YS. 2009. Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif. Di dalam: Denzin NK, Lincoln YS, editor. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim L. 2022 Sep 27. Menata Ulang Demokrasi Indonesia dari Indonesia. *Kompas.id*. [diakses 2022 Okt 6]. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/25/menata-ulang-demokrasi-indonesia-dari-desa>.
- Haq M ul H. 1976. *the Poverty Curtain: Choices for the Third World*. New York: Columbia University Press.
- Hudson P, Ishizu M. 2017. *History of Number: An Introduction to Quantitative Approaches*. London: Bloomsbury Academic.

- Kemendagri. 2012. *Buku Panduan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia.
- Kolopaking LM, Tonny F, Hakim L. 2020. Relevansi dan Jejak Pemikiran Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro dalam Pendidikan Sosiologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 09(1):42–54.
- Mehta AK. 2021. Estimates of Women’s Labour Force Participation: Rectifying Persisting Inaccuracies.
- Pitaloka RD. 2022. Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Pedesaan [Disertasi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Pitaloka RD, Hendriyani H, Eriyanto E, Haryatmoko H. 2022. Communication practice in village data collection. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. 6(1):179–198. doi:10.25139/jsk.v6i1.4314.
- Ruslan K. 2019. Memperbaiki Data Pangan Indonesia Lewat Metode Kerangka Sampel Area. Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/335620893>.
- Sampean, Sjaf S. 2020. The Reconstruction of Ethnodevelopment in Indonesia: A New Paradigm of Village Development in the Ammatoa Kajang Indigenous Community, Bulukumba Regency, South Sulawesi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. 25(2):159–192. doi:10.7454/MJS.v25i2.
- Sampean, Wahyuni ES, Sjaf S. 2019. The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(2):195–211. doi:10.22500/sodality.v7i3.28630.
- Sjaf S. 2017 Des 15. Merebut Masa Depan Pertanian. *Kompas*.
- Sjaf S. 2019. *Involusi Republik Merdesa*. Bogor: IPB Press.
- Sjaf S. 2021 Agu 2. Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran Di Pedesaan. *Kompas*.
- Sjaf S, Elson L, Hakim L, Godya IM. 2020. *Data Desa Presisi*. Bogor: IPB Press.
- Sjaf S, Kaswanto K, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi HFF. 2021. Measuring achievement of sustainable development goals in rural Area: A case study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 9(2). doi:10.22500/9202133896.
- Sjaf S, Sampean, Arsyad AA, Elson L, Mahardika AR, Hakim L, Amongjati SA, Gandi R, Barlan ZA, Aditya IMG, *et al*. 2022 Sep. Data Desa Presisi: A New Method of Rural Data Collection. *MethodsX*.

- Talawanich S, Jianvittayakit L, Wattanacharoensil W. 2019. Following a wonderful overseas experience: What happens when Thai youths return home? *Tour Manag Perspect*. 31:269–286. doi:10.1016/j.tmp.2019.05.013.
- Tjondronegoro S. 1984. *Social Organizatiom and Planned Development in Rural Java*. Oxford: Oxford University Press.
- Wijoyono E. 2021. The utilization of village-information system for integrated social welfare data management: actor-network theory approach in Gunungkidul regency. *Jurnal Teknosains*. 11(1):13. doi:10.22146/teknosains.60798.

“Ikhtiar Data Desa Presisi merupakan bentuk awal untuk mempercepat transformasi Indonesia mulai dari desa”

Dr. Sofyan Sjaf



- PEMERINTAH PROVINSI -
SULAWESI BARAT



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dengan IPB University Tahun 2022**